LAPORAN KINERJA 2024

PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN







KATA PENGANTAR



Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2024 dicapai dengan melewati berbagai tantangan dan rintangan yang terjadi. Dinamika lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, perubahan sistem birokrasi, menuntut respon kebijakan pemerintah yang cepat, tepat, dan akurat. Pada tataran pelaksanaan, kegiatan PSEKP juga menuntut respon yang cepat, tepat, serta inovatif dalam menyesuaikan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dan berkontribusi optimal terhadap perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini menyajikan perkembangan kinerja PSEKP dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Secara rinci laporan ini mencakup kondisi umum, perencanaan, perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja, yang meliputi kriteria/ukuran keberhasilan, pencapaian kinerja, akuntabilitas keuangan, permasalahan, dan rencana aksi.

Semoga laporan kinerja PSEKP ini dapat memberikan gambaran yang utuh terhadap kegiatan dan capaian PSEKP selama tahun 2024 dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Saran dan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang sangat diharapkan. Terima kasih saya ucapkan kepada tim dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyiapan dan penyusunan laporan kinerja PSEKP 2024.

Bogor, 31 Januari 2025
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si.
NIP 196803161997031002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR LAMPIRAN v
IKHTISAR EKSEKUTIF vi
BAB I. PENDAHULUAN 1
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 7
A. Perencanaan 7
1. Visi dan Misi 7
2. Tujuan dan Sasaran 9
3. Arah Kebijakan 10
4. Strategi 13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 20
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan 20
B. Pencapaian Kinerja Tahun 2024 21
C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 26
D. Akuntabilitas Keuangan 42
E. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya 48
F. Capaian Kinerja Publikasi dan Diseminasi 49
G. Rencana Aksi 2025 54
BAB IV. PENUTUP 57
LAMPIRAN 58

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang purna tugas pada tahun 2024	3
2.	Rekapitulasi SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menurut usia dan pendidikan periode tahun 2023-2024	4
3.	Keragaan jumlah pegawai PSEKP menurut jabatan Desember 2023 - Desember 2024	4
4.	Sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024	9
5.	Sasaran, indikator kinerja, dan target Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024	15
6.	Manual IKU Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2024	16
7.	Sasaran kegiatan dan anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2024	22
8.	Capaian kinerja indikator sasaran kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2024	23
9.	Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2020-2024 dengan target Renstra 2020-2024	25
10.	Target dan realisasi output kegiatan analisis sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian, tahun 2024	27
11.	Target dan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan kedua Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2024	34
12.	Penilaian tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pelayanan PSEKP, 2024	35
13.	Target dan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan ketiga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2024	38

14. Target dan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan keempat Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2024 38
15. Perbandingan keluaran/output kegiatan utama penelitian/analisis kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Periode 2020-2024..... 41
16. Perkembangan pelaksanaan DIPA Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran..... 43
17. Realisasi anggaran per kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA 2024..... 44
18. Target dan realisasi anggaran kegiatan analisis menurut sasaran kegiatan pertama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024..... 45
19. Target dan realisasi anggaran kegiatan pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2024 ... 46
20. Capaian PNBP Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024..... 47
21. Pengelolaan artikel di Jurnal AKP berdasarkan Open Journal System, 2024..... 49
22. Rincian judul artikel jurnal AKP Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024 50
23. Domain Baru JAE dan FAE, 2024..... 51
24. Rencana aksi perbaikan kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2025 55

DAFTAR GAMBAR

No.	J u d u l	Halaman
1.	Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024	2
2.	Grafik rata-rata harapan dan kenyataan layanan PSEKP, 2024	37
3.	Nilai Kinerja Anggaran PSEKP 2024	48
4.	Publikasi Jurnal Analis Kebijakan Pertanian (AKP), 2024	51
5.	Tampilan OJS Jurnal Agro Ekonomi (JAE) dan publikasi lain	52
6.	Agrosocioeconomics Newsletter PSEKP Vol. 17 Nomor 1, tahun 2024	53
7.	Agrosocioeconomics Newsletter PSEKP Vol. 17 Nomor 2, tahun 2024	53

DAFTAR LAMPIRAN

No.	J u d u l	Halaman
1.	Perjanjian Kinerja TA 2024	58
2.	Rekomendasi PSEKP TA 2020-2024	67
3.	Revisi Target Renstra 2020-2024	74
4.	SOP Pengumpulan Data dan Penyusunan LAKIN TA 2024	77
5.	Evidence Pendukung Penyusunan LAKIN TA 2024	81

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) adalah untuk melaporkan hasil kerja PSEKP yang dilakukan selama TA. 2024 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unit pendukung Kementerian Pertanian yaitu menghasilkan dan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian. Indikator Kinerja PSEKP meliputi dimanfaatkannya rekomendasi yang dihasilkan, kualitas layanan publik yang dilakukan oleh PSEKP, dan pengelolaan keuangan dan implementasi SAKIP. Untuk mencapai kinerja tersebut, input atau masukan yang digunakan adalah anggaran, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM).

Keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2024 ditetapkan berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PSEKP, dengan kriteria penilaian terbagi 4 (empat) kategori berdasarkan skoring, yaitu: sangat berhasil, jika capaian sasaran >100%, berhasil, jika capaian sasaran 80-100%, cukup berhasil jika capaian sasaran 60-79%, dan kurang berhasil jika capaian sasaran <60%.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja PSEKP Tahun 2024, kedua indikator yang ada pada Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun 2024 termasuk dalam kategori sangat berhasil mencapai target. Indikator yang sangat berhasil melampaui target yaitu rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan (102,15%) dan tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (105,54%). Capaian dari IKU utama yaitu rasio rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh perubahan besaran target dan keterbatasan SDM sehingga rekomendasi yang dihasilkan maksimal hanya sebesar yang ditargetkan. Upaya yang dilakukan kedepan untuk tetap dapat meningkatkan kinerja PSEKP adalah mempercepat proses alih jabatan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Analis Kebijakan. Keberhasilan capaian kinerja ini merupakan hasil dukungan dari sumber daya yang dimiliki oleh PSEKP berupa SDM, sarana prasarana, dan anggaran.

Pada Tahun 2024, anggaran PSEKP yang dikelola adalah anggaran yang berbasis kinerja. Anggaran PSEKP tahun 2024 disusun berdasarkan variabel jenis pengeluaran yang dibedakan atas: (a) belanja pegawai; (b) belanja barang; dan (c) belanja modal. Total pagu anggaran PSEKP dalam DIPA TA. 2024 setelah mengalami revisi *refocusing* program dan pemotongan anggaran serta penambahan dana hibah kerja sama luar negeri adalah Rp20.422.166.000,00. Total pagu tersebut termasuk anggaran yang diblokir sebesar Rp4.345.298.000,00 sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp16.076.868.000,00. Realisasi anggaran PSEKP tahun 2024 adalah senilai Rp14.169.354.270 atau 88,14 persen dari pagu efektif. Penyebab utama rendahnya serapan ini adalah adanya sisa anggaran gaji yang sangat besar.

BAB I
PENDAHULUAN

Kegiatan kajian aspek sosial ekonomi dan analisis kebijakan pembangunan pertanian sangat penting dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan pertanian yang tepat. Kegiatan kajian dan analisis kebijakan merupakan pra syarat terwujudnya *research/evidence based policy.* Kedepan tuntutan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada penelitian semakin besar seiring dengan dinamika lingkungan strategis yang makin dinamis dan tantangan pembangunan pertanian yang semakin berat. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat memberikan landasan, arah, dan prioritas kebijakan pembangunan pertanian. Analisis kebijakan dan pengkajian sosial ekonomi pembangunan pertanian yang mencakup penelitian kebijakan (*policy research*) dan analisis kebijakan (*policy analysis*) memiliki peran strategis, karena: (1) dapat memberikan landasan, arah, dan prioritas penelitian bidang pertanian agar sejalan dengan kebijakan pembangunan yang telah digariskan, (2) mengidentifikasi masalah dan unsur-unsur sosial ekonomi yang memengaruhi adopsi teknologi di tingkat petani, (3) mengevaluasi kelembagaan yang efektif dalam mempromosikan pengembangan suatu teknologi atau sistem usaha tani, dan (4) merumuskan, mengevaluasi, serta menyempurnakan program dan kebijakan yang diperlukan untuk mengembangkan agribisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan lembaga eselon IIa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. Sejarah PSEKP berawal dari adanya Proyek Survei Agro Ekonomi (SAE) yang dibentuk pada Tahun 1974, yang kemudian seiring dengan dinamika permasalahan pembangunan pertanian, beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur. Pada Tahun 1976, SAE berubah menjadi Pusat Penelitian Agro Ekonomi (PAE), kemudian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (P/SE) pada tahun 1990, dan selanjutnya menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (Puslitbangsosek Pertanian). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, nama lembaga ini ditetapkan menjadi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Status terakhir (Oktober 2010), berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ditetapkan menjadi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP).

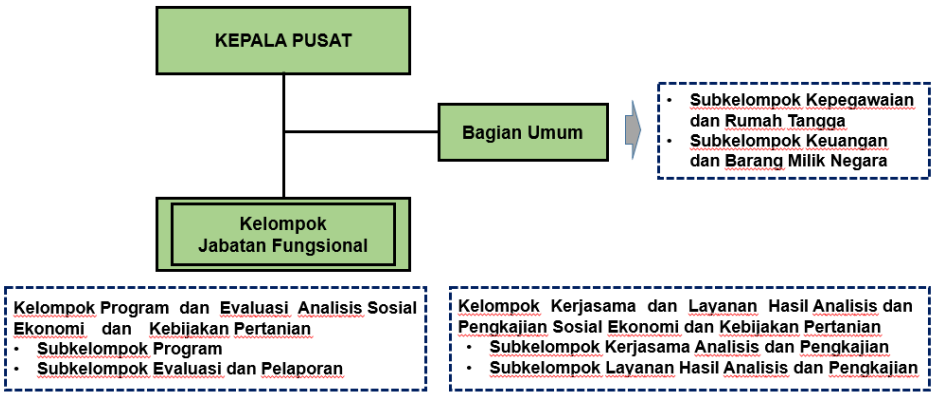
PSEKP dalam kurun waktu tiga dasawarsa (1974-2024), telah dipimpin oleh sepuluh Kepala Pusat, yaitu Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah (1976-1983), Prof. Dr. Faisal Kasryno (1983-1989), Prof. Dr. Effendi Pasandaran (1989-1995), Prof. Dr. Achmad Suryana (1995-1998), Prof. Dr. Tahlim Sudaryanto (1998-2002 dan 2006-2010), Prof. Dr. Pantjar Simatupang (2002-2006), Dr. Handewi Purwati

Saliem (2010-2016), Dr. Abdul Basit (2016-2019), dan Dr. Sudi Mardianto (2019-sekarang).

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 350 A Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2020 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif dan efisien maka PSEKP juga melakukan perubahan struktur, tugas dan fungsi organisasi. Tugas dan fungsi PSEKP yang tercantum dalam Permentan tersebut adalah:

a. perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
b. pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
c. pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian;
d. pemberian pelayanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
e. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis, dan pengkajian di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
f. pelaksanaan evaluasi, pelaporan hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan
g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dengan terbitnya Permentan Nomor 19 tahun 2022, maka struktur organisasi PSEKP tahun 2024 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024

Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian disusun untuk melaporkan kinerja kegiatan utama PSEKP dalam pencapaian

tugas pokok dan fungsinya selama TA 2024. Laporan ini mencakup kegiatan utama PSEKP, yaitu kegiatan kajian sosial ekonomi dan analisis kebijakan pertanian, baik kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBN (DIPA) maupun kerja sama penelitian dengan institusi/lembaga dari dalam negeri dan luar negeri, serta penerbitan publikasi ilmiah melalui media cetak dan elektronik. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai target sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selain itu, laporan ini juga memuat kinerja keuangan, kendala/permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada tingkat organisasi, permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan di PSEKP terutama dengan adanya integrasi peneliti ke BRIN, sehingga berdampak terhadap jumlah SDM dalam pelaksanaan kegiatan, selain itu dengan adanya kebijakan *Automatic Adjusment* (AA) beberapa kali dan *refocusing* program dan anggaran internal. Untuk mengantisipasi permasalahan akibat adanya integrasi peneliti ke BRIN, maka dilakukan upaya menambah dan mempercepat proses perpindahan analis kebijakan dari unit kerja lain untuk bergabung dengan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan. Untuk mengatasi *refocusing* anggaran, maka dilakukan revisi anggaran untuk penyesuaian kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan lebih efisiensi.

Sumber Daya Manusia Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Jumlah pegawai PSEKP yang memasuki masa purna tugas pada tahun 2024 sebanyak empat orang. Dari keempat pegawai tersebut tiga orang dari jabatan pelaksana dan satu orang dari jabatan fungsional tertentu. Rincian berdasarkan nama dan jabatan pegawai yang purna tugas disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang purna tugas pada tahun 2024

No.	Nama/NIP	Jabatan	TMT
1.	Ir. Wartiningsih NIP 196602261997032001	Pengadministrasi Perkantoran	01/03/2024
2.	R. Rachmat Hestu Wiseno NIP 196603271994031001	Pengolah Data dan Informasi	01/04/2024
3.	Nurodin NIP 196605241994031001	Operator Layanan	01/06/2024
4.	Ikarianto Haryadi, S.E. NIP 196408211990031002	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	01/09/2024

Sumber: SIM ASN Kementan 2024

Sumber Daya Manusia Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, mulai SLTA hingga S-3 serta bervariasi menurut kelompok usia. Pada tahun 2024 pegawai PSEKP jenjang doktor bertambah dua orang dari tujuh menjadi sembilan orang. Penambahan ini dikarenakan adanya satu pegawai yang mutasi ke PSEKP dari BB Pengujian

Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, BSIP dan satu pegawai PSEKP yang telah selesai masa studi yang dibuktikan dengan SK pencantuman gelar.

Jenjang pendidikan master pada tahun 2024 juga mengalami penambahan yang awalnya 24 pegawai pada tahun 2023 menjadi 27 pegawai pada tahun 2024. Penambahan tersebut disebabkan adanya penambahan satu pegawai mutasi dari Biro Umum dan Pengadaan, Sekjen dan dua pegawai yang telah selesai masa studinya dari Universitas Gadjah Mada. Jenjang pendidikan D-3 bertambah satu orang di tahun 2024 karena masuknya P3K baru. Sementara, untuk jenjang SD pada bulan Desember 2024 menjadi nol karena ada satu orang yang pensiun pada bulan Juni 2024. Keragaan SDM menurut usia dan tingkat pendidikan akhir per bulan Desember 2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menurut usia dan pendidikan periode tahun 2023-2024

Usia	S3		S2		S1		D3		SLTA		SD	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
26-30			3	3	3	2	2	2				
31-35			4	3	4	2		2				
36-40			4	5	4	4	1	1				
41-45	1	1	4	7	2	2						
46-50	2	2	4	4	3	1			4	2		
51-55	3	4	4	4	1	1	2	1	6	6		
56-60	1	2			2				3	5	1	
61-65			1	1								
66-70												
Jumlah	7	9	24	27	19	12	5	6	13	13	1	

Sumber: SIM ASN Kementan 2024

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan kompeten di bidangnya sesuai dengan jabatan yang tersedia. Jumlah pegawai mengalami penurunan dari 69 orang tahun 2023 menjadi 67 orang di tahun 2024. Penurunan jumlah pegawai tersebut dikarenakan adanya empat orang pensiun dan satu orang mutasi ke Biro UP, sedangkan yang mutasi ke PSEKP hanya dua orang dan ada satu orang penambahan pegawai dari P3K. Keragaan jumlah pegawai PSEKP sesuai dengan jabatan yang tersedia disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Keragaan jumlah pegawai PSEKP menurut jabatan Desember 2023 - Desember 2024

No.	Jabatan	2023	2024	Keterangan
1.	Struktural	2	2	
2.	Analis Kebijakan	27	27	
3.	Analis Perencana	2	2	
4.	Analis SDM Aparatur	1	1	
5.	Analis Pengelola Keuangan APBN	3	1	1. 1 pegawai mutasi ke Biro UP (Irma D TMT 1 April

No.	Jabatan	2023	2024	Keterangan
				2024) 2. 1 pegawai pensiun (Ikarianto H TMT 1 September 2024)
6.	Arsiparis	2	3	2 PNS, 1 PPPK
7.	Pranata Komputer	4	5	3 PNS, 2 PPPK
8.	Pranata Humas	2	2	1. 1 mutasi dari Biro Humas TMT 1 Agustus 2024 (Panji H) 2. Rina C menjadi Arsiparis TMT 1 Maret 2024
3.	Pustakawan	1	1	
4.	Statistisi	2	2	
5.	Pranata SDM Aparatur	1	1	
6.	Pranata Pengelola Keuangan APBN	1	1	
7.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1	1	
8.	Pelaksana	18	18	1. Wartiningsih TMT 1 Maret 2024 (pensiun) 2. R Hestu TMT 1 April 2024 (pensiun) 3. Nurodin TMT 1 Juni 2024 (pensiun) 4. Dr. Abdul Aziz TMT 1 Juni 2024 (mutasi dari BSIP) 5. Fajri S TMT 1 Januari 2024 (Aktif kembali) 6. Dyah R TMT 1 September 2024 (Aktif kembali)
9.	Petugas Belajar	2	0	
	Jumlah (orang)	69	67	

Dukungan Anggaran

Pagu anggaran awal PSEKP sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-018.01.1.418328/2024 tanggal 23 November 2023 adalah senilai Rp19.915.060.000,00. Revisi anggaran selama tahun 2024 dilakukan sebanyak 7 kali revisi POK dan 12 kali revisi DIPA.

Penyebab revisi anggaran DIPA dilakukan antara lain adanya Revisi blokir anggaran *Automatic Adjusment* (AA), penambahan anggaran non operasional, dan Revisi halaman III DIPA. Sedangkan revisi POK dilakukan untuk realokasi anggaran internal PSEKP. Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pagu karena ada tambahan anggaran hibah kegiatan kerja sama penelitian dari ACIAR sebesar Rp78.106.000,00 sehingga total pagu anggaran pada akhir Desember 2024 menjadi senilai Rp20.422.166.000,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp7.256.570.000,00; Belanja Barang Rp11.939.496.000,00; dan Belanja Modal

Rp1.226.100.000,00 Total pagu tersebut termasuk anggaran yang diblokir sebesar Rp4.345.298.000,00; sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp16.076.868.000,00. Realisasi anggaran PSEKP tahun 2024 adalah senilai Rp14.169.354.270 atau 88,14 persen dari pagu efektif.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan

Tahun 2024 ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sehingga sangat penting dalam melihat kembali dan mengevaluasi sejauh mana sasaran dan target yang disusun dapat tercapai. Hal ini penting untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional pada tahun-tahun selanjutnya. Perencanaan kegiatan analisis sosial ekonomi dan kajian kebijakan diarahkan untuk mendukung pencapaian pembangunan pertanian 2020-2024 yaitu dengan menyediakan rekomendasi kebijakan yang tepat berbasis pada hasil kajian dan landasan konseptual yang kuat.

1. Visi dan Misi

Pemerintah menetapkan satu visi, yaitu visi presiden dan wakil presiden, yaitu "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong**". Arah pembangunan pertanian merupakan penterjemahan dari visi tersebut, sehingga pembangunan pertanian Kementerian Pertanian diarahkan untuk mewujudkan: **"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".**

Sekretariat Jenderal merupakan motor penggerak Kementerian Pertanian dalam peningkatan kualitas aparatur Kementerian Pertanian, reformasi birokrasi dan pengelolaan tatalaksana organisasi serta pelaksanaan administrasi, kualitas perencanaan, anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pertanian, serta layanan kesekretariatan lainnya, termasuk kebijakan kerja sama luar negeri dan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian. Dengan mengacu kepada Visi Kementerian Pertanian, serta dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2024, maka **Visi Sekretariat Jenderal** Kementerian Pertanian adalah:

"Kredibel, Akuntabel dan Profesional dalam Memberi Dukungan Manajemen dan Administratif Kementerian Pertanian untuk terwujudnya Pertanian yang Maju, Mandiri, dan Modern"

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan unsur pendukung Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. PSEKP mempunyai tugas melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Output utama yang diharapkan adalah dihasilkannya rekomendasi dan alternatif kebijakan pembangunan pertanian, berbasis pada hasil analisis yang baik. Mengacu kepada kebijakan strategis pembangunan pertanian nasional, dan dengan berpedoman pada Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024, serta dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis baik di lingkup global, maupun lingkup nasional, maka **Visi PSEKP 2020 – 2024** dirumuskan sebagai berikut:

"Menjadi pusat analisis dan pengkajian yang handal dan terpercaya dalam menghasilkan invensi dan inovasi di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk mendukung terwujudnya pertanian yang maju, mandiri dan modern"

Visi tersebut dirumuskan berdasarkan kesadaran bahwa PSEKP merupakan lembaga pemerintah, sehingga harus berorientasi pada pelayanan dalam hal berpartisipasi secara aktif memberikan alternatif rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian berdasarkan hasil kajian yang mendalam.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka **Misi PSEKP** yang dijadikan sebagai arahan kegiatan adalah:

1. Melakukan analisis guna menghasilkan inovasi sosial ekonomi dan kebijakan pertanian sesuai kebutuhan.
2. Melakukan analisis, sintesa, telaah ulang, atau evaluasi kebijakan pertanian untuk menghasilkan rumusan alternatif atau penyempurnaan kebijakan pembangunan pertanian.
3. Melakukan layanan rekomendasi, diseminasi, dan advokasi kebijakan pertanian dalam mendukung pembangunan menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern secara berkelanjutan.
4. Mengembangkan kerja sama, kemampuan SDM, dan kapasitas institusi PSEKP dalam pelaksanaan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian serta meningkatkan pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien.

2. Tujuan dan Sasaran

Pada tahun 2024, pelaksanaan kegiatan PSEKP memiliki **Tujuan**:

1. Menghasilkan pengetahuan, data, dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) indikator pembangunan pertanian dan perdesaan, penguatan dan peningkatan usaha pertanian, manfaat adopsi teknologi, dan transformasi pertanian/perdesaan, (b) kebijakan peningkatan investasi dan perdagangan dalam upaya peningkatan ekspor pertanian, dan (c) penguatan ekonomi petani melalui peningkatan pembiayaan pertanian dan kelembagaan ekonomi petani berbasis Kawasan Pertanian;
2. Menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan dan program pembangunan pertanian yang bersifat responsif dan antisipatif;
3. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan lembaga dan *stakeholder* terkait di dalam dan luar negeri, dalam rangka peningkatan kualitas hasil analisis, efektivitas, dan percepatan diseminasi hasil analisis;
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, kualitas dan ketersediaan sarana/prasarana, serta budaya kerja inovatif dan profesional untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih;
5. Menyebarluaskan gagasan, hasil-hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian kepada pengguna.

Keberhasilan kegiatan PSEKP diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang ditetapkan berdasarkan **Sasaran** Kegiatan (SK) sesuai dengan program yang direncanakan serta tugas dan fungsi PSEKP. Sasaran kinerja PSEKP yang diukur dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) berdasarkan revisi per tanggal 23 Agustus 2024 adalah seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024

No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
1.	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan kebijakan yang dihasilkan
		1-2	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
		1-3	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab PSEKP
		1-4	Nilai IKPA Satker PSEKP

3. Arah Kebijakan

Mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Sekretariat Jenderal, dan kebijakan pembangunan pertanian, serta upaya mewujudkan visi, misi, dan pelaksanaan tugas dan fungsi PSEKP, maka **kebijakan dasar** PSEKP adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan berbasis analisis yang mengarah pada ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing produk pertanian, perluasan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pemerataan pembangunan;
2. Pengembangan kebijakan kelembagaan, perlindungan petani, serta usaha pertanian;
3. Pengembangan kebijakan ekonomi makro dan perdagangan internasional yang berpihak kepada petani; dan
4. Peningkatan kapasitas institusi yang akuntabel dan *good governance.*

Prioritas Program dan Kegiatan Analisis

Dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan, sangat penting menentukan prioritas kegiatan analisis sosial ekonomi pertanian berdasarkan dinamika tantangan dan kebijakan pembangunan pertanian. Untuk itu perumusan prioritas program dan kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang dilakukan bersinergi dengan *stakeholders* dan melalui penjaringan isu/gagasan kebijakan dari berbagai pihak. Kegiatan sinkronisasi tersebut dilakukan dengan adanya kesadaran bahwa PSEKP memiliki mandat yang berbeda dengan mandat lembaga penelitian lain, seperti BRIN atau lembaga penelitian Perguruan Tinggi, sehingga pendekatan analisisnya juga berbeda. Mandat PSEKP dalam melaksanakan kegiatan adalah lebih menekankan pada *problem solving research* untuk menunjang kinerja Kementerian Pertanian, terutama dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengetahui program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian, sehingga dapat dilakukan sinkronisasi antara program Ditjen Teknis terkait sebagai *stakeholders* dengan rencana kegiatan analisis yang dilakukan PSEKP.

Perumusan kegiatan analisis PSEKP diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Untuk itu diperlukan upaya mempertajam arah dan sasaran kegiatan analisis, PSEKP setiap tahun membentuk Tim Teknis Perencanaan dan Program Kegiatan PSEKP melalui Surat Keputusan Kepala Pusat. Tim Teknis terdiri dari analis kebijakan serta fungsional perencana yang dipandang kompeten. Tugas pokok Tim Teknis secara umum adalah merancang rencana kegiatan analisis yang akan dilakukan PSEKP. Secara spesifik Tim Teknis

mempunyai tugas: (i) melakukan penjaringan isu-isu strategis di bidang pertanian dan merumuskannya sebagai prioritas kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, (ii) melakukan penajaman arah dan program kegiatan analisis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, mulai dari penyusunan rencana kegiatan sampai penyusunan proposal analisis kebijakan, dan (iii) melakukan penelaahan dan penajaman rekomendasi kebijakan pertanian PSEKP.

Selanjutnya dalam rangka memantau kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran 2024, melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Nomor: 27/KPTS/KU.010/A.11/01/2024 tanggal 2 Januari 2024. Tugas Tim Monev adalah: (1) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan kebijakan pertanian mulai dari tahap penyusunan rencana kerja hingga laporan Sakhir kegiatan, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah ditetapkan dan membantu memberikan solusi jika terjadi penyimpangan, (2) memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian menurut tahapan kegiatan sekaligus memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas hasil analisis dan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan, serta (3) melaporkan hasil kerja kepada Kepala Pusat secara berkala atau sewaktu-waktu pada saat diperlukan.

Pengelompokan kegiatan analisis dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan sumber daya manusia. Kegiatan utama analisis kebijakan PSEKP pada tahun 2024, sumber dananya berasal dari APBN (DIPA). Kegiatan utama tersebut terdiri atas dua judul analisis kebijakan pembangunan pertanian yang dilakukan selama periode satu tahun dan empat judul kegiatan analisis kebijakan pada periode semester 1. Kegiatan awal yang direncanakan oleh PSEKP dibagi atas tiga periode kegiatan yaitu tahunan, semester 1, dan semester 2; tetapi diakibatkan adanya refocusing anggaran maupun AA, maka kegiatan yang dapat dilaksanakan hanya kegiatan tahunan dan semester 1. Pada tahun 2024, PSEKP menghasilkan 19 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan analisis kebijakan tahunan dan semester 1, serta analisis responsif isu-isu dinamika sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam bentuk *policy brief*, memo kebijakan, maupun telaahan staf sesuai dengan IKU organisasi yang disampaikan ke pimpinan Kementerian Pertanian melalui Sekretaris Jenderal (Lampiran 2).

Judul kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang dilaksanakan PSEKP dalam rentang waktu kegiatan tahunan maupun semesteran adalah sebagai berikut:

1. *Outlook* Pembangunan Pertanian 2025 – 2029 dan Strategi Pencapaiannya;
2. Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional);

3. Pembaruan Sistem Perbenihan Padi dan Jagung untuk Menjamin Ketersediaan Benih Bermutu;
4. Membangun Sistem Perbenihan Komoditas Hortikultura yang Berdaya Saing di Pasar Dalam Negeri;
5. Strategi Meningkatkan Kinerja Penyuluhan Pertanian Melalui Implementasi Perpres Nomor 35 Tahun 2022;
6. Pemanfaatan Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dalam Meningkatkan Ekspor Pertanian;
7. Strategi Meningkatkan Kinerja Penyuluhan Melalui Implementasi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022;
8. Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Pertanian;
9. Analisis Responsif Dinamika Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian;
10. Rancang Bangun Pembangunan Pertanian 2025-2029

Pada tahun 2024, PSEKP melakukan kegiatan kerja sama analisis kebijakan dengan lembaga penelitian internasional yang bersifat *multiyears*, yaitu the *Australian Centre for International Agriculture Research* (ACIAR) dengan tiga kegiatan. Adapun judul kegiatan dimaksud, yakni;

1. *Development of Area-Wide Management Approaches for Fruit Flies in Mango for Indonesia, Philippines, Australia & the Asia-Pacific Region* (IndoAWM) (PSEKP-PUSLITBANGHORTI-UGM-ACIAR);
2. *Evaluating Service Provision Approaches and Value-Chain Interventions to Support Milk Cooperatives to Grow The Smallholder Dairy Sector of Indonesia (Indodairy-2)* (PSEKP-ACIAR-IPB-UNDIP);
3. *Evidence to Underpin Indonesia' Agricultural Technology Transformation* (PSEKP-ACIAR-Beanstalk-UB).;

Indikator Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan analisis yang dilakukan PSEKP adalah masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. **Masukan (*Input*)** merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (*output*). Masukan yang digunakan dalam kegiatan analisis sosial ekonomi pertanian ini adalah dana dan sumber daya manusia (SDM) atau analis kebijakan yang melaksanakan kegiatan analisis. **Keluaran (*Output*)** merupakan hasil langsung yang dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan analisis. Keluaran tersebut dapat berupa produk/jasa fisik dan atau non fisik, misalnya digunakannya usulan alternatif kebijakan pembangunan pertanian oleh Kementerian Pertanian atau Kementerian lainnya. **Hasil (*Outcome*)** merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya, dimasukkannya beberapa usulan alternatif kebijakan dalam keputusan pembuat kebijakan pembangunan pertanian. **Manfaat (*benefit*)** merupakan kegunaan suatu keluaran yang dirasakan

langsung oleh masyarakat, sedangkan **dampak (*impact*)** merupakan ukuran tingkat pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif.

Berbeda dengan penelitian yang bersifat teknis, output yang dihasilkan dari analisis sosial ekonomi bukanlah teknologi yang bersifat *tangible* (teknologi yang dapat dilihat secara fisik), melainkan berupa pengetahuan rumusan kebijakan atau program dan rumusan rekayasa kelembagaan yang bersifat *intagible*. Dengan demikian, manfaat maupun dampak atas hasil-hasil analisis PSEKP umumnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek. Manfaat dan dampak analisis PSEKP baru terlihat setelah rumusan kebijakan dilaksanakan dan melalui proses penyesuaian di masyarakat.

Disamping itu, pengukuran manfaat dan dampak PSEKP tidak dapat berdiri sendiri karena kontribusi lembaga lain dalam pengukuran kedua indikator ini juga tidak kecil. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mengukur manfaat dan dampak analisis secara kuantitatif. Kedua indikator tersebut dapat diukur atas dasar *ex ante* analisis atau secara potensial. Secara umum, indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh PSEKP dalam tahun 2024 adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dari kegiatan analisis. Indikator output tersebut merupakan dasar penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

Setiap kegiatan analisis diharapkan dapat menghasilkan suatu keluaran yang dapat dimanfaatkan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna secara optimal. Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka pengguna utama hasil analisis PSEKP adalah: (1) pejabat pembuat dan pengelola kebijakan pembangunan pertanian lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga negara lainnya; (2) praktisi agribisnis, petani dan pengusaha agribisnis; dan (3) masyarakat umum. Disamping untuk *stakeholder* utama, hasil analisis tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh pengguna sekunder, seperti: politisi, ilmuwan, masyarakat peminat pembangunan pertanian, dan para analis kebijakan PSEKP sendiri.

4. Strategi

Lima strategi prioritas untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran bagi pengembangan PSEKP lima tahun ke depan yang disusun berdasarkan urutan skala prioritas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan program kerja sama, pelatihan, dan pendidikan DN dan LN;
2. Pengembangan model pengambilan keputusan berdasarkan analisis sosek pertanian (DSM);
3. Pemantapan proporsionalitas kepakaran bidang sosek bagi analis kebijakan pemula (pendidikan S2 dan S3);
4. Penguatan metodologi dan pengembangan model analisis dalam rangka peningkatan kinerja hasil analisis dan publikasi ilmiah;

5. Melakukan peningkatan rekruitmen tenaga bekerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka.

Dari lima strategi prioritas tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program dan kebijakan pengembangan kelembagaan PSEKP untuk periode 2020 – 2024 ke depan, yaitu: (1) pengembangan SDM analis kebijakan dan fungsional lainnya, (2) peningkatan kualitas metodologi serta pemutakhiran model analisis, (3) peningkatan kualitas dan penyebaran publikasi hasil analisis, dan (4) pengembangan *networking* dengan lembaga terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No 53 tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja sudah disepakati antara Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dengan Sekretaris Jenderal Tahun 2024 berdasarkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan dalam Renstra PSEKP 2020-2024.

PSEKP telah menyusun dokumen PK awal tahun 2024, yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2023, kemudian selama tahun 2024 PK PSEKP direvisi sebanyak tiga kali yaitu pertama pada tanggal 23 Agustus 2024 karena adanya penambahan anggaran dari sebelumnya Rp19.915.060.000,00 menjadi Rp20.215.060.000,00. Selain itu revisi PK juga dilakukan karena adanya penambahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari semula 2 IKU menjadi 4 IKU. Perubahan kedua pada tanggal 3 September 2024 karena adanya penambahan anggaran menjadi Rp20.344.060.000,00. Perubahan ketiga pada tanggal 11 November 2024 karena adanya penambahan anggaran yang berasal dari kegiatan hibah luar negeri menjadi Rp20.422.166.000,00. Berkas PK selengkapnya terdapat pada (Lampiran 1). Adapun butir-butir penting dalam Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan:

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh PSEKP, baik yang dijabarkan dalam sasaran tahunan maupun sasaran akhir rencana strategis terdiri dari satu sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

2. Indikator Kinerja:

Dari sasaran di atas, selanjutnya dapat diuraikan indikator kinerja dan target PSEKP yang ingin dicapai sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5. Indikator rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diperoleh dari hasil kegiatan rutin dari kegiatan analisis kebijakan dalam menanggapi isu-isu strategis maupun mengantisipasi isu aktual yang berkembang pada tahun berjalan dalam bentuk *policy brief*, memo kebijakan, serta telaahan staf. Indikator Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian diukur dengan kuesioner kepuasan layanan untuk eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian. Indikator Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab PSEKP direpresentasikan dari pencapaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Hasil Penilaian IKK dapat berasal dari Lembaga Administrasi Negara atau Penilaian secara mandiri. Sedangkan indikator Nilai IKPA Satker PSEKP diukur dari kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Satker PSEKP dimana penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Tabel 5. Sasaran, indikator kinerja, dan target Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	93,00%
		1-2	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,25 skala linkert (1-4)
		1-3	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab PSEKP	66,08%
		1-4	Nilai IKPA Satker PSEKP	92,80%

3. Pengukuran IKU:

Pengukuran IKU Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Manual IKU Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2024

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
SK.1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
IKSK.1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan
	Deskripsi Pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian merupakan rasio dari jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti terhadap jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan
	Sumber Data Arsip Nota Dinas/Surat Pengiriman Rekomendasi Kebijakan
	Cara Menghitung : $\left(\frac{\text{Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan}}{\text{Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dihasilkan}} \right) x\ 100\%$ Catatan: • Pemanfaatan ditandai dengan diserahkannya nota dinas/surat pengiriman rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Kementan atau stakeholder terkait lainnya. • Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian adalah sintesa hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang dilakukan dalam rangka penyusunan, monitoring, evaluasi, dan telaah ulang kebijakan pertanian. Satuan Pengukuran: Persentase Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan
	Unit yang Terlibat Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Unit Eselon I lingkup Kementan

IKSK.2	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
	Deskripsi Kepuasan Unit Eselon I diukur dari pemanfaatan hasil kajian dan rekomendasi serta layanan teknis yang diberikan oleh PSEKP. Untuk dapat menghasilkan kajian dan rekomendasi serta layanan teknis yang baik didukung oleh layanan internal yang baik. Layanan internal diukur melalui tingkat kepuasan pegawai PSEKP.
	Sumber Data Kuesioner Kepuasan Layanan
	Cara Menghitung : Teknik mengukur tingkat kepuasan dengan menggunakan model *service quality (SERVQUAL)* yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Survei untuk menilai persepsi pengguna layanan terhadap layanan PSEKP terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu: *tangibles* (berwujud), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (kepastian), dan *emphaty* (empati). Survei tingkat kepuasan Eselon I dilakukan melalui penyampaian kuesioner kepada pejabat Eselon I dan Eselon II Lingkup Kementan yang memanfaatkan rekomendasi kebijakan dan layanan teknis PSEKP lainnya. Satuan Pengukuran: Nilai Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan
	Unit yang Terlibat Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Unit Eselon I lingkup Kementan

IKSK.3	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab PSEKP
	Deskripsi Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab PSEKP direpresentasikan dari pencapaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Capaian nilai merupakan persentase capaian nilai IKK terhadap nilai maksimal IKK. Nilai IKK merupakan bagian capaian nilai tata kelola pemerintahan untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan serta capaian dampak program kerja tematik Kementerian Pertanian.
	Sumber Data Hasil Penilaian IKK dari Lembaga Administrasi Negara atau Penilaian secara mandiri
	Cara Menghitung : Skor terbobot dari instrumen IKK yang terdiri dari 2 dimensi Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan (yang meliputi 4 sub dimensi, 13 indikator, dan 39 pertanyaan). Keempat sub dimensi meliputi Agenda Setting (2 indikator), Formulasi kebijakan (5 indikator), Implementasi Kebijakan (3 indikator), dan Evaluasi kebijakan (3 indikator). Masing-masing indikator terdiri antara 2 smpai dengan 5 pertanyaan. Bobot penilaian adalah 45 persen untuk dimensi perencanaan kebijakan, dan 55 persen untuk pelaksanaan kebijakan. Penilaian terhadap masing-masing pertanyaan dan indikator melalui skoring 1 sampai 5. Nilai maksimal IKK yang dapat diperoleh adalah sebesar 100 dengan klasifikasi: - Dibawah 50,00 predikat kurang - 50,00 – 64,99 predikat cukup - 65,00 – 79,99 predikat baik - 80,00 – 90,99 predikat sangat baik - 91,00 – 100 predikat unggul Penilaian dilakukan terhadap sampel kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian, yang disampling dari populasi Permentan yang diterbitkan dalam periode 2 tahun terakhir dan masih berlaku. Satuan Pengukuran: Nilai Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan/ 2 tahunan
	Unit yang Terlibat Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Biro Hukum Kementan, Unit Eselon I lingkup Kementan, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN)

IKSK.4	Nilai IKPA Satker PSEKP
	Deskripsi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan alat monitoring dan evaluasi untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Satker Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
	Sumber Data Hasil Penilaian IKPA dari Kementerian Keuangan.
	Cara Menghitung : IKPA terdiri dari 8 indikator kinerja yaitu : 1. Revisi DIPA 2. Deviasi Hal III DIPA 3. Penyerapan Anggaran 4. Belanja Kontraktual 5. Penyelesaian Tagihan 6. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) 7. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) 8. Capaian Output Satuan Pengukuran: Nilai Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan
	Unit yang Terlibat Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Keuangan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2020-2024, sasaran kegiatan PSEKP ada satu. Sasaran kegiatan PSEKP yang berkaitan dengan tugas utama PSEKP dalam melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yakni "Meningkatnya Kualitas Layanan Rekomendasi Kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian". Selanjutnya, sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2024 dijabarkan dalam indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dari program/kegiatan utama yang berkaitan erat dengan tugas utama PSEKP. Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan PSEKP dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan akan diuraikan lebih lanjut pada bab ini.

Keberhasilan pencapaian sasaran berkaitan erat dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup PSEKP. Mekanisme monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan analisis kebijakan dilakukan melalui pemantauan manajemen pada saat apel pagi dan rapat mingguan Kepala Pusat dengan Kabag Umum dan Ketua Kelompok Substansi lingkup PSEKP. Sementara itu realisasi keuangan dipantau menggunakan program berbasis web melalui penerapan Permenkeu Nomor 249 tahun 2011 setiap bulan yang diperbarui melalui Permenkeu Nomor 214 tahun 2017 dan saat ini yang digunakan adalah Permenkeu Nomor 22 tahun 2021.

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja kegiatan dengan realisasi, yakni keluaran (*output*) kegiatan yang berkaitan dengan masing-masing sasaran tersebut. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2024 ditetapkan berdasarkan dokumen laporan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dihitung menggunakan rumus:
Capaian sasaran = Realisasi IKU dibagi Target IKU x 100%

Kriteria penilaian terbagi terbagi empat kategori kinerja berdasarkan skoring, yaitu:

1. Sangat berhasil, jika capaian sasaran >100%
2. Berhasil, jika capaian sasaran 80-100%
3. Cukup berhasil jika capaian sasaran 60-79%, dan
4. Kurang berhasil jika capaian sasaran <60%.

Fokus pengukuran pencapaian kinerja adalah pada pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (PK). Hasil pengukuran kinerja yang diuraikan di bawah ini merupakan hasil pengukuran

yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang rutin dan intensif dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Melaksanakan evaluasi proposal awal (TOR) sehingga target output kegiatan menjadi terukur dan memungkinkan untuk dicapai sebelum menjadi proposal operasional.
2. Mewajibkan kepada seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyampaikan laporan akhir kegiatan. Jika ditemukan ada permasalahan dalam upaya pencapaian tujuan dapat langsung dicari upaya penyelesaian agar pencapaian tujuan tidak terganggu.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.
4. Melakukan seminar proposal operasional dan advokasi serta diseminasi hasil analisis sehingga terjadi proses cek dan ricek terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan.
5. Pemantauan dan evaluasi secara intensif juga dilakukan terhadap realisasi anggaran secara bulanan melalui PMK 249/2011 diperbarui dengan PMK 214/2017 dan diperbaharui lagi dengan PMK 62/2023 (memfasilitasi kewajiban laporan kinerja yang diamanatkan PP Nomor 39 Tahun 2009.
6. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilakukan sebagai suatu sistem untuk menjamin keyakinan memadai agar penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan aset negara mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan kinerja sasaran kegiatan yang berkaitan erat dengan tugas utama PSEKP Tahun 2024, capaian kinerja yang berkaitan dengan pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian, kualitas layanan PSEKP terhadap eselon 1 ditampilkan pada Tabel 9 dan Tabel 10.

Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian secara umum menunjukkan hasil pencapaian sangat berhasil, capaian sasaran melebihi target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Uraian secara lebih lengkap tentang capaian kinerja masing-masing sasaran tersebut selanjutnya diuraikan pada Subbab C.

Untuk mencapai sasaran kegiatan dan empat indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut, maka PSEKP merencanakan tiga kegiatan beserta anggarannya yang dilakukan pada tahun 2024, yaitu (1) kegiatan layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian, (2) kegiatan layanan internal yang terdiri dari kegiatan manajemen mendukung kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, kegiatan diseminasi hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, dan (3) kegiatan layanan rutin pegawai

dan operasional perkantoran serta kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor (Tabel 7).

Tabel 7. Sasaran kegiatan dan anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran	1.330.012.000,00
2.	Pelaksanaan analisis sosial ekonomi pertanian	2.338.526.000,00
3.	Pelaksanaan analisis kebijakan dan isu strategis di bidang pertanian	1.089.895.000,00
4.	Penyusunan rekomendasi kebijakan pertanian	568.990.000,00
5.	Memberikan pelayanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	306.160.000,00
6.	Melaksanakan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis, dan pengkajian di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	510.993.000,00
7.	Melaksanakan evaluasi, pelaporan hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	339.030.000,00
8.	Melakukan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	13.938.560.000,00
Jumlah		**20.422.166.000,00**

Secara umum, pencapaian kinerja PSEKP adalah baik. Semua target kinerja di TA 2024 dapat tercapai, bahkan beberapa aspek melebihi target yang ditetapkan. Total pagu anggaran PSEKP TA 2024 adalah Rp20.422.166.000**,**00. Total pagu tersebut termasuk anggaran yang diblokir sebesar Rp4.345.298.000,00, sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp16.076.868.000,00. Realisasi anggaran PSEKP tahun 2024 adalah senilai Rp14.169.354.270 atau 88,14 persen dari pagu efektif. Penyebab utama rendahnya serapan ini adalah adanya sisa anggaran gaji yang sangat besar. Kelebihan gaji sebesar sekitar Rp1,8 milyar (atau 11% dari pagu efektif), masalah tersebut sebenarnya sudah diidentifikasi dan dilaporkan saat penyusunan pagu indikatif, namun berbagai upaya yang dilakukan untuk mengalihkan pagu anggaran tersebut tidak berhasil sehingga kelebihan anggaran tersebut tetap dihitung menjadi beban penyerapan anggaran PSEKP.

Jika dilihat berdasarkan pencapaian IKU PSEKP TA 2024, keempat Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dapat dicapai: (i) rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan dapat tercapai 95 persen atau 102,15 persen dari target; (ii) tingkat

kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tercapai sebesar 3.43 skala likert atau 105,54 persen dari target; (iii) Indikator Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab PSEKP menggunakan hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2023 yaitu 66,08 persen sejalan dengan mekanisme pengukuran IKK Kementerian dan Lembaga yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah dua tahun sekali yang direncanakan akan dinilai pada tahun 2025; dan (iv) Nilai IKPA Satker PSEKP pada TA 2024 adalah 95,39 persen dengan capaian 102,79 persen dari target. Capaian kinerja IKSK PSEKP tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Capaian kinerja indikator sasaran kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja				Kategori
		Uraian	Target	Capaian	%	
1.	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1.1. Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	93,00%	95,00%	102,15	Sangat Berhasil
		1.2. Tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,25 skala linkert 1-4	3,43 skala linkert 1-4	105,54	Sangat Berhasil
		1.3. Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab PSEKP	66.08%	66,08%	100,00	Berhasil
		1.4. Nilai IKPA Satker PSEKP	92.80%	95,39%	102,79	Sangat Berhasil

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian telah melakukan perubahan indikator dan target kinerja, sebagai bahan lampiran Renstra Setjen Revisi Ketiga yang akan digunakan pada revisi Renstra PSEKP dan menjadi acuan dalam penyusunan PK, tetapi pada revisi ketiga PK PSEKP TA 2024 ada tambahan dua IKU yang belum ada tercantum dalam Renstra. Capaian Kinerja tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan pada Renstra baik untuk indikator kinerja rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan maupun Tingkat kepuasan Unit Eselon I

terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Realisasi untuk rasio rekomendasi kebijakan (IKSK 1) maupun tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2020-2004 (IKSK 2) mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil dari evaluasi kinerja per tahun yang membutuhkan perbaikan. Sementara untuk IKSK 3 dan IKSK 4 baru ada pada tahun 2024, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan periode Renstra 2020-2024. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2020-2024 dengan target pada Renstra disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2020-2024 dengan target Renstra 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline 2020	Keterangan							
				2021		2022		2023		2024	
				Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN											
Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian											
1. Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan		%	N/A	88	100	90	100	92	100	93	**95**
2. Tingkat Kepuasan Unit Eselon 1 terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian		Skala Likert (1-4)	3,04	3,10	3,37	3,15	3,39	3,20	3,27	3,25	**3,43**
3. Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab PSEKP (tambahan)		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	66,08	**66,08**
4. Nilai IKPA Satker PSEKP (tambahan)		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	92,80	**95,39**

C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Analisis capaian kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan, membandingkan kinerja tahun 2024 dengan kinerja tahun 2023. Analisis dan evaluasi capaian kinerja PSEKP tahun 2024 menurut penetapan dua sasaran sesuai dengan rencana strategis (Renstra 2020-2024). Selain itu, analisis capaian kinerja juga menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja PSEKP tahun 2024. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian terdiri dari hasil analisis reguler, analisis kebijakan terkait isu strategis dan aktual, serta *policy brief*, memo kebijakan, dan telaahan staf. Hasil analisis capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan dapat dijabarkan pada uraian berikut ini.

1. Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian

Indikator kinerja kegiatan PSEKP yang pertama adalah meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian. *Output* kegiatan analisis sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian tersebut secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 10. Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan, merepresentasikan pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian. Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian merupakan hasil rekomendasi dari penelitian dan analisis kebijakan yang dilakukan dalam rangka penyusunan kebijakan. Pemanfaatan rekomendasi kebijakan ditandai dengan diserahkannya nota pengiriman atas rekomendasi kebijakan (*policy brief*, memo kebijakan, dan telaahan staf) sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan.

Indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut yang telah ditargetkan dalam tahun 2024 dapat dicapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang terealisasikan 100% dari target yang ditetapkan. Sasaran tersebut dicapai melalui dua program/kegiatan, yaitu: (1) analisis sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian yang dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan menghasilkan 6 *policy brief* serta (2) analisis kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian, yang dilaksanakan menghasilkan 13 *policy brief*, memo kebijakan, dan telaahan staf terkait berbagai isu pembangunan pertanian. Total rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan pada tahun 2024 adalah 19 rekomendasi kebijakan dari 20 rekomendasi yang

dihasilkan. Satu rekomendasi kebijakan yang berjudul Penguatan Sistem Perbenihan Padi Inbrida belum termanfaatkan karena selesai disusun pada akhir bulan Desember 2024 dan belum disampaikan kepada pimpinan Kementerian Pertanian. Oleh karena itu rekomendasi kebijakan ini masih dalam status belum termanfaatkan sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja TA 2024.

Masukan (*input*) yang dipakai untuk mendukung keberhasilan pencapaian hasil kegiatan yang terkait dengan pengkajian tersebut adalah sumber daya manusia yakni analis kebijakan, fungsional lainnya, dan dukungan dana yang bersumber dari APBN. Hasil kegiatan yang terkait dengan sasaran tersebut selanjutnya disampaikan untuk kepentingan dan dimanfaatkan oleh *stakeholder* utama yakni pimpinan Kementerian Pertanian.

Tabel 10. Target dan realisasi output kegiatan analisis sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian, tahun 2024

No.	Kegiatan	Target	Realisasi (Output)
1.	Penetapan Neraca Komoditas Beras Umum	1 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan
2.	Permohonan Perubahan Persetujuan Impor Beras dan Jagung Pakan		
3.	Perpanjangan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Skema Komersial		
4.	Memahami Lonjakan Harga Jagung 2024	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
5.	Memahami Fenomena Lonjakan Harga Gabah dan Beras dari Struktur Biaya Usaha Tani Padi dan Biaya Pengolahan Beras	2 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan
6.	Masukkan terhadap draf Surat Perintah Menteri Pertanian tentang Perbanyakan Benih BSIP		
7.	Prediksi Penurunan Luas Panen dan Produksi, serta Harga Gabah dan Beras selama Tahun 2024		
8.	Fenomena Harga Beras di Atas Harga Eceran Tertinggi	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
9.	Penguatan Sistem Perbenihan Padi dan Jagung	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
10.	Mengukur Daya Saing Usaha Tani Padi Indonesia dengan Negara Produsen Utama	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
11.	Strategi Akselerasi Program Peremajaan Sawit Rakyat	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
12.	Strategi Percepatan Implementasi Perpres No.35 Tahun 2022 Mendukung Pembangunan Pertanian Berkelanjutan		
13.	Penguatan Sistem Perbenihan Hortikultura menuju Kemandirian Benih Hortikultura	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
14.	Strategi Peningkatan Pemanfaatan berbagai	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan

No.	Kegiatan	Target	Realisasi (Output)
	Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri		
15.	Strategi Pencapaian Sasaran Swasembada Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi		
16.	Potensi Dampak Pencabutan Larangan Ekspor Beras India terhadap Harga Beras Domestik	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
17.	Strategi Peningkatan Produksi Susu mendukung Program Makan Bergizi		
18.	Penyempurnaan Neraca Pangan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Pengendalian Inflasi Provinsi Maluku	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
19.	Rekomendasi Kebijakan Penyesuaian HPP Padi	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
20.	Penguatan Sistem Perbenihan Padi Inbrida	1 Rekomendasi Kebijakan	Belum dimanfaatkan

Serapan anggaran yang bersumber dari APBN untuk kegiatan analisis sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian mencapai **99.85 persen** dari target **Rp1.285.676.000,00**. Keluaran (output) yang telah dicapai dari kegiatan pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian diuraikan sebagai berikut:

a. Outlook Pembangunan Pertanian 2025 – 2029 dan Strategi Pencapaiannya

Kinerja pembangunan pertanian periode 2020 – 2023 menunjukkan sasaran strategis yang ditetapkan tidak tercapai, baik dari sisi PDB maupun produksi komoditas utama. Program utama pembangunan pertanian 2025-2029 diformulasikan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia.

Program utama yang penting untuk dijalankan pada 2025-2029 adalah: (1) mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering, rawa, dan mempercepat pencetakan sawah baru, serta melakukan rehabilitasi, penguatan jaringan irigasi dan pemanfaatan maksimal bendungan yang ada dan pembangunan bendungan baru; (2) mendorong efisiensi pengelolaan lahan, penerapan teknologi budi daya GAP, penggunaan benih unggul, serta pengurangan kehilangan hasil panen dan *food loss and waste*. Alokasi pupuk bersubsidi dan peremajaan tanaman yang tidak produktif; (3) meningkatkan perbaikan jalan pertanian, ketersediaan pupuk bersubsidi dan benih bersertifikat, serta pemanfaatan lahan kosong, pengambilalihan HGU terlantar, dan perlindungan lahan pertanian produktif melalui insentif ekonomi agar lahan tidak beralih fungsi; (4) revitalisasi penyuluhan pertanian, pengembangan koperasi dan korporasi usaha tani, serta memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dengan memperkuat akses

pembiayaan melalui KUR, asuransi pertanian, dan promosi investasi; (5) hilirisasi produk pertanian, subsidi input output, pengendalian impor, serta promosi ekspor perlu diperkuat untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian; (6) mengembangkan program pekarangan pangan bergizi dan *urban farming* untuk meningkatkan ketahanan pangan yang mendukung peningkatan produksi unggas, telur, dan ternak produktif; serta (7) memperkuat kebijakan mandiri energi B-50 melalui pengembangan industri biodiesel dan optimalisasi pasar domestik serta internasional, sekaligus menyesuaikan kebijakan anti-deforestasi untuk mendukung daya saing kelapa sawit di pasar global.

b. Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (PANEL PETANI NASIONAL)

Berkurangnya luas panen dan produksi padi menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah ditengah upaya pencapaian swasembada pangan. Pemerintah sangat masif menjalankan program peningkatan produksi padi baik melalui ekstensifikasi (cetak sawah, peningkatan IP) di lahan-lahan suboptimal maupun intensifikasi. Namun masifnya program tersebut perlu diarahkan agar memperoleh hasil yang optimal. Jika tidak dirumuskan strategi yang cermat, dikhawatirkan program yang masif tersebut tidak berujung pada hasil yang diharapkan.

Upaya ekstensifikasi dengan melakukan cetak sawah dan optimalisasi lahan suboptimal mengalami beberapa kendala. Permasalahan cekaman lingkungan dan serangan hama sangat masif pada lahan-lahan sawah suboptimal menjadi kendala utama disamping kurangnya alsintan yang sesuai dengan kondisi tipologi lahan. Kondisi ini saling berkait dengan teknik budidaya dan tata kelola air yang belum memadai sehingga berdampak pada lambatnya waktu tanam dan waktu panen.

Pada upaya intensifikasi, selain kurangnya penggunaan alsintan, masih rendahnya penggunaan benih bermutu merupakan kendala utama yang terjadi di lapangan. Masih banyak petani yang menggunakan benih sisa panen pada musim sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari preferensi petani untuk menanam varietas lokal yang sesuai dengan kondisi lahan. Kondisi ini ditambah dengan implementasi kebijakan subsidi pupuk yang masih belum efektif sehingga pemupukan menjadi tidak tepat baik jumlah maupun waktunya.

Peningkatan kapasitas petani sebagai pelaku utama dalam melakukan budi daya juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Kondisi SDM petani Indonesia yang saat ini mengalami fenomena *aging farmer* dan rendahnya tingkat pendidikan petani harus mendapat perhatian oleh pemerintah. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah baik *on farm* maupun *off farm* juga sangat diperlukan.

Strategi pencapaian swasembada pangan perlu diarahkan pada upaya-upaya mengatasi kendala yang dihadapi baik dalam upaya ekstensifikasi maupun

intensifikasi. Percepatan waktu tanam dan waktu panen dapat dilakukan dengan peningkatan bantuan traktor dan *combine harvester*. Introduksi teknologi yang diperlukan berupa penerapan sistem tanam pindah, penggunaan bibit Varietas Unggul Baru (VUB) serta distribusi pupuk untuk memastikan pupuk tersedia secara enam tepat (tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu pupuk).

Analisis Kebijakan Responsif dan Antisipatif Isu-Isu Aktual Pembangunan Pertanian

Pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan dilakukan pada periode semesteran tersebut bersifat khusus, yakni penugasan secara *ad-hoc* melalui penunjukan oleh Kepala Pusat sesuai dengan isu-isu aktual di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang berkembang selama tahun 2024. Analis kebijakan dan fungsional lainnya seperti fungsional statistisi dan pranata komputer yang dilibatkan dan ditugaskan dalam kegiatan analisis tersebut disesuaikan kapabilitasnya dengan topik kegiatan yang dilakukan. Realisasi dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah **99,92 persen** dari target pagu efektif **Rp333.420.000,00**.

c. Pembaruan Sistem Perbenihan Padi dan Jagung untuk Menjamin Ketersediaan Benih Bermutu

Benih padi memegang peranan penting dalam upaya peningkatan produktivitas dan kualitas tanaman pangan. Oleh karena itu penggunaan benih unggul padi bermutu membutuhkan ketersediaan benih yang tepat varietas, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat harga. Target Kementerian Pertanian mengakselerasi produksi padi tahun 2024 untuk mencapai swasembada pangan membutuhkan alokasi tanam padi seluas 11,89 juta hektar dengan kebutuhan benih padi inbrida sebesar 297,25 juta ton benih padi inbrida. Namun ketersediaan benih bersertifikat yang masih dibawah 50 persen membutuhkan upaya perbaikan dari sistem perbenihan padi, yang mencakup subsistem perakitan, produksi, distribusi, pengawasan dan sertifikasinya.

Transformasi kelembagaan litkajibang-rap ke BRIN menghilangkan fungsi perakitan dan produksi benih penjenis oleh Kementerian Pertanian sehingga mengancam keberlanjutan penyediaan benih unggul padi inbrida. Produksi dan penyediaan benih sebar oleh produsen benih dan petani penangkar berkurang signifikan ketika harga gabah lebih mahal daripada harga benih dan perubahan iklim mengganggu pola tanam benih. Disamping itu, fungsi pengawasan produksi dan peredaran benih oleh Balai Pengawasan dan Sertifkasi Benih (BPSB) belum optimal karena sumber daya yang tidak mendukung.

Beberapa konsep pembaruan sistem perbenihan yang diusulkan terkait dengan keberadaan BBPSIP Padi sebagai produsen benih penjenis masih sangat diperlukan. BBPSIP Padi yang semula berada di bawah BSIP untuk

keberlangsungan fungsi produksi benih padi inbrida, maka seyogyanya dialihkan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai UPT di bawah Direktorat Perbenihan yang memang mempunyai fungsi melakukan produksi dan penyediaan benih padi. UPT tersebut bekerja sama dengan provinsi (BBI dan BPSB) sentra produksi padi dalam memproduksi benih penjenis untuk dipergunakan di provinsi tersebut. BPSB agar diposisikan sebagai lembaga pengawasan yang independen langsung di bawah gubernur atau inspektorat atau sekretariat daerah sehingga fungsi pengawasan terhindar dari intervensi kepentingan pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya BPSB dalam melakukan pengawasan produksi, distribusi, dan sertifikasi benih dapat diatasi dengan mengembangkan sertifikasi mandiri oleh produsen benih melalui LSSM Mandiri dan mendorong perluasan fungsi UPBS di bawah BSIP provinsi menjadi LS-Pro yang dapat membantu mengawasi sertifikasi mutu benih di daerah.

d. Membangun Sistem Perbenihan Komoditas Hortikultura yang Berdaya Saing di Pasar Dalam Negeri

Benih merupakan kunci utama keberhasilan agribisnis hortikultura. Permintaan benih hortikultura terus meningkat seiring dengan transformasi kegiatan pertanian yang makin berorientasi pada agribisnis. Ketersediaan benih hortikultura di pasar domestik sebagian besar dipasok oleh industri benih nasional terutama perusahaan multinasional atau Penanaman Modal Asing (PMA). Di sisi lain, produsen lokal (PMDN) masih beroperasi dalam skala terbatas dan kurang dapat bersaing dengan perusahaan PMA. Perusahan PMA melakukan impor benih untuk komoditas tertentu. Salah satu ancaman terkait pemasukan yaitu regulasi pemasukan benih yang menyebutkan bahwa pemasukan benih untuk pengadaan benih nasional dapat dilakukan apabila tidak melebihi dua tahun sejak varietas dilepas atau terdaftar. Namun, di lapangan terdapat dugaan pemanfaatan "celah" regulasi oleh beberapa produsen.

Produksi benih hortikultura dilakukan oleh perusahaan benih swasta, penangkar benih, petani, dan pemerintah. Benih yang dihasilkan petani sering kali kurang berkualitas karena berasal dari hasil panen sebelumnya sehingga menurunkan produktivitas dan keseragaman. Pengembangan benih oleh sektor swasta terutama untuk komoditas sayuran, berlangsung secara intensif. Perusahaan swasta sering kali mengembangkan benih sendiri atau mengimpor benih yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Terkait dengan pemasukan benih, penerapan dari Permentan 15/2017 dan Permentan 17/2018 serta Permentan 37/2016 terdapat ketidaksinkronan yang berdampak pada beredarnya benih impor di pasar domestik. Benih tersebut dibutuhkan oleh industri benih dan petani serta tidak sebatas pada jenis sayuran kubis, lobak, brokoli, dan sawi putih. Penyediaan benih hortikultura melalui impor khususnya dalam jumlah yang sangat besar memiliki dampak signifikan terhadap pasar benih domestik, baik dari segi harga maupun daya saing. Namun,

Meskipun jumlah impor kecil, benih impor yang dianggap lebih berkualitas dapat memengaruhi persepsi dan preferensi petani terhadap benih lokal.

Beberapa rekomendasi kebijakan antara lain: (1) harmonisasi regulasi antara Permentan 15/2017, Permentan 17/2018, dan Permentan 37/2016; (2) dukungan terhadap riset dan inovasi; (3) penyederhanaan proses regulasi dan sertifikasi; (4) penguatan dukungan perusahaan domestik; (5) pemanfaatan teknologi digital untuk distribusi; (6) penguatan mekanisme pengawasan; dan (7) kolaborasi antarpelaku usaha.

e. Pemanfaatan Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dalam Meningkatkan Ekspor Produk Pertanian

Berbagai perjanjian kerja sama perdagangan (FTA) antara Indonesia dengan negara-negara mitra yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendorong ekspor produk pertanian, nyatanya masih belum optimal pemanfaatannya. Terlebih bagi negara yang belum siap, seperti Indonesia, FTA lebih diterjemahkan sebagai upaya negara mitra untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan impor.

Penyusunan kebijakan/regulasi Kementan dalam mendorong perdagangan produk pertanian belum didasarkan pada FTA yang ada. Pemahaman FTA di tingkat pelaku usaha (terutama menengah dan kecil) juga relatif rendah karena kurangnya sosialisasi dari instansi terkait, termasuk Kementan. Hal ini berdampak terhadap rendahnya tingkat pemanfaatan FTA dalam meningkatkan ekspor dan perluasan pasar produk pertanian. Kondisi ini sulit untuk dipungkiri karena pemahaman staf di direktorat teknis terkait terhadap FTA pun masih minim.

Beberapa FTA mengindikasikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan ekspor produk pertanian, namun sebagian FTA lainnya justru berdampak lebih besar terhadap peningkatan impor produk pertanian dari negara mitra. Perdagangan produk pertanian Indonesia umumnya masih bersifat satu arah dan business as usual. Produk ekspor/impor masih cenderung sama dari waktu ke waktu (belum terdiversifikasi). Ekspor masih didominasi oleh produk mentah/intermediate, sedangkan impor didominasi produk olahan.

Unit kerja teknis Kementan seharusnya dapat melakukan monitoring dan evaluasi dari masing-masing FTA yang diimplementasikan secara regular. Upaya ini dapat dioptimalkan jika diikuti dengan program diseminasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada para pelaku usaha. Saat ini upaya tersebut masih belum menjadi prioritas di direktorat teknis Kementan.

Dokumen pendukung FTA berupa Perpres, UU, dan PMK seharusnya dapat dijadikan rujukan utama bagi Kementan untuk mengimplementasikan FTA dan mereviu kebijakan internal. Pemanfaatan FTA dapat dioptimalkan melalui penyusunan peraturan (Permentan) dan kebijakan terkait peningkatan ekspor produk pertanian yang merujuk pada regulasi terkait FTA yang ada. Di samping

itu, perlu adanya sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, dan Badan Karantina Indonesia dalam rangka meningkatkan kesiapan Indonesia dalam pemanfaatan FTA.

f. Strategi Meningkatkan Kinerja Penyuluhan Pertanian Melalui Implementasi Perpres Nomor 35 Tahun 2022

Kinerja penyuluhan pertanian dinilai semakin menurun setelah terbitnya UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang tidak mengizinkan berdirinya badan koordinasi penyuluhan dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan. Perubahan kelembagaan ini juga menyebabkan tidak adanya hubungan langsung dan vertikal antara penentu kebijakan di tingkat pusat dan pelaksana kegiatan di daerah.

Upaya untuk menguatkan kembali fungsi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, diterbitkan Perpres No.35/2022. Namun, sampai saat ini implementasi dari Perpres ini masih belum terlihat langkahnya, terutama pada substansi penguatan hubungan kerja antara pusat dan daerah dengan pembentukan satminkal di provinsi dan kabupaten/kota sebagai kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah yang baru belum ada yang terbentuk.

Strategi percepatan implementasi Perpres No. 35 Tahun 2022 harus segera dilakukan dengan mensosialisasikan substansi Perpres No.35/2022 melalui beragam media (elektronik, medsos) dan forum koordinasi dengan PEMDA. Pembentukan satu satminkal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota wajib dilakukan melalui surat keputusan dari gubernur/bupati/walikota. Untuk mempercepat pembentukan satminkal, diperlukan kerja sama antara Kementan dan Kemendagri. Perencanaan, pembinaan, pengawalan, pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi dengan pendekatan yang terstruktur dan terkoordinasi harus dilakukan dalam percepatan implementasi Perpres, agar berjalan lebih efisien dan efektif. Perlu dibentuk tim monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan implementasi Perpres No. 35/2022, dengan SOP dan anggota yang memiliki kapasitas. Membuat *pilot project* Satminkal penyuluhan pertanian di beberapa daerah yang memiliki UPTD Penyuluhan pertanian untuk menjadi percontohan serta didukung dengan kelengkapan sarana prasarana dan TIK. Memperkuat Dukungan anggaran yang berbasis kinerja dari pusat dan daerah terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Kementan harus memperkuat sumber daya dan melakukan kerja sama dengan banyak pihak antara lain dengan Kemendagri, Kominfo, Perguruan Tinggi, BRIN, PEMDA dan pihak terkait lainnya.

2. Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Indikator Kinerja Kedua, yakni tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Target dan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan kedua Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.2. Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,25 skala linkert 1-4	3,43 skala linkert 1-4	105,54

Tahun 2024 dilakukan **pengukuran Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan PSEKP**. PSEKP dituntut untuk mewujudkan peningkatan kualitas terhadap layanan umum, program dan evaluasi, serta kerja sama dan layanan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Sebagai unit kerja yang menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian dan diseminasi hasil analisis di lingkup Kementerian Pertanian serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai arah kebijakan dan peraturan perundang-undangan, PSEKP membutuhkan sumber daya yang memadai dan SDM yang kompeten serta membutuhkan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Indikator Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan PSEKP mulai diterapkan pada tahun 2019 melalui pengukuran capaian atas persentase tingkat kepuasan kualitas terhadap layanan. Survei dilakukan dengan mendistribusikan kuisioner berupa *google form* melalui *link* https://bit.ly/ikm-psekp ke seluruh unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk mengetahui bagaimana respon dan tanggapan *stakeholder* terkait terhadap layanan yang diberikan oleh PSEKP. Isian kuesioner dari seluruh *stakeholder* selanjutnya direkapitulasi dan diolah dengan metode penghitungan diawali dengan melakukan pembobotan terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tersebut. Kuesioner terdiri dari 19 indikator pernyataan dan metode penilaian menggunakan skala *likert* yang terdiri dari empat pilihan skala yang mempunyai gradasi dari Sangat Puas (SP) hingga Tidak Puas (P). Empat pilihan tersebut adalah Sangat Puas (SP), Puas (P), Kurang Puas (KP) dan Tidak Puas (TP).

Kepuasan kualitas pemberian layanan oleh PSEKP diukur melalui *survey* dengan model kualitas jasa *Service Quality* (Servqual) yaitu terdapat lima dimensi penilaian diantaranya *tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty*. Model Servqual mengasumsikan bahwa konsumen membandingkan kinerja jasa pada atribut-atribut yang relevan dengan standar ideal/sempurna. Apabila kinerja jasa sesuai atau melebihi standar maka persepsi kualitas jasa secara keseluruhan akan positif begitupun sebaliknya. Jadi model Servqual menganalisis kesenjangan antara jasa yang diharapkan/ kepentingan dan jasa yang dipersepsikan/kepuasan.

Kepentingan : Kualitas jasa/pelayanan yang diharapkan konsumen

Kepuasan : Fakta kualitas jasa/layanan yang dirasakan

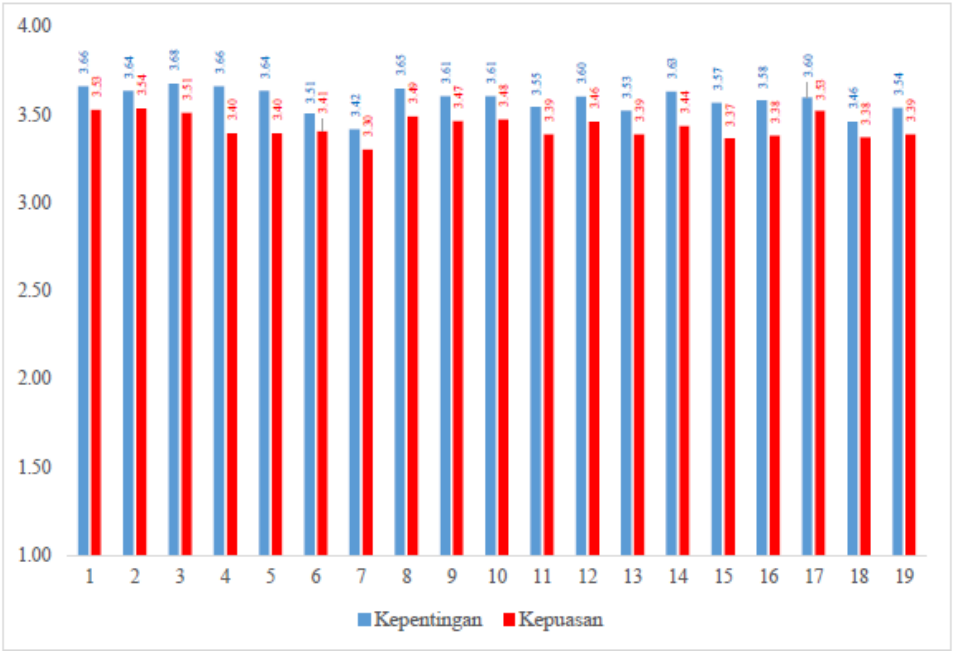
Penilaian tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan pelayanan PSEKP disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Penilaian tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pelayanan PSEKP, 2024

No.	Dimensi	No. Indikator Pernyataan	Rata-rata	
			Kepentingan	Kepuasan
1	***Tangibles*** **(Berwujud)**	1. Kebersihan lingkungan ruang kerja	3,667	3,529
		2. Kenyamanan Ruang Rapat	3,638	3,538
		3. Kelengkapan Fasilitas Ruang Rapat: AC, Kursi, Meja, Lampu, PC, Infocus, Mic Teleconference, WIFI, white board	3,679	3,513
		4. Kebersihan Toilet	3,663	3,396
		5. Kelengkapan Toilet: kecukupan air, penerangan, wastafel, kaca, hand soap, pewangi ruangan, penghisap udara, keset, tempat sampah, tisue	3,638	3,396
		6. Penampilan pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3,508	3,408
		7. Dekorasi tanaman hidup di luar dan dalam ruang kerja	3,421	3,304
2	***Reliability*** **(Keandalan)**	8. Pelayanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3,650	3,492
		9. Konsultasi dan Informasi dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3,608	3,467
		10. Totalitas pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) melaksanakan tugas	3,608	3,475
		11. Ketepatan waktu pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan	3,546	3,392

No.	Dimensi	No. Indikator Pernyataan	Rata-rata	
			Kepentingan	Kepuasan
		Kebijakan Pertanian (PSEKP) terhadap penyelesaian permintaan layanan		
3	***Responssive* (Daya Tanggap)**	12. Keresponsifan petugas Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) dalam melayani	3,604	3,463
		13. Kecepatan petugas Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) dalam memproses permintaan layanan	3,525	3,392
4	***Assurance* (Kepastian)**	14. Kekompetanan pegawai dalam memberikan pelayanan	3,633	3,438
		15. Regulasi terkait pelaksanaan layanan dari Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3,571	3,367
		16. Ketepatan solusi dalam menyelesaikan masalah pelayanan dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3,583	3,383
		17. Keramahan Pegawai dalam memberikan pelayanan	3,600	3,525
5	***Emphaty* (Empati)**	18. Keinisiatifan dalam pemberian pelayanan perencanaan oleh Pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3,463	3,375
		19. Kemudahan memperoleh Informasi	3,542	3,392
Jumlah			68,142	65,242
Rata-rata			**3,586**	**3,434**

Komponen penilaian yang terdapat dalam kuesioner mencakup: kualitas pelayanan bagian umum, program dan evaluasi, kerja sama dan layanan hasil analisis, termasuk di dalamnya konsistensi waktu dan sikap SDM PSEKP pada saat memberikan pelayanan. Total responden dalam penilaian ini sebanyak 120 responden dan analisis data hanya dilakukan pada responden yang pernah berinteraksi langsung dengan PSEKP. Hasil pengolahan data diperoleh **nilai kepuasan sebesar 3,43**. Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh PSEKP. Grafik rata-rata harapan dan kenyataan layanan PSEKP tahun 2024 disajikan pada Gambar 2.



Sumber: Data primer diolah (2024)

Gambar 2. Grafik rata-rata harapan dan kenyataan layanan PSEKP, 2024

Tingkat kepuasan eselon 1 terhadap layanan yang dilakukan PSEKP pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Nilai tingkat kepuasan pada tahun 2023 sebesar 3,27 dan tahun 2024 sebesar 3,43; terjadi peningkatan sebesar 0,16. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan layanan yang diberikan oleh PSEKP kepada eselon 1, untuk itu diharapkan PSEKP dapat semakin meningkatkan layanannya di tahun 2025.

Pada tahun 2024 kegiatan yang diupayakan untuk mendukung implementasi SAKIP PSEKP antara lain:

a. Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024;

   Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai. Penyusunan PK lingkup PSEKP dilakukan pada level eselon II. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, PK disusun satu bulan setelah anggaran diterbitkan dan dapat

direvisi atau disesuaikan apabila: terjadi pergantian atau mutasi pejabat; perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

b. Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja PSEKP;
Pada tahun 2024 pengisian capaian indikator kinerja dilakukan setiap bulan secara elektronik melalui web eSAKIP Kementerian Pertanian.

c. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) lingkup PSEKP tahun 2024 berdasarkan PK yang sudah disusun sebelumnya.

3. Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi tanggung jawab PSEKP

Indikator Kinerja Ketiga, yakni Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab PSEKP. Sebagai instansi pemangku analisis kebijakan Capaian Nilai RB ini dideskripsikan sebagai capaian nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang penilaiannya dilakukan dua tahun sekali oleh LAN sehingga angka realisasi tahun 2024 ini menggunakan realisasi tahun 2023. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Target dan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan ketiga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.3. Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab PSEKP	66,08 %	66,08%	100,00%

4. Nilai IKPA Satker PSEKP

Nilai IKPA Satker PSEKP diukur dari kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Satker PSEKP dimana penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Target dan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan keempat Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.4. Nilai IKPA Satker PSEKP	92,80%	95,39%	102,79

Berdasarkan uraian kinerja di atas bahwa realisasi sasaran kegiatan yang dicapai PSEKP sampai akhir tahun 2024 secara umum seluruh sasaran yang ditetapkan oleh PSEKP telah dapat dicapai dengan baik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan untuk mencapai **indikator kinerja sasaran kegiatan pertama** dilengkapi dengan materi analisis, seperti proposal operasional, outline analisis, serta kuesioner untuk pengumpulan data primer maupun daftar data sekunder yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan analisis. Tercapainya **indikator kinerja sasaran kegiatan kedua** tidak lepas dari komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja terkait untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik secara konsisten dan berkesinambungan. Keberhasilan pencapaian target ini juga dikarenakan beberapa program layanan publik yang diberikan PSEKP telah berjalan secara efektif dan efisien. Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan, keberhasilan capaian kinerja tidak terlepas dari berbagai pengaruh faktor lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal. Hambatan, kendala, dan beberapa permasalahan yang dihadapi terutama pada saat dilakukannya kajian dapat memengaruhi kinerja PSEKP tahun 2024. Kegiatan kajian ini merupakan salah satu penentu tercapainya sasaran kegiatan PSEKP yaitu pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian. **Indikator kinerja sasaran kegiatan ketiga,** pada tahun 2024 tidak dilakukan sehingga masih menggunakan nilai tahun 2023 yang juga dinilai baik. **Indikator kinerja sasaran kegiatan keempat,** dinilai sudah mencapai target karena adanya didukung perencanaan penarikan dana yang secara rutin dilakukan penyesuaian jika mengalami perubahan kebijakan anggaran.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor internal yang memengaruhi keberhasilan kegiatan tersebut adalah: adanya monitoring dan evaluasi kegiatan analisis yang dilakukan manajemen sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap akhir, termasuk advokasi dan diseminasi hasil kajian analisis kebijakan sehingga ada kontrol/pengawasan dalam setiap tahapan kegiatan dengan melakukan seminar yang dihadiri oleh pihak eksternal PSEKP. Dengan demikian bila terjadi permasalahan-permasalahan, baik di lapang maupun dalam proses pengolahan data, dapat segera dilakukan antisipasi penanggulangannya.

a) Dukungan dan koordinasi manajemen, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana kegiatan. Sarana yang telah tersedia dengan baik dalam mendukung kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, seperti: peremajaan fasilitas komputer, printer dan *scanner*, peningkatan dukungan jaringan internet dengan provider baru, ruangan ber-AC, peningkatan ruang baca perpustakaan, pemeliharaan kendaraan, dan sarana prasarana gedung lainnya.

b) Dukungan dan koordinasi manajemen dalam peningkatan pelayanan publik, pengelolaan laporan keuangan, dan implementasi SAKIP di lingkup PSEKP.

Faktor-faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan kegiatan terutama kegiatan analisis kebijakan antara lain adalah telah terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara PSEKP dengan instansi terkait, baik di lingkup Kementerian Pertanian seperti: Direktorat Jenderal, maupun instansi di luar Kementerian Pertanian seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, Asosiasi berbagai komoditas, Perguruan Tinggi, BRIN, bahkan dengan instansi luar negeri seperti ACIAR dan IFPRI. Hal ini memudahkan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam kajian analisis kebijakan.

Permasalahan

Pada tingkat organisasi, permasalahan yang masih ditemui dalam pelaksanaan kegiatan di PSEKP terutama dengan adanya integrasi peneliti ke BRIN, sehingga berdampak terhadap jumlah SDM dalam pelaksanaan kegiatan, selain itu dengan adanya kebijakan *Automatic Adjusment* (AA) beberapa kali dan *refocusing* program dan anggaran internal maka kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian seringkali harus melakukan penyesuaian rencana kegiatan. Keterbatasan jumlah SDM, ketersedianaan anggaran juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kajian analisis kebijakan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Langkah-Langkah Inisiatif yang Diambil

Untuk mengantisipasi permasalahan akibat adanya integrasi peneliti ke BRIN, maka dilakukan upaya menambah dan mempercepat proses perpindahan analis kebijakan dari unit kerja lain untuk bergabung dengan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan. Beberapa SDM yang telah berintegrasi ke BRIN masih dilakukan kerja sama dengan pihak lain untuk kegiatan yang sedang berjalan.

Untuk mengatasi *refocusing* anggaran, maka dilakukan revisi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan efisiensi. Kegiatan kajian dan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi, pertimbangan, dan advokasi kebijakan dan program pembangunan pertanian bagi pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain, pelaku agribisnis, dan petani yang lebih akurat, dengan didukung data kuantitatif di tingkat petani, yang paling mutakhir.

Capaian Kinerja Utama PSEKP

Capaian kinerja utama PSEKP pada periode 2020-2024 menunjukkan jumlah rekomendasi yang dihasilkan telah mencapai target pada Perjanjian Kinerja yang di tetapkan setiap tahun (Tabel 15).

Tabel 15. Perbandingan keluaran/output kegiatan utama penelitian/analisis kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Periode 2020-2024

Uraian	Rekomendasi Kebijakan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	16	16	16	14	20
Capaian	35	33	23	14	19
Tingkat Capaian (%)	218,75	206,25	143,75	100,00	95,00

Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 adalah 80 rekomendasi kebijakan, atau target per tahun sebanyak 16 rekomendasi kebijakan, terdiri dari 7 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kajian reguler yang sudah ditentukan dan 9 rekomendasi kebijakan terkait evaluasi dan tanggap cepat atas isu kebijakan aktual. Tahun 2023 target rekomendasi kebijakan dikurangi jumlahnya menjadi 14 rekomendasi kebijakan dikarenakan adanya pengurangan jumlah SDM. Realisasi kegiatan pada tahun 2023 adalah 14 rekomendasi (100%), sedangkan realisasi rekomendasi kebijakan di tahun 2024 adalah sebesar 19 rekomendasi kebijakan (95,00%). Sampai dengan tahun terakhir periode renstra 2020-2024, capaian realisasi kinerja sebesar 124 rekomendasi kebijakan (155%) dari rekomendasi kebijakan yang ditargetkan (80). Namun demikian, terlepas dari capaian target yang diperoleh, yang lebih penting adalah upaya untuk meningkatkan kualitas rekomendasi yang dihasilkan perlu terus dilakukan agar pemanfaatannya oleh *stakeholder* meningkat.

Semua kegiatan analisis tidak terlepas dari adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan manajemen sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap akhir, termasuk advokasi dan diseminasi hasil analisis sehingga ada kontrol atau pengawasan dalam setiap tahapan kegiatan. Dengan demikian bila terjadi permasalahan, baik di lapang maupun dalam proses pengolahan data, dapat segera dilakukan antisipasi penanggulangannya. Selain itu, pencapaian kinerja PSEKP juga disebabkan adanya dukungan dan koordinasi manajemen, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana kegiatan.

Kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian ke depan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi, pertimbangan dan advokasi kebijakan dan program pembangunan pertanian bagi pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain, pelaku agribisnis dan petani yang lebih akurat, dengan didukung data kuantitatif maupun kualitatif di tingkat petani yang paling mutakhir.

D. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian secara umum berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Anggaran PSEKP tahun 2024 disusun berdasarkan variabel jenis pengeluaran dan variabel kegiatan. Variabel jenis pengeluaran dibedakan menurut belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sementara itu variabel kegiatan dibedakan menurut jenis kegiatan, yakni: kegiatan utama mencakup Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, serta kegiatan penunjang yang mencakup: (a) pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan; (b) penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; (c) pelayanan publik atau birokrasi, dan (d) perawatan sarana.

Total pagu anggaran PSEKP dalam DIPA TA. 2024 berdasarkan revisi terakhir adalah Rp20.422.166.000,00 yang terdiri dari (1) Belanja Pegawai Rp7.256.570.000,00; (2) Belanja Barang Rp11.939.496.000,00, dan (3) Belanja Modal Rp1.226.100.000,00. Perkembangan pelaksanaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2024 periode 31 Desember 2024 menunjukkan bahwa, realisasi capaian keuangan secara total mencapai Rp14.169.354.270,00. (88,14%), terdiri dari belanja pegawai yang sudah direalisasikan Rp5.436.521.844,00 (74,92%), sementara untuk belanja barang yang sudah direalisasikan Rp8.107.240.425,00 (67,90%), dan realisasi untuk belanja modal Rp614.496.440,00 (50,12%). Dengan demikian sisa anggaran per 31 Desember 2023 adalah Rp6.263.907.291,00 (30,67%) sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 16.

Selanjutnya rincian keuangan menurut sasaran dan program pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 17. Anggaran keuangan pada Tabel 17 tersebut merupakan anggaran yang digunakan untuk kegiatan utama kajian analisis kebijakan dalam mencapai sasaran yang terkait dengan pemanfaatan rekomendasi kebijakan pertanian bagi *stakeholder* dalam rangka pembangunan pertanian. Total anggaran yang terkait dengan program utama yang diselenggarakan di PSEKP, yakni: tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka pembangunan pertanian, terwujudnya jalinan kerja sama kegiatan (dalam dan luar negeri) dan terpublikasinya hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam mendukung program pembangunan pertanian dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 18.

Tabel 16. Perkembangan pelaksanaan DIPA Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran

Kode	Jenis Pengeluaran	Pagu (Rp.)	Realisasi		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
51	Belanja Pegawai	7.256.570.000	5.436.521.844	74,92	1.820.048.156	25,08
52	Belanja Barang	11.939.496.000	8.107.240.425	67,90	3.832.255.575	32,10
	Rupiah Murni	20.344.060.000	14.080.672.409	69,21	6.263.387.591	98,57
	Hibah LN	78.106.000	77.586.300	99,33	519,700	0,67
53	Belanja Modal	1.226.100.000	614.496.440	50,12	611.603.560	49,88
	Total	**20.422.166.000**	**14.158.258.709**	**69,33**	**6.263.907.291**	**30,67**

Sumber: Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara PSEKP (2024)

Tabel 17. Realisasi anggaran per kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	PAGU (Rp)	PAGU EFEKTIF (Rp)	BLOKIR (Rp)	REALISASI		SALDO ANGGARAN	
					Rp	%	Rp	%
ABR	**Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum**	**16.076.868.000**	**16.076.868.000**	**4.345.298.000**	**14.169.354.270**	**88,14**	**1.907.513.730**	**11,86**
ABR.001	***Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian***	***7.939.496.000***	***4.172.798.000***	***3.766.698.000***	***4.155.077.694***	***99,58***	***17.720.306***	***0,42***
101	Perencanaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Penyediaan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian	2.686.697.000	1.427.484.000	1.259.213.000	1.422.715.385	99,67	4.768.615	0,33
102	Pelaksanaan Layanan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Dinamika Pembangunan Pertanian	3.997.411.000	1.847.836.000	2.149.575.000	1.844.146.158	99,80	3.689.842	0,20
103	Evaluasi, Pelaporan, dan Penyebaran Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Rekomendasi Kebijakan Pertanian	1.255.388.000	897.478.000	357.910.000	888.216.151	98,97	9.261.849	1,03
EBA.994	***Layanan Perkantoran PSEKP***	***11.256.570.000***	***11.256.570.000***	***0***	***9.399.780.136***	***83,50***	***1.856.789.864***	***6,50***
001	Pembayaran gaji dan tunjangan	7.256.570.000	7.256.570.000	0	5.445.713.405	75,05	1.810.856.595	24,95
002	Operasional dan Pemeliharaan kantor	4.000.000.000	4.000.000.000	0	3.954.066.731	98,85	45.933.269	1,15
EBB.951	***Layanan Sarana Internal PSEKP***	***888.100.000***	***647.500.000***	***240.600.000***	***614.496.440***	***94,80***	***33.003.560***	***5,20***
112.A	Pengadaan Alat Pengolah Data	324.000.000	324.000.000	240.600.000	297.500.000	91,82	26.500.000	8,18
112.B	Pengadaan Alat Komunikasi	442.500.000	315.500.000	127.000.000	309.000.000	97,94	6.500.000	2,06
112.C	Pengadaan Fasilitas Kantor	121.600.000	8.000.000	113.600.000	7.996.440	99,96	3.560	0,04
EBB.971	***Layanan Prasarana Internal***	***338.000.000***	***0***	***338.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
111	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	338.000.000	0	338.000.000	0	0	0	0

Sumber: Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara PSEKP dari aplikasi SAKTI (2024)

Tabel 18. Target dan realisasi anggaran kegiatan analisis menurut sasaran kegiatan pertama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN		TARGET		REALISASI	
				Rupiah	%	Rupiah	%
Tersedianya layanan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan	Jumlah layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian berkelanjutan	1	Outlook Pembangunan Pertanian 2025-2029 dan Strategi Pencapaiannya	175.010.000,00	100,00	174.913.375,00	99,94
		2	Pelaksanaan Kegiatan "Dinamika Capaian Kebijakan dan Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaaan: PATANAS (Panel Petani Nasional"	298.270.000,00	100,00	298.190.914,00	99,97
	Jumlah layanan rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian	Rekomendasi Kebijakan Responsif dan Antisipatif Isu-Isu Aktual Pembangunan Pertanian		333.420.000,00	100,00	333.167.959,00	99,92

Tabel 19. Target dan realisasi anggaran kegiatan pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian	4.172.798.000	4.155.077.694	99,58
EBA.994	Layanan Perkantoran PSEKP	11.256.570.000	9.399.780.136	83,50
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal PSEKP	647.500.000	614.496.440	94,80

Sumber: Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara PSEKP (2024)

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2024 hanya diperoleh dari penerimaan umum yakni **Rp12.595.096,00** sedangkan PNBP dari penerimaan fungsional tidak ada (Tabel 20). Hal ini disebabkan keluaran kegiatan analisis PSEKP tidak bersifat teknis, namun berupa rekomendasi kebijakan yang bersifat *intangible* dan ditujukan bagi *stakeholder*/pemangku kepentingan utama, yakni pimpinan Kementerian Pertanian. Selain itu, aset PSEKP yang dapat menjadi sumber penerimaan PNBP juga terbatas. Dalam hal akuntabilitas keuangan, LAKIN ini baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini karena adanya kendala sampai saat ini sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Tabel 20. Capaian PNBP Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024

KODE MAK	URAIAN MAK	PERKIRAAN TARGET PENERIMAAN (Rp.)	PENERIMAAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SISA TARGET PENERIMAAN (Rp.)	TARGET %
	Penerimaan Umum					
425131	Pendapatan Sewa Tanah. Gedung dan Bangunan	8.836.000	3.523.152		-	
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	8.723.500		-	
425911	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	-	348.444		-	
	Jumlah Penerimaan Umum	**8.836.000**	**12.595.096**		**-**	
	Penerimaan Fungsional					
	Pendapatan Jasa Tenaga. Pekerjaan. Informasi. Pelatihan. Teknologi. Pendapatan BPN. Pendapatan DJBC	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Fungsional	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Umum + Fungsional	**8.836.000**	**12.595.096**			

Sumber: Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara PSEKP (2024)

E. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Nilai kinerja anggaran PSEKP secara keseluruhan pada tahun 2024 sebesar 84,95 sehingga termasuk dalam kategori BAIK; dengan rincian untuk nilai kinerja perencanaan anggaran mencapai 74,50 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran mencapai 95,39. Capaian kinerja anggaran PSEKP dapat dilihat pada web monev anggaran Kementeri Keuangan (https://monev.kemenkeu.go.id/)



Gambar 3. Nilai Kinerja Anggaran PSEKP 2024

Capaian kinerja anggaran PSEKP pada tahun 2024 secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase capaian kinerja anggaran dalam hal penyerapan anggaran adalah 69,33%, menurun dibanding tahun 2023 dengan nilai 93,77% disebabkan adanya refocusing dan *Automatic Adjustment* (AA).
2. Persentase efektivitasi Capaian RO (CRO) tahun 2024 adalah 99,07%, menurun dibanding tahun 2023 yang mencapai 100%.
3. Persentase capaian kinerja anggaran dalam hal efisiensi berdasarkan perhitungan manual adalah 30,60%. Perhitungan manual dilakukan karena belum ada nilai efisiensi dari aplikasi monev anggaran Kementerian Keuangan. Sehingga diperoleh nilai efisiensi anggaran sebesar 126,50%.

Dalam hal ini penggunaan sumber daya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya adalah penggunaan sumber daya anggaran. Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumber daya anggaran berdasarkan PMK 22/2021 maka dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan sebagaimana berikut:

NE = 50% + (E/20 x 50)

Dimana:

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Persentase capaian kinerja PSEKP tahun 2024 dalam hal efisiensi adalah mencapai 20%. Maka penghitungan koefisien Nilai Efisiensinya adalah:

NE = 50% + (30,60%/20 x 50)

NE = 0,5 + (0,0153 x 50)

NE = 0,5 + 0,765

NE = 1,265 atau 126,5%

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumber daya anggaran PSEKP pada tahun 2024 adalah 126,5%.

F. Capaian Kinerja Publikasi dan Diseminasi

Kegiatan layanan publikasi yang dilakukan PSEKP secara rutin dan berkala adalah menerbitkan Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) secara OJS dan tercetak sebanyak dua nomor per tahun, serta Newsletter yangnterbit tiga nomor per tahun. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) merupakan media jurnal ilmiah yang membahas isu-isu aktual pembangunan pertanian dan artikel-artikel tentang analisis kebijakan pertanian responsif dan antisipatif regional dan nasional.

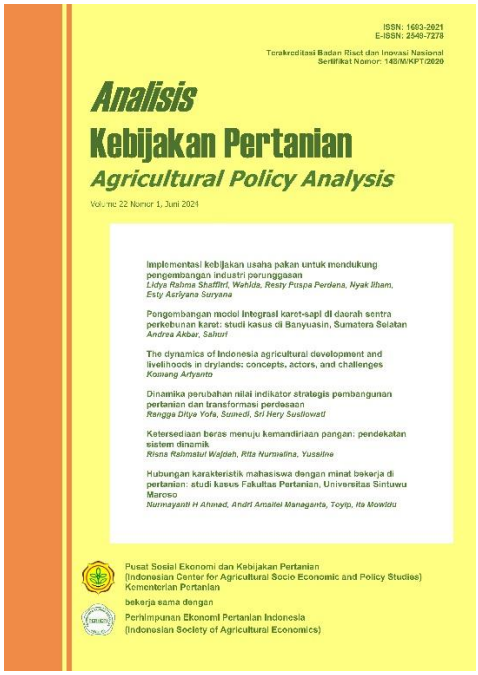
Tabel 21. Pengelolaan artikel di Jurnal AKP berdasarkan Open Journal System, 2024

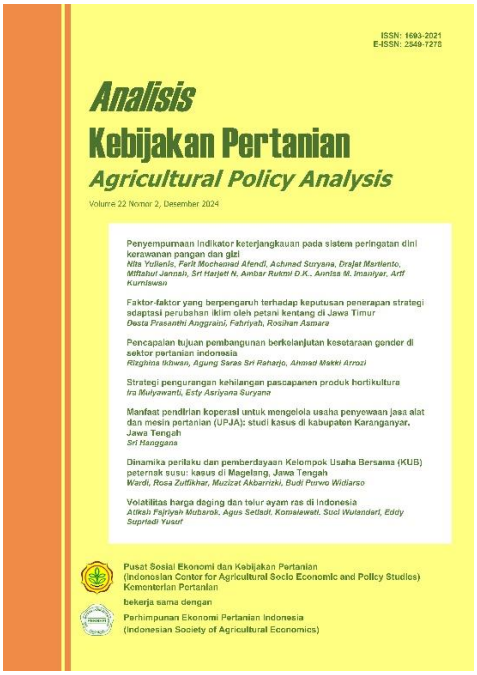
Trends	**Akumulasi jumlah artikel sejak OJS aktif**
Submissions Received	311
Submissions Accepted	41
Submissions Declined	163
Submissions Declined (Desk Reject)	157
Submissions Declined (After Review)	6
Submissions Published	111
Other Submissions	238

Sebagaimana diilustrasikan pada Tabel 21, total naskah yang masuk selama OJS aktif mencapai 311 artikel. Dari sejumlah artikel tersebut, terdapat 41 artikel yang diterima untuk diproses lebih lanjut untuk diterbitkan dan 11 artikel sudah diterbitkan pada Volume 22 Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2024. Artikel yang ditolak dengan pertimbangan ketidaksesuaian dengan ruang lingkup AKP dan penulis yang tidak melakukan perbaikan sesuai penilaian reviewer. Rincian judul dan penulis artikel yang diterbitkan pada Jurnal AKP Volume 22 Nomor 1 dan Nomor 2 disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22. Rincian judul artikel jurnal AKP Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2024

No.	Judul Artikel	Penulis
Volume 22 Nomor 1		
1.	Pengembangan Model Integrasi Karet-Sapi Di Daerah Sentra Perkebunan Karet	Andrea Akbar, Sahuri
2.	Transformasi Perdesaan: Implikasinya Terhadap Penguasaan Lahan, Pendapatan Rumah Tangga, Dan Produksi Pertanian	Rangga Ditya Yofa; Sumedi, Sri Hery Susilowati
3.	Kebijakan Industri Pakan Mendorong Daya Saing Industri Ayam Broiler Di Indonesia	Lidya Rahma Shaffitri, Wahida, Resty Puspa Perdana, Nyak Ilham, Esty Asriyana Suryana
4.	Faktor Yang Memengaruhi Minat Mahasiswa Bekerja Di Pertanian: Studi Kasus Fakultas Pertanian, Universitas Sintuwu Maroso	Nurmayanti H Ahmad, Andri Amaliel Managanta, Toyip, Ita Mowidu
Volume 22 Nomor 2		
1.	Volatilitas Harga Daging dan Telur Ayam Ras di Indonesia	Atikah F Mubarok, Agus Setiadi, Komalawati, Suci Wulandari, Eddy Supriyadi Yusuf
2.	Dinamika Perilaku dan Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peternak Susu: Kasus di Magelang, Jawa Tengah	Rosa Zulfikhar, Wardi, Muzizat Akbarrizki ,Budi Purwo Widiarso
3.	Manfaat Pendirian Koperasi untuk Mengelola Usaha Penyewaan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA): Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah	Sri Hanggana
4.	Penyempurnaan Indikator Keterjangkauan pada Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi	Nita Yulianis, Farit M. Afendi, Achmad Suryana3, Drajat Martianto4, Miftahul Jannah, Sri Harjanti N, Ambar Rukmi D.K, Annisa M. Imaniyar, Arif Kurniawan
5.	Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Penerapan Strategi Adaptasi Perubahan Iklim oleh Petani Kentang di Jawa Timur	Desta Prasanthi Anggraini, Fahriyah, Rosihan Asmara
6.	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kesetaraan Gender di Sektor Pertanian Indonesia	Rizghina Ikhwan, Agung Saras Sri Raharjo, Ahmad Makky Arrozi
7.	Strategi Pengurangan Kehilangan Pascapanen Produk Hortikultura	Ira Mulyawanti, Esty Asriyana Suryana





Volume 22 Nomor 1 Volume 22 Nomor 2

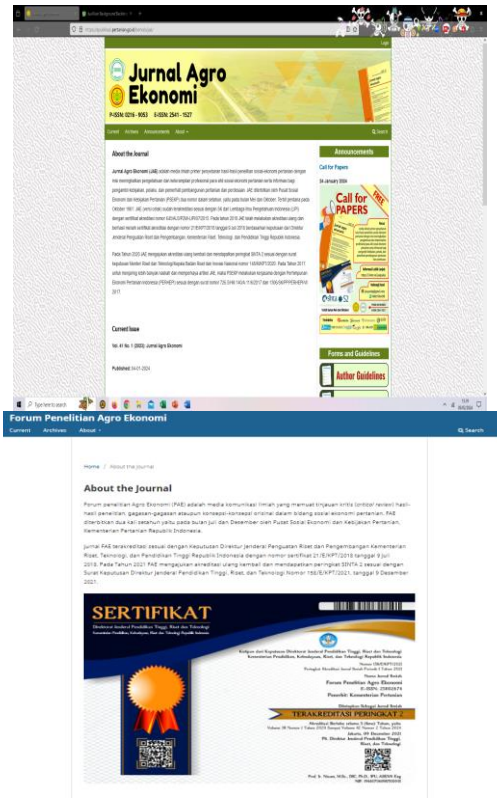
Gambar 4. Publikasi Jurnal Analis Kebijakan Pertanian (AKP), 2024

Sejalan dengan transformasi kelembagaan penelitian ke Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), PSEKP tidak dapat melanjutkan pengelolaan dua jurnal ilmiah yang selama ini menjadi media publikasi hasil-hasil penelitian bidang sosial ekonomi pertanian. Pengelolaan Jurnal Agro Ekonomi (JAE) dan Forum Agro Ekonomi (FAE) telah dialihkan kepada asosiasi profesi Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) dan sudah dilanjutkan dengan pembuatan domain baru yang disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Domain Baru JAE dan FAE, 2024

Detail Info	Jurnal Agro Ekonomi (JAE)	Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE)
P- ISSN	0216-9053	0216-4361
E- ISSN	2541-1527	2580-2674
Alamat lama	http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jae	http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae
Alamat baru	https://jae.perhepi.org	https://fae.perhepi.org
Email	Perhepi.adm@gmail.com	Perhepi.adm@gmail.com

Penyerahan secara simbolis Jurnal Agro Ekonomi (JAE) dan Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE) oleh Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Kementerian Pertanian, Dr. Sudi Mardianto kepada Ketua Umum PERHEPI, Prof. Dr. Bustanul Arifin telah dilakukan pada peringatan Ulang Tahun Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) ke-55 yang diselenggarakan pada Rabu, 28 Februari 2024 di Bulog Corporate University Jakarta. Proses pengelolaan naskah jurnal selanjutnya sudah sepenuhnya melalui OJS. Kedua jurnal tersebut dapat diakses melalui website dengan tampilan Gambar 5.



Gambar 5. Tampilan OJS Jurnal Agro Ekonomi (JAE) dan publikasi lain

Publikasi lain dilakukan dalam Newsletter Agrosocioeconomics yang diterbitkan tiga kali dalam setahun. Newsletter ini menyediakan informasi terkini perkembangan kebijakan pembangunan pertanian dalam dan luar negeri termasuk kebijakan perlindungan petani. Pada bulan Oktober telah diterbitkan Newsletter Agrosocioeconomics Volume 17 Nomor 1 dengan topik seputar perkembangan harga pangan dunia dan dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional, inisiasi pemimpin ASEAN dalam penguatan keamanan pangan dan kebijakan subsidi pupuk sebagai salah satu kebijakan nasional yang dapat menjadi referensi bagi peneliti, pengambil kebijakan dan praktisi yang terkait (Gambar 6)



Vol. 17 No. 1, April 2024 ISSN: 1978 – 2063

Agro-Socioeconomic Newsletter

Indonesian Center for Agricultural Socio Economic and Policy Studies (ICASEPS)

Editorial

Dear Readers,

Hello there! Warm greetings to you.

Entering this new year, our Newsletter presents some important references and interesting news. We start by providing the latest information on farmer protection policies, then continue with policy development related to the spike in world rice prices. Information on strengthening food security initiated by ASEAN Leaders is also interesting to read. We close by choosing the topic of fertilizer subsidies as one of the national policy issues that can be your reference.

We always try our best in selecting news and information for you. Along with a number of titles published in our journal, some information about international conference and meetings is also prepared for you.

Thank you and have a nice day.

The Editor

CONTENT

Farmers Protection Policy and Government Assistance for Increasing Agricultural Production	1
ASEAN Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Time of Crises	3
Global Rice Price Surge and Potential Impact on Indonesia	3
Considering the Implementation of Direct Fertilizer Assistance	3
Publications	7
International Conference and Final Project Review of the IndoTransform Project	7
Transfer of Management of the ICASEPS Journal	7
MIKTA Round Table Discussion "Data-Driven Policy for Better Food Security and Nutrition – Experience in Digital Transformation"	8
AARES 68th Side Events: Falling Short or Forging Ahead? Assessing Economics and Policy Research to Address Escalating Agricultural and Food System Challenges	8

Policy Update

FARMERS PROTECTION POLICY AND GOVERNMENT ASSISTANCE FOR INCREASING AGRICULTURAL PRODUCTION

Adi Setiyanto, Amalia Ulpah, Agung S.S. Rahardjo, Lidya R. Syafitri, Hari Hermawan, Abdul Basit, Fitria Yuliani

Introduction

The Republic of Indonesia Law Number 19 of 2013 requires the protection and empowerment of farmers through funding from various sources such as APBN, APBD, and other financing institutions. This funding aims to improve farmers' agricultural businesses and enhance their welfare. The government hopes this assistance can increase the harvest area and productivity of the livestock population, leading to increased production. However, the success of such programs depends on the accuracy of targets and the effectiveness of policies. Therefore, it is crucial to study farmer and government protection policies to increase agricultural production. The results of this study will be helpful as input for future agricultural development planning and policy-making. The study aims to (1) identify existing conditions for government assistance in protecting farmers while increasing production, (2) analyze the effectiveness and impact of the government in protecting farmers and increasing production, and (3) formulate alternative policy recommendations to increase the effectiveness of government assistance to small-scale farmers.

Methodology

The distribution of government aid budgets for 2018–2021 remained relatively consistent for rice but varied for other commodities. During this period, 446 districts/cities received government assistance for rice every year. In contrast, the number of districts/cities receiving government assistance for corn varied yearly, with 176, 105, 101, and 220 districts/cities benefiting. Similarly, the number of districts/cities receiving government assistance for soybeans was 143, 233, 84, and 154; for shallots was 179, 218, 130, and 171; for chillies was 258, 277, 163, and 196; for sugar cane was 30, 50, 17, and 10; and for cattle was 22, 50, 228, and 168.

The study utilized both primary and secondary data. The secondary data was gathered from various sources at the central level, including information on planting and harvest areas, livestock population, productivity, production, and government aid budgets (APBN), especially from the Ministry of Agriculture.

Agriculture. As a result, ICASEPS has stopped conducting research activities and is now focusing on policy analysis to develop policy recommendations for agricultural development. These new duties and functions of ICASEPS have implications for the management of JAE and FAE journals.

To maintain the sustainability of the JAE and FAE journals, ICASEPS has requested the Indonesian Association of Agricultural Economics (ISAE or PERHEPI) to take over the management of the two journals. ISAE is recognized as a highly esteemed association in the field of agricultural economics. The ISAE management accepted the proposal from ICASEPS, and ISAE will continue to manage the JAE and FAE journals. Coinciding with ISAE's 55th anniversary in February 2024 in Jakarta, ISAE officially launched the transfer of management of the JAE and FAE Journals from ICASEPS to ISAE. Bravo ISAE!

MIKTA ROUND TABLE DISCUSSION "DATA-DRIVEN POLICY FOR BETTER FOOD SECURITY AND NUTRITION – EXPERIENCE IN DIGITAL TRANSFORMATION"

During its 2023 MIKTA chairmanship, Indonesia highlighted the issue of digital transformation and its role in supporting data-driven policy for better food security and nutrition. In collaboration with MIKTA members, Indonesia organized a side event on the FAO - Committee on Food Security (FAO-CFS) 51 Meeting held in Rome on October 26, 2023. Speakers from Australia, Indonesia, Mexico, the Republic of Korea, Türkiye, and a Representative from the Global Partnership for Sustainable Development Data shared the implementation of data-driven policy.

ICASEPS participated in this important event; Dr. Wahida from ICASEPS used this forum to share Indonesia's experience in monitoring domestic food inflation using the Food Prognosis Table. Under a High-Level Coordinating Meeting on Food Availability, on a regular basis, representatives from line ministries update the "Food Prognosis Table" to determine the deficit or surplus level of 12 strategic commodities. Those commodities may contribute to the inflation: rice, maize, soybean, broiler meat, beef, eggs, shallots, red chilies, bird-eye chilies, sugar, garlic, and cooking oil.

Under this policy dialogue, Indonesia shared the complexity of data management that is to be used as the basis of monitoring.

The food prognosis table is confirmed by food price data, which consolidates the data from three institutions: BPS-Statistics Indonesia, the Central Bank, and the National Food Agency. Under the complexity, Indonesia has used the food prognosis table as the primary source to determine food availability and provide an early warning system for food inflation. It also emphasized the importance of digital transformation in data collection to improve data quality for food prognosis tables and prevent data inaccuracy. All the speakers agreed that digital transformation will create significant benefits if supported by a strong collaboration between stakeholders and investment in data support infrastructures. Nevertheless, data literacy is a must before conducting any digital transformation.

AARES 68TH SIDE EVENTS: FALLING SHORT OR FORGING AHEAD? ASSESSING ECONOMICS AND POLICY RESEARCH TO ADDRESS ESCALATING AGRICULTURAL AND FOOD SYSTEM CHALLENGES

In the dynamic Asia-Pacific region, where agricultural development is fundamental to economic growth and food security, a pressing question emerges: Are economics and policy research keeping pace with the growing challenges facing agricultural and food systems? This thought-provoking panel session aims to critically evaluate the effectiveness of economics and policy research and capacity building in addressing the increasingly intricate challenges facing agricultural development in the Asia-Pacific. This is one of the topics discussed during the side events of the 68th AARES held in Canberra, Australia, on February 8, 2024.

Sponsored by the Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR), distinguished keynote speakers ACIAR CEO Professor Wendy Umberger, Dr. Wahida from the Indonesian Centre for Agricultural Socio-Economic and Policy Studies, Professor Silinthone Sackbirkham from the Ministry of Education and Sports and the National University of Laos, and Professor Prabhu Pingali from Cornell University's Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management shared their insights on the topic mentioned above. As a representative from Indonesia, Wahida delivered a presentation titled "Failing Short or Forging Ahead? The Impact of Research Management Transformation in Addressing the Escalating Agricultural and Food System Challenges in Indonesia".

Publication Adviser: Director of ICASEPS | **Chief Editor:** Sahat M. Pasaribu | **Editors:** Erma Suryani, Bambang Sayaka, Wahida Maghraby, Ening Ariningsih, Lina Mailena | **Lay-out and Production:** Ibnu Salman | **Publication and Distribution:** Frilla Ariani, Rina Cantayani

Correspondence Address: ICASEPS, Jalan Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111, Indonesia,
Ph. +62-251-8333964, Fax. +62-251-8314496
E-mail: publikasi_psekp@yahoo.co.id, Website: http://psekp.setjen.pertanian.go.id/web/

Gambar 6. Agrosocioeconomics Newsletter PSEKP Vol. 17 Nomor 1, tahun 2024



Vol. 17 No. 2, August 2024 ISSN: 1978 – 2063

Agro-Socioeconomic Newsletter

Indonesian Center for Agricultural Socio Economic and Policy Studies (ICASEPS)

Editorial

Dear valuable readers,

Based on our experience, the impact of El Niño on the agricultural sector is important to understand in order to anticipate the negative impacts caused by this natural phenomenon. An analysis of this is outlined in this newsletter along with the history of Indonesian's agricultural resilience achievements over more than fifty years. In addition, information about the role of the agricultural sector in the Golden Indonesia era and the importance of agricultural finance is selected among the current policy issues for your reference.

As usual, we also include other information related to the development of policies and several activities of ICASEPS as an institution that prepares policy recommendations in the field of agricultural economics. We hope you enjoy reading this newsletter as we try our best to provide various important information for your satisfaction.

Thank you and wish you a wonderful day.

The Editor

CONTENT

Anticipating El-Nino Impacts on Indonesia's Agricultural Production	1
The History of Indonesia's Achievement on Food Resilience: 1966-2021	3
The Role of the Agricultural Sector dowrards Golden Indonesia 2045	4
The Importance of Inclusive Agricultural Financing	4
Investigating the Causes of Fluctuations in Fresh Fruit Bunch Prices of Oil Palm	5
Publications	6
Memorandum of Understanding (MoU) Signing Between Ministry of Agriculture with the Australian Center for International Agricultural Research	6
2nd International Conference on Agriculture, Natural Resources, and Rural Development Proceedings	6
Assistance in Implementing Pump Irrigation for Increasing Rice Production	7
Focus Group Discussion on Accelerating People's Palm Oil Rejuvenation Program in Nanggroe Aceh Darussalam	7
Focus Group Discussion and Policy Advocacy for Accelerating People's Palm Oil Rejuvenation Program Implementation in West Sumatra	8
Workshop on Policy Quality Improvement toward Bureaucratic Reform of the Ministry of Agriculture	8

Policy Update

ANTICIPATING THE IMPACTS OF EL NIÑO ON INDONESIA'S AGRICULTURAL PRODUCTION

Adi Setiyanto, Miftahul Azis, Mohammad W. Effendi, Joko Mulyono, Resty F. Perdana, and Annisa F. Astari

Introduction

One of the main impacts of El Niño on food crop commodity production is extreme drought. Rising temperatures and diminished rainfall can drastically reduce water availability for irrigation, leading to widespread drought. This arid condition subjects food plants to water stress, reducing the efficacy of fertilizers and hindering their growth. Consequently, the productivity of strategic crops such as rice, corn, and soybean can decrease significantly. Apart from drought, El Niño can also trigger erratic and intense rainfall patterns over short periods, as is currently happening in several areas. This can result in devastating floods and landslides that damage crops and agricultural land.

In addition, extreme temperature changes caused by El Niño can affect the availability of pollinating insects, which are important for plant reproduction. Some types of pollinating insects rely on specific temperature ranges for optimal activity. When temperatures become too high or too low, their populations may decline, leading to reduced pollination and subsequent crop seed production. The impact of El Niño on food crop production can extend beyond regional borders. Unstable food supplies in El Niño affected areas can trigger fluctuations in global food prices. Countries heavily reliant on food imports may also be affected by increased prices and potential shortages of these commodities.

It is urgent to analyze El Niño's impact on food crop production to anticipate and reduce potential losses. Efforts to maintain food security, efficiently manage water resources, and employ climate-adaptive technologies can help mitigate the negative impact of El Niño on food crop production.

Important Facts

El Niño is predicted to occur from early June 2023 to mid-2024. This event will affect the production of strategic commodities such as rice, corn, and soybeans. Regarding rice, particular attention should be paid to the following factors:

a) Historically, June to September is a period of low rice production due to declining harvest areas post-main harvest and low productivity levels. This period, particularly in late 2023 and early 2024, is very critical as standard production patterns are already low (historically a deficit

Aceh Regional Office of the National Land Agency (BPN) underscored the importance of digital mapping for managing palm oil plantations effectively.

Farmers' Perspective and Future Steps

Mr. Fadhli Ali from APKASINDO shared the farmers' viewpoint, addressing land management, seed distribution, and the discrepancy between official palm oil prices and the prices received by farmers.

The discussions and presentations resulted in several conclusions and recommendations. These include the necessity for improved inter-agency coordination, enhanced farmer understanding of the PSR program, and stronger partnerships between the government, companies, and farmers.

Commitment to Collaborative Efforts

In their closing statements, Dr. Sumedi, Dr. Adi Setiyanto, and the Secretary of the Aceh Provincial Agriculture and Plantations Office emphasized the importance of bolstering partnerships, developing the Cultivation Registration Certificate (STDB), and securing land titles to enhance the success of the PSR in Aceh. They also highlighted the critical need to resolve land tenure issues for smallholder palm oil farmers. All stakeholders concurred that cooperation and collective commitment are essential to overcome challenges and improve the efficiency of the PSR program in Aceh Province.

FOCUS GROUP DISCUSSION AND POLICY ADVOCACY FOR ACCELERATING PEOPLE'S PALM OIL REJUVENATION PROGRAM IMPLEMENTATION IN WEST SUMATRA

On June 12, 2024, in Padang, West Sumatera Province, ICASEPS' policy analysis team conducted a focus group discussion and policy advocacy session. The event, themed "Accelerating Smallholder Palm Oil Replanting (PSR) Program to Improve Cost Efficiency and Competitiveness," brought together key stakeholders in West Sumatra Province to discuss the implementation of the PSR Program in West Sumatra. The event brought together a diverse group of stakeholders, including speakers from the Plantation, Food Crops, and Horticulture Office, Forestry Office, ATR/BPN Regional Office, Indonesian Palm Oil Association (GAPKI), and Indonesian Palm Oil Farmers Association (APKASINDO) of West Sumatra Province. Participants included officials from relevant provincial agencies, academics from local universities, representatives from GAPKI and APKASINDO, and palm oil industry practitioners.

Several key issues were highlighted in the discussion, including (a) challenges faced by seed breeders in preparing seedlings according to farmers' needs, (b) land legality and verification process, (c) land certification, and (d) reluctance of palm oil entrepreneurs to join GAPKI. Participants provided valuable insights and feedback to enhance the ICASEPS study. These included the importance of providing superior seedlings, the need to identify obstacles in land requirements for the PSR program, mitigating environmental impacts of palm oil cultivation, and the need for better regulations to preserve forests and the environment.

WORKSHOP ON POLICY QUALITY IMPROVEMENT TOWARD BUREAUCRATIC REFORM OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE

To support the successful implementation of National Bureaucratic Reform, as outlined in the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No. 3/2023, ICASEPS, in collaboration with the Legal Bureau of the Ministry of Agriculture, organized a Workshop on Policy Quality Improvement toward Bureaucratic Reform of the Ministry of Agriculture. The workshop was held on Friday, June 21, 2024, at Dr. Ismunadji Auditorium of ICASEPS.

The Director of ICASEPS emphasized that this workshop serves both short-term and long-term objectives. In the short term, the workshop aims to prepare a self-assessment of the legal products developed by the Ministry of Agriculture. For the long term, it seeks to enhance understanding of the regulatory formulation process, including the steps that should be followed and the important aspects of regulation formulation.

The representatives of the Legal Bureau of the Ministry of Agriculture emphasized the importance of the Policy Quality Index (IKK) measurement conducted by State Administration Institute (LAN) in their speech. This workshop was held to improve (scale up) the (IKK) value obtained. The IKK assessment includes the process of formulating a policy and measuring its implications.

This hybrid workshop aimed to enhance participants' understanding of the IKK measurement process and policy drafting techniques. The agenda included socialization of the IKK measurement, lessons learned from the process of drafting the Minister of Agriculture Regulation, policy drafting techniques, and mapping of existing regulations. By the end of this workshop, participants from various Ministry of Agriculture institutions were expected to gain a comprehensive understanding of the process of drafting policy papers and be able to improve the following Ministry of Agriculture's Policy Quality Index.

Publication Adviser: Director of ICASEPS | **Chief Editor:** Sahat M. Pasaribu | **Editors:** Erma Suryani, Bambang Sayaka, Wahida Maghraby, Ening Ariningsih, Lina Mailena | **Lay-out and Production:** Ibnu Salman | **Publication and Distribution:** Frilla Ariani, Rina Cantayani

Correspondence Address: ICASEPS, Jalan Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111, Indonesia,
Ph. +62-251-8333964, Fax. +62-251-8314496
E-mail: publikasi_psekp@yahoo.co.id, Website: http://psekp.setjen.pertanian.go.id/web/

Gambar 7. Agrosocioeconomics Newsletter PSEKP Vol. 17 Nomor 2, tahun 2024

Selanjutnya, bulan Desember sedang disusun Newsletter Agrosocioeconomics volume 3 tahun 2024 dengan mengemukakan topik seputar:

1.	Policy Update	:	Kinerja Penyuluhan Pertanian
2.	Policy Development	:	a. Menata Kembali Sistem Perbenihan Padi b. Membangun Sistem Perbenihan Hortikultura
3.	Policy Issues	:	a. Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Pertanian b. Penyusunan blue print
4.	ICASEPS News	:	a. Monitoring Pengukuran Indek Kualitas Kebijakan (IKK) b. Stakeholders Meeting PSR c. Panen Bersama di Kab Purbalingga (PAT)

G. Rencana Aksi Tahun 2025

Pencapaian kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari upaya dan komitmen yang dilakukan berpedoman dari hasil evaluasi kinerja tahun 2023, untuk itu guna memperbaiki kinerja tahun 2024 maka diperlukan upaya perbaikan dari permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan kinerja tahun 2025. Rekomendasi perbaikan disusun agar permasalahan yang sama tidak terjadi pada tahun yang akan datang. Rekomendasi ini digambarkan dalam bentuk rencana aksi seperti disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24. Rencana aksi perbaikan kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2025

IKSK 1. Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan (93,25%)

KODE	IKSS/IKSP/RENCANA AKSI	PAGU	TARGET	SATUAN	TARGET PROGRESS(%)			
					TW1	TW2	TW3	TW4
IKSK.01	**Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi yang dihasilkan (%)**	**7.947.861.000**	**93.25**	**%**	**13.6**	**50.0**	**75.0**	**100**
4576.ABR.001.101.A	Penjaringan isu dan penentuan prioritas kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	396.000.000	1	dokumen	25	50	75	100
4576.ABR.001.101.B	Dinamika capaian kebijakan dan dinamika pembangunan pertanian dan perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)	2.100.000.000	1	rekomendasi kebijakan	10	50	75	100
4576.ABR.001.101.C	Evaluasi Peningkatan Produksi Padi melalui Peningkatan Areal Tanam Padi dalam Upaya Mencapai Swasembada	450.000.000	1	rekomendasi kebijakan	10	50	75	100
4576.ABR.001.101.D	Strategi Pengembangan Pangan Lokal Mendukung Program Makan Bergizi	350.000.000	1	rekomendasi kebijakan	10	50	75	100
4576.ABR.001.101.E	Strategi pencapaian program pengembangan biodiesel B-50, pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor	350.000.000	1	rekomendasi kebijakan	10	50	75	100
4576.ABR.001.101.F	Strategi peningkatan produksi susu sapi dalam negeri mendukung pemenuhan kebutuhan program minum susu	299.964.000	1	rekomendasi kebijakan	10	50	75	100
4576.ABR.001.101.G	Strategi Optimalisasi Potensi Peningkatan Produksi Pangan Pada Lahan Sub Optimal	350.000.000	1	rekomendasi kebijakan	10	50	75	100
4576.ABR.001.101.H	Rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian	840.000.000	14	rekomendasi kebijakan	25	50	75	100
4576.ABR.001.101.I	Komunikasi dan advokasi kebijakan sosial ekonomi	766.326.000	1	dokumen	10	50	75	100
4576.ABR.001.101.L	Pendampingan pemanfaatan rekomendasi dan kebijakan strategis Kementerian Pertanian	708.075.000	1	dokumen	10	50	75	100
4576.AEA.111.111.A	Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Analisis Sosek dan Kebijakan Pertanian	750.008.000	1	dokumen	10	50	75	100
4576.AEA.111.111.B	Koordinasi dan Penjalinan Kerjasama dengan Mitra	247.488.000	1	dokumen	10	50	75	100
4576.EBD.952.111.A	Perencanaan dan Program PSEKP	100.000.000	4	dokumen	15	50	75	100
4576.EBD.953.111.A	Pemantauan dan Evaluasi PSEKP	240.000.000	1	dokumen	25	50	75	100

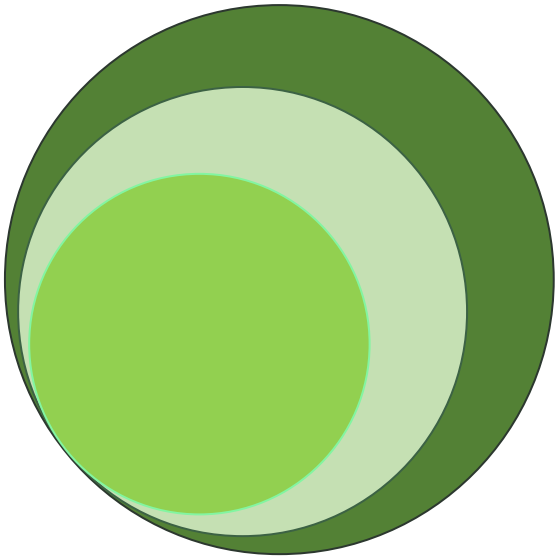
IKSK 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (3,0 Skala Likert)

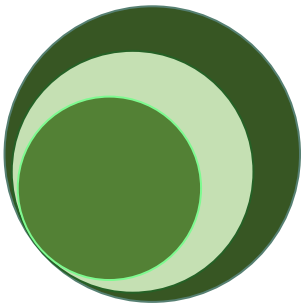
KODE	IKSS/IKSP/RENCANA AKSI	PAGU	TARGET	SATUAN	TARGET PROGRESS(%)			
					TW1	TW2	TW3	TW4
IKSK.01	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian**	**16.674.833.000**	**3,00**	**Skala Likert**				
1749.EBC.954.111.A	Pengelolaan Kepegawaian	187.600.000	1	Layanan	25	50	75	100
4576.ABR.001.101.J	Dokumentasi dan publikasi hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	587.130.000	1	dokumen	10	50	75	100
4576.ABR.001.101.K	Manajemen data dan informasi kebijakan pembangunan pertanian	265.880.000	1	dokumen	10	50	75	100
4576.EBA.956.111.A	Pengelolaan BMN	10.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
4576.EBA.962.112.A	Layanan Rumah Tangga Kantor	393.859.000	1	Layanan	25	50	75	100
4576.EBA.962.112.B	Pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM serta Kesekretariatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	508.228.000	1	Layanan	25	50	75	100
4576.EBA.962.112.C	Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi	264.610.000	1	dokumen	15	50	75	100
4576.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	8.036.876.000	1	layanan	25	50	75	100
4576.EBA.994.002.A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	2.161.140.000	12	bulan	25	50	75	100
4576.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	508.800.000	12	bulan	25	50	75	100
4576.EBA.994.002.C	Honor Operasional Kantor	88.160.000	12	bulan	25	50	75	100
4576.EBA.994.002.D	Belanja Barang Operasional	184.318.000	12	bulan	25	50	75	100
4576.EBA.994.002.F	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	503.864.000	223	unit	25	50	75	100
4576.EBA.994.002.G	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	553.718.000	7282	m2	25	50	75	100
4576.EBB.951.112.A	Pengadaan Alat Pengolah Data	744.000.000	72	unit	5	20	75	100
4576.EBB.951.112.B	Pengadaan Alat Komunikasi	810.000.000	7	unit	5	20	75	100
4576.EBB.951.112.C	Pengadaan Fasilitas Kantor	259.400.000	78	unit	5	20	75	100
4576.EBB.971.111.A	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	518.250.000	290	m2	5	20	75	100
4576.EBD.953.111.B	Sistem Pengendalian Internal	30.000.000	1	dokumen	10	50	75	100
4576.EBD.955.112.A	Pengelolaan Keuangan PSEKP	19.000.000	1	dokumen	25	50	75	100
4576.EBD.974.112.A	Pelaksanaan Kegiatan Kearsipan	40.000.000	1	dokumen	25	50	75	100

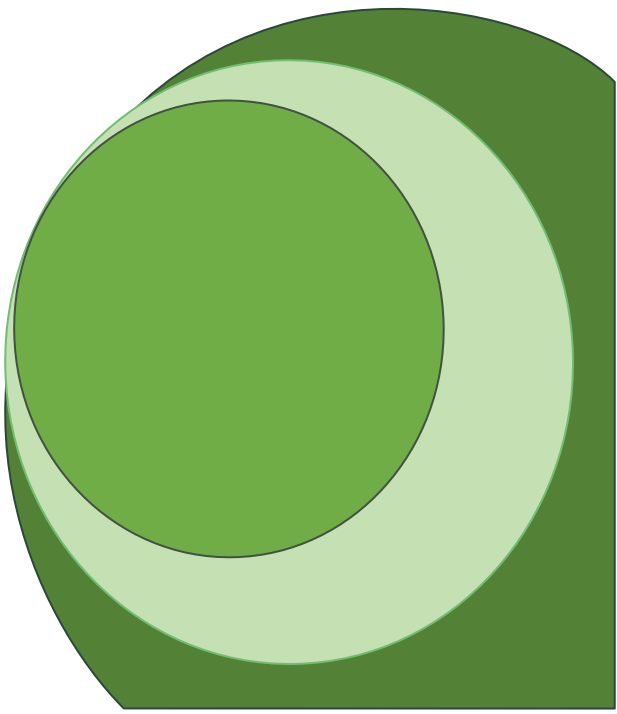
BAB IV
PENUTUP

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian telah menetapkan satu sasaran kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Adapun sasaran kegiatan tersebut adalah meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan setelah mengalami revisi menjadi empat, yaitu: 1) rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan; 2) tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian; 3) persentase capaian nilai reformasi birokrasi yang menjadi tanggungjawab PSEKP; dan 4) nilai IKPA satker PSEKP.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja PSEKP Tahun 2024, keempat indikator berhasil melampaui target. Keberhasilan capaian kinerja ini merupakan hasil dukungan dari sumber daya yang dimiliki oleh PSEKP berupa Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan anggaran. Pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya kerja keras semua pihak, baik unsur manajemen, fungsional analis kebijakan dan fungsional lainnya, yang secara bersama-sama dengan semangat "*Can Do Spirit*" bekerja bersama untuk mewujudkan pencapaian kinerja lembaga. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja iklas kedepan perlu terus dijaga dan dikembangkan untuk pencapaian output yang lebih baik lagi.







LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA TA. 2024

Perjanjian Kinerja PSEKP TA 2024 (awal)



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU
JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR
TELPON 0251- 8333964, 8325177, 8338717,FACSIMILE. 0251-8314496
Website : http://pse.litbang.pertanian.go.id Email : pse@litbang.pertanian.go.id

mutu certification International
SNI ISO 9001: 2015 Certificate # MCI-QMS/210

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Prihasto Setyanto
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 22 Desember 2023

Pihak Kedua

Prihasto Setyanto

Pihak Pertama

Sudi Mardianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	93.00 %
		1-2	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.25 Skala Likert

KEGIATAN		ANGGARAN
Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum	Rp.	19.915.060.000

Bogor, 22 Desember 2023

Pihak Kedua

Prihasto Setyanto

Pihak Pertama

Sudi Mardianto

Perjanjian Kinerja Revisi Anggaran – Penambahan Anggaran (revisi 1)



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
Jalan Tentara Pelajar Nomor 3 B Cimanggu Bogor 16111
Telpon 0251- 8333964, 8338717,facsimile. 0251-8314496
Website : https://psekp.setjen.pertanian.go.id Email : psekp@pertanian.go.id

mutu certification International
SNI ISO 9001: 2015 Certificate # MCI-QMS/210

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ali Jamil
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 23 Agustus 2024

Pihak Kedua

Ali Jamil

Pihak Pertama

Sudi Mardianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	93.00 %
		1-2	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.25 Skala Likert
		1-3	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab PSEKP	66.08 %
		1-4	Nilai IKPA Satker PSEKP	92.80 %

KEGIATAN		ANGGARAN
Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum	Rp.	20.215.060.000

Bogor, 23 Agustus 2024

Pihak Kedua

Ali Jamil

Pihak Pertama

Sudi Mardianto

Perjanjian Kinerja Revisi Anggaran – Penambahan Anggaran (revisi 2)

KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
Jalan Tentara Pelajar Nomor 3 B Cimanggu Bogor 16111
Telpon 0251- 8333964, 8338717,facsimile. 0251-8314496
Website : https://psekp.setjen.pertanian.go.id Email : psekp@pertanian.go.id

mutu certification international
SNI ISO 9001: 2015 Certificate # MCI-QMS/210

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ali Jamil
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 3 September 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Ali Jamil	Sudi Mardianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	93.00 %
		1-2	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.25 Skala Likert
		1-3	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab PSEKP	66.08 %
		1-4	Nilai IKPA Satker PSEKP	92.80 %

KEGIATAN		ANGGARAN
Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum	Rp.	20.344.060.000

Bogor, 3 September 2024

Pihak Kedua

Ali Jamil

Pihak Pertama

Sudi Mardianto

Perjanjian Kinerja Revisi Anggaran – Penambahan Anggaran (revisi 3)



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
Jalan Tentara Pelajar Nomor 3 B Cimanggu Bogor 16111
Telpon 0251- 8333964, 8338717,facsimile. 0251-8314496
Website : https://psekp.setjen.pertanian.go.id Email : psekp@pertanian.go.id

mutu certification international
SNI ISO 9001: 2015 Certificate # MCI-QMS/210

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ali Jamil
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 11 November 2024

Pihak Kedua

Ali Jamil

Pihak Pertama

Sudi Mardianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	93.00 %
		1-2	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.25 Skala Likert
		1-3	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab PSEKP	66.08 %
		1-4	Nilai IKPA Satker PSEKP	92.80 %

KEGIATAN		ANGGARAN
Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum	Rp.	20.422.166.000

Bogor, 11 November 2024

Pihak Kedua

Ali Jamil

Pihak Pertama

Sudi Mardianto

LAMPIRAN 2

REKOMENDASI PSEKP TA 2020-2024

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Rekomendasi Kebijakan PSEKP Tahun 2020-2024

Tahun 2020 (35 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Pertanian
2. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kinerja dan Manfaat Adopsi Teknologi Tanaman Pangan dan Peternakan Hasil Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
3. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Peningkatan Produksi Pangan Utama Berkelanjutan
4. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pengoptimalan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat Mendukung Peningkatan Produksi Pangan
5. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi dan Kebijakan Peningkatan Ekspor Kelapa dan Lada
6. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Peningkatan Investasi Pertanian
7. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dinamika Sosial Ekonomi Perdesaan (PATANAS): Studi Panel di Berbagai Agroekosistem
8. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Potensi Dampak Omnibus Law Sektor Pertanian terhadap Investasi, Pertumbuhan dan Penyerapan Tenaga Kerja
9. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Sektor Pertanian Indonesia
10. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Penyusunan Masterplan Penanganan Dampak Covid-19 Sektor Pertanian
11. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kondisi Pertanian pada Masa Pandemi Covid-19 (Survei on-line)
12. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Perubahan Konsumsi Pangan Saat Pandemi Covid-19: Implikasinya pada Kebijakan Produksi dan Penyediaan Pangan
13. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Konsep Pembangunan Pertanian di Jawa
14. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
15. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Penanganan Dampak COVID-19 terhadap Ekonomi Pangan
16. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Antisipasi Dampak Covid-19 terhadap Gejolak Pasar Beras Global
17. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pergerakan Harga Pangan Dan Antisipasi Penyediaan Pangan Dari Saat Pandemi Covid-19
18. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Antisipatif untuk Menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pada Saat Pandemi Covid-19
19. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Perspektif Dampak Ruu Cipta Kerja Terhadap Investasi, Ekspor, Dan Kesempatan Kerja Sektor Pertanian
20. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Pelaksanaan Program Asuransi Pertanian Ditengah Pengaruh Wabah Covid-19

21. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Ringkas Aspek Teknis dan Sosek Pupuk Organik Cair
22. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pencapaian Produksi Beras Tahun 2020 Sebagai Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19
23. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Perubahan Konsumsi Pangan Saat Pandemi Covid-19: Impikasinya Pada Kebijakan Produksi Dan Penyediaan Pangan
24. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Diversifikasi Pangan Sebagai Antisipasi Krisis Pangan
25. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Refocusing APBD Untuk Penanganan Covid-19 terhadap Pembangunan Pertanian Daerah
26. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kerangka Kerja Perumusan Inisiatif Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Sektor Pertanian
27. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Normal Baru dan Perlindungan Petani terhadap Pandemi Covid-19
28. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Bulan Mei 2020
29. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Hasil Sementara Survei Kondisi Pertanian pada Masa Pandemi Covid-19
30. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Antisipasi Masuknya Daging Ayam Brasil: Analisis Komparasi Biaya Produksi Broiler Indonesia Dan Brasil
31. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dinamika Pasar Beras Dunia Dan Implikasinya Terhadap Indonesia
32. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Pengembangan Food Estate Berbasis Korporasi Petani
33. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Ivestasi, Promosi Ekspor dan Substitusi Impor Pertanian
34. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Subsidi Pupuk Terhadap Produktivitas Padi Dan Simulasi Pengalihan Subsidi Pupuk Ke Subsidi Output.
35. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Penyesuaian Het Pupuk Terhadap Permintaan Pupuk, Produksi dan Produktivitas Padi, serta Pendapatan Petani

Tahun 2021 (33 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Pengembangan Korporasi Petani mendukung Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah
2. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Pengembangan Rantai Pasok dan Strategi Pemulihan Agribisnis Sayuran dari Dampak Pandemi Covid-19
3. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Akselerasi dan Penetrasi Pasar Pangan Lokal Olahan Mendukung Diversifikasi Pangan
4. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Masyarakat
5. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Peningkatan Ekspor Komoditas Pertanian Unggulan

6. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kemanfaatan BPP sebagai Simpul Pelayanan Pembangunan Pertanian di Tingkat Kecamatan
7. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Monitoring dan Evaluasi Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)
8. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Dampak Subsidi Pupuk terhadap Produktivitas dan Simulasi Pengalihan Subsidi Pupuk ke Subsidi Output
9. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani: Menuju Ketahanan Pangan Berkemandirian dan Berdaya Saing
10. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Menuju Target Tahun 2024
11. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kajian Pengembangan Korporasi Petani Mendukung Food Estate Kalimantan Tengah
12. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Hilirisasi Alsintan Berbasis Potensi Komoditas dan Sumber Daya Spesifik Lokasi Mendukung Pertanian Modern
13. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Pemantapan Swasembada Beras Berkelanjutan
14. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Peningkatan Kandungan Lokal pada Pengembangan Alsintan
15. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Monitoring Kondisi Pertanian Aktual
16. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Pencapaian Swasembada Gula
17. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Sinergi Peran Penyuluh Swasembada dalam Peningkatan Fungsi BPP Mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Pertanian
18. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Hasil Focus Group Disscusion "Membernaskan Strategi Implementasi Kartu Tani!"
19. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Komparasi Biaya Produksi Peternakan Unggas Brasil dan Indonesia
20. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Dinamika Pasar Beras Dunia dan Prospek Ekspor Beras Indonesia
21. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Harga Gabah Maret 2021
22. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Pemikiran Reorganisasi Kementerian Pertanian
23. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Ringkasan Artikel Media Massa Financial Times
24. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kajian Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah
25. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Ekonomi Terkini dan Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 20-21 Januari 2021
26. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Produksi Padi Triwulan I-III 2021

27. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kajian Situasi Pangan Global dan Domestik
28. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Harga Kedelai Domestik dan Dunia
29. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mencermati Pola Produksi dan Produktlvitas Jagung
30. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Peran Koperasi dalam Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
31. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Kebijakan Merespon Penurunan Indeks Ketahanan Pangan Indonesia
32. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Pelepasan Beras CPP Turun Mutu.
33. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Mei 2020.

Tahun 2022 (23 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Penguatan Kelembagaan Usaha Pertanian pada Kawasan Pengembangan *Food Estate* Kalimantan Tengah
2. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Studi Kebijakan Mendorong Efisiensi Produksi dan Rantai Pasok Industri Ayam Ras Pedaging
3. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
4. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Pemasaran Produk Pertanian
5. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Monitoring dan Evaluasi Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)
6. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Prospek Pengembangan Industri Gula di Indonesia
7. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mencermati Nilai Tukar Petani pada Masa Pandemi Covid-19 (2020-2021)
8. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Antisipasi Potensi Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Sektor Pertanian Indonesia
9. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Analisis Biaya Usaha Penangkaran Benih Kelapa Sawit
10. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Memahami Dinamika Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai di Sektor Pertanian
11. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Responsif Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku Menjelang Hari Raya Kurban
12. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mewaspadai Dampak Situasi Pangan Global terhadap Sektor Pertanian Indonesia
13. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Restrukturisasi Industri Kelapa Sawit melalui Implementasi Kebijakan Pembatasan Luas Penguasaan Lahan Perkebunan

14. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Inflasi, Nilai Tukar Petani, dan Upah Buruh Tani
15. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mencermati Perkembangan Harga Pangan Global dan Domestik sebagai Antisipasi menghadapi Ancaman Krisis Pangan
16. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Memahami Hasil Survei Cadangan Beras Nasional
17. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mewaspadai Perkembangan Agribisnis Beras
18. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Pengendalian Impor Komoditas Pangan Utama
19. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkiraan Potensi Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Kinerja Usahatani dan Produksi Komoditas Strategis
20. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Membernaskan Rencana Peningkatan Produksi Kedelai Domestik
21. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Indeks Kelaparan Indonesia dan Upaya Mengatasinya
22. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Waspada Inflasi Pangan Global dan Guliran Dampaknya terhadap Sektor Pertanian dan Pangan Indonesia
23. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Harga Kedelai Domestik dan Dunia

Tahun 2023 (14 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mewaspadai Masa Panen Raya Padi 2023
2. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mewaspadai Musim Tanam Padi Periode April-September 2023 (untuk kalangan terbatas)
3. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Menimbang Penerapan Subsidi Pupuk Langsung ke Petani
4. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Menelisik Penyebab Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit
5. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Analisis Dampak El-Nino terhadap Produksi Tanaman Pangan
6. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Prospek Keberlanjutan Produksi Karet Alam Indonesia
7. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mewaspadai Dampak Keluarnya Rusia dari Kesepakatan *Black Sea Grain Initiative* terhadap Ketahanan Pangan Global dan Domestik
8. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Lonjakan Harga Beras Dunia dan Potensi Dampaknya terhadap Indonesia
9. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Menimbang Ekspor Telur Ayam Ras ke Singapura
10. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Menimbang Pembentukan Direktorat Jenderal yang Berfungsi Mendorong Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Pertanian

11. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Situasi Harga Pangan Global: Saatnya Mewaspadai Efek Berantai Harga Pangan di Pasar Domestik
12. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mewaspadai Musim Panen Raya dan Produksi Padi 2024
13. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Saran Pikir Tata Kelola Bantuan Langsung Pupuk
14. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Peningkatan Efektivitas Pengendalian Inflasi di Provinsi Banten dan Tiga Kota Pemantauan Inflasi yaitu Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon (4 Policy Brief)

Tahun 2024 (19 Rekomendasi Kebijakan)

1. Penetapan Neraca Komoditas Beras Umum
2. Permohonan Perubahan Persetujuan Impor Beras dan Jagung Pakan
3. Perpanjangan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Skema Komersial
4. Memahami Lonjak Harga Jagung 2024
5. Memahami Fenomena Lonjak Harga Gabah dan Beras dari Struktur Biaya Usaha Tani Padi dan Biaya Pengolahan Beras
6. Masukkan terhadap Draf Surat Perintah Menteri Pertanian tentang Perbanyakan Benih BPSIP
7. Prediksi Penurunan Luas Panen dan Produksi, Serta Harga Gabah dan Beras Selama Tahun 2024
8. Fenomena Harga Beras di Atas Harga Eceran Tertinggi
9. Penguatan Sistem Perbenihan Padi dan Jagung
10. Mengukur Daya Saing Usaha Tani Padi Indonesia dengan Negara Produsen Utama
11. Strategi Akselerasi Program Peremajaan Sawit Rakyat
12. Strategi Percepatan Implementasi Perpres No 35 Tahun 2022 Mendukung Pembangunan Pertanian Berkelanjutan
13. Penguatan Sistem Perbenihan Hortikultura Menuju Kemandirian Benih Hortikultura
14. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Berbagai Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri
15. Strategi Pencapaian Sasaran Swasembada Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi
16. Potensi Dampak Pencabutan Larangan Ekspor Beras India Terhadap Harga Beras Domestik
17. Strategi Peningkatan Produksi Susu Mendukung Program Makan Bergizi
18. Penyempurnaan Neraca Pangan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Pengendalian Inflasi Provinsi Maluku
19. Rekomendasi Kebijakan Penyesuaian HPP Padi

LAMPIRAN 3

Revisi Target Renstra 2020-2024

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Revisi Target Renstra 2020-2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU
JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR
TELPON 0251- 8333964, 8325177, 8338717,FACSIMILE. 0251-8314496
Website : http://pse.litbang.pertanian.go.id Email : pse@litbang.pertanian.go.id

Nomor : B- 972 /RC-110/A.11/05/2022 — 23 Mei 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 lembar
Hal : Penyampaian Indikator dan Target Kinerja PSEKP

Yth.
Kepala Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
di
Tempat

Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan target dan indikator kinerja lingkup Setjen tanggal 20 Mei 2022, bersama ini kami sampaikan Indikator dan Target Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) 2021 - 2024 sebagai bahan lampiran Revisi Ketiga Renstra Setjen.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si
NIP. 196803161997031002

Tembusan: Yth.
Sekretaris Jenderal Kementan

Revisi Target Renstra 2020-2024

Lampiran 1. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PSEKP 2021 -2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline 2020	Lokasi	Target				Unit Organisasi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									
Pengelolaan Kebijakan, Keuangan dan Umum									Biro KBMN, Birocan, Biro UP, PSEKP
	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian			Jawa Barat					Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)
	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	%	N/A		88	90	92	93	
	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Skala Likert (1-4)	3.04		3.10	3.15	3.20	3.25	

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si
NIP. 196803161997031002

LAMPIRAN 4

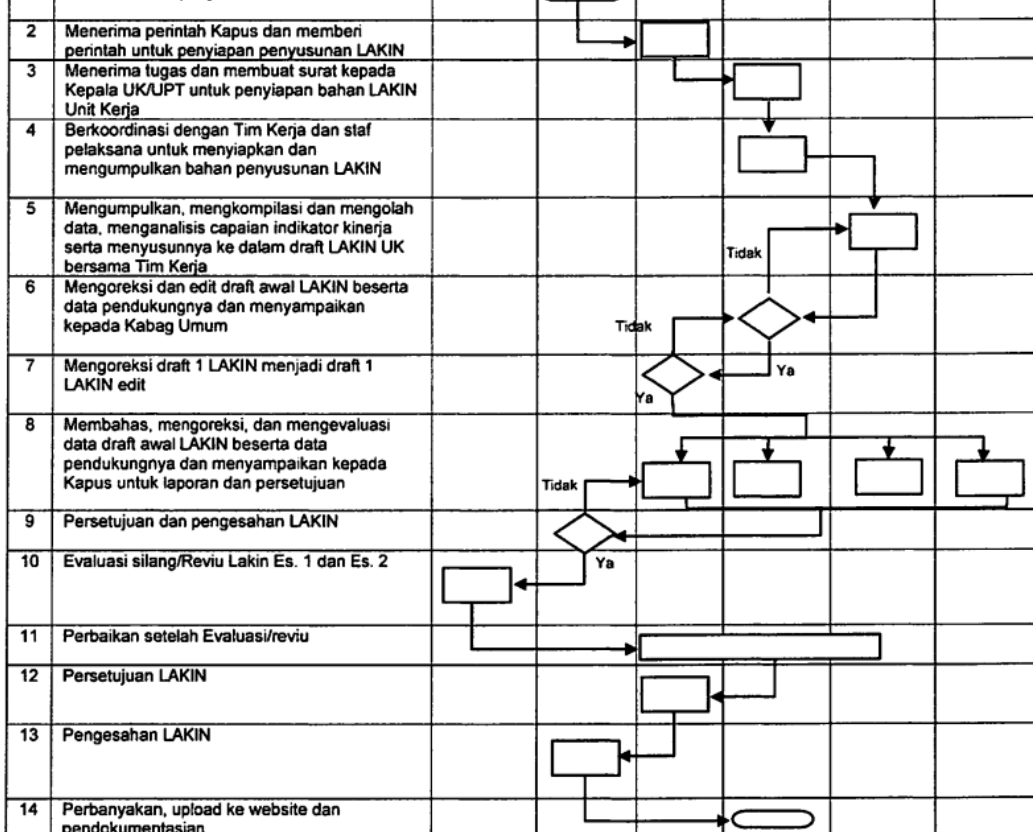
SOP Pengumpulan Data dan Penyusunan LAKIN TA 2024

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	105.1/OT.210/A.11/02/2024
	Tanggal Pembuatan	1 Februari 2024
	Tanggal Revisi	8 Februari 2024
	Tanggal Efektif	15 Februari 2024
SEKRETARIAT JENDERAL	Disahkan oleh	KEPALA PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si NIP 196803161997031002
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN (PSEKP)	Nama SOP	Pengumpulan Data dan Penyusunan LAKIN
Dasar Hukum	**Kualifikasi pelaksana**	
1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. PP 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 3. PP nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 4. PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Permen PAN/RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 Tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 426 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1. Mampu menganalisis data kajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian 2. Mampu melakukan sintesa terhadap laporan kajian, diseminasi, advokasi, dan administrasi 3. Mampu melakukan evaluasi terhadap laporan kajian, diseminasi, advokasi, dan administrasi 4. Mampu mengoperasikan komputer dan internet 5. Memiliki kemampuan mengolah data	
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**	
1. SOP Penyusunan RPTP/RDHP/RKTM 2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan 3. SOP Penyusunan Renja 4. SOP penyusunan RENSTRA 5. SOP Koordinasi Pelaporan 6. SOP Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan	1. Laptop/Note book/PC/Printer/ATK 2. Renstra 3. TOR RPTP/RDHP/RPPK 4. Penetapan Kinerja 5. Laporan Keuangan 6. Laporan Akhir Kegiatan	
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**	
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PSEKP, merupakan salah satu bahan penilaian kinerja PSEKP yang memuat laporan hasil kajian berupa target sasaran, hasil fisik, keuangan, dan memuat laporan hasil kegiatan analisis berupa target dan capaian 2. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LAKIN tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan	1. Dokumen LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2. Upload di web Sakip Kementan 3. Upload di web PSEKP	

***Standard Operating Procedure* (SOP) Pengumpulan Data dan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)**

No	Kegiatan	Pelaksanaan						Syarat baku			Ket.
		Sekjen dan Itjen	Kepala Pusat	Kabag Umum	Tim Kerja Evaluasi	Pelaksana	Tim Penyusun Lakin	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Perintah untuk penyusunan LAKIN							SK Tim Penyusunan LAKIN	1 hari	SK	
2	Menerima perintah Kapus dan memberi perintah untuk penyiapan penyusunan LAKIN							SK Tim Penyusunan LAKIN	1 hari	SK	
3	Menerima tugas dan membuat surat kepada Kepala UK/UPT untuk penyiapan bahan LAKIN Unit Kerja							Surat	1 hari	Surat	
4	Berkoordinasi dengan Tim Kerja dan staf pelaksana untuk menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan LAKIN							Telepon, email, dan sosmed	1 minggu	Data awal hasil kegiatan LAKIN	
5	Mengumpulkan, mengkompilasi dan mengolah data, menganalisis capaian indikator kinerja serta menyusunnya ke dalam draft LAKIN UK bersama Tim Kerja							Laporan pencapaian IKU dan keuangan	2 minggu	Draft awal LAKIN	
6	Mengoreksi dan edit draft awal LAKIN beserta data pendukungnya dan menyampaikan kepada Kabag Umum							Renstra, RKT, PK, Realisasi, dan Hasil Analisis Pencapaian Indikator Kinerja	1 minggu	Draft 1 LAKIN	
7	Mengoreksi draft 1 LAKIN menjadi draft 1 LAKIN edit							Draft 1 LAKIN	1 minggu	Draft 1 LAKIN edit Kabag Umum	
8	Membahas, mengoreksi, dan mengevaluasi data draft awal LAKIN beserta data pendukungnya dan menyampaikan kepada Kapus untuk laporan dan persetujuan							Draft 1 edit, draft 2, dan draft 3 LAKIN	1 minggu	Drarft 2 dan 3 (final data) LAKIN	
9	Persetujuan dan pengesahan LAKIN							LAKIN	1 minggu	LAKIN	
10	Evaluasi silang/Reviu Lakin Es. 1 dan Es. 2							LAKIN soft file dan hard file	1 minggu	Hasil evaluasi/reviu	
11	Perbaikan setelah Evaluasi/reviu							LAKIN siap cetak	1 minggu	LAKIN siap cetak	
12	Persetujuan LAKIN							LAKIN	1 hari	LAKIN	
13	Pengesahan LAKIN							LAKIN	1 hari	LAKIN	
14	Perbanyakan, upload ke website dan pendokumentasian							LAKIN	1 minggu	LAKIN	
Total Waktu								LAKIN	10 minggu 5 hari	LAKIN	



Keterangan: Awal dan akhir proses; Proses operasional; Keputusan atau subpoint.

LAMPIRAN 5

Evidence Pendukung Penyusunan
LAKIN TA 2024

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Bagian Nota Dinas Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan (IKSK 1) PSEKP TA 2024

KEMENTERIAN PERTANIAN
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
KARTU DISPOSISI

Sifat :	☐ Rahasia	☐ Penting	☐ Biasa	☐ Segera
Indeks :	Tgl. Penyelesaian :			
Perihal	: ND PB Prediksi Penurunan luas panen & Produksi serta harga gabah & beras TA 2024			
No. Surat	: 474/LB.050/A.11/4/2024	Tgl. Surat	: 1 April 2024	
Asal Surat	: PSEKP (Bsp. Sekjen)	Tgl. Diterima	: 2 April 2024	

Diteruskan kepada	Isi disposisi
☐ Kabag Umum	☑ Untuk diketahui/dipelajari
☑ Ketua Kelompok Pelaksanaan Analisis Sosek Pertanian	☐ Untuk penyelesaian selanjutnya
☐ Ketua Kelompok Evaluasi & Pemanfaatan Hasil Analisis Sosek Pertanian	☐ Harap saran/pertimbangan
☐ Pejabat Pembuat Komitmen	☐ Untuk dibicarakan dengan saya
☐ Sdr. _____	☐ Harap mewakili saya
Sdr. _____	☐ Siapkan bahan
Sdr. _____	☐ Konsultasi/diskusikan dengan _____
Sdr. _____	☐ Laksanakan sesuai aturan

Bogor, _____
Kepala Pusat
16/4/2024

Catatan :

KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU
JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR
TELEPON. 0251-8333964, 8325177, 8338717, FAKSIMILE. 0251-8314496
Website : http://psp.litbang.pertanian.go.id Email : psp@litbang.pertanian.go.id

NOTA DINAS
Nomor: 474/LB.050/A.11/04/2024

Yth : Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
Dari : Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Hal : *Policy Brief* Prediksi Penurunan Luas Panen dan Produksi, serta Harga Gabah dan Beras Selama Tahun 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 1 April 2024

Mencermati publikasi BPS tentang perkembangan luas panen, produksi dan harga gabah/beras dan ramalan BMKG terkait fenomena El-Nino yang akan berubah menjadi La-Nina normal dan lemah pada sebagian wilayah Indonesia; bersama ini disampaikan dengan hormat policy brief **Prediksi Penurunan Luas Panen dan Produksi, serta Harga Gabah dan Beras Selama Tahun 2024.** Butir-butir pokok dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Musim kemarau 2023 yang lebih panjang telah menyebabkan musim tanam periode Oktober-Maret 2023/2024 mengalami kemunduran. Akibatnya luas panen pada periode Januari-Mei 2024 (4,76 juta ha) diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 8,11 persen dibanding periode yang sama 2023 (5,18 juta ha); sementara produksinya turun dari 27,51 juta ton GKG menjadi 24,83 juta ton atau sekitar 9,74 persen (KSA Amatan Februari 2024). Penurunan produksi yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan luas panen, karena produktivitas rata-rata turun dari 5,31 ton/ha menjadi 5,22 ton/ha. Potensi penurunan produksi gabah pada periode tersebut dapat menyebabkan harga beras masih akan bertahan pada tingkat stabil tinggi..
2. Berdasarkan perkiraan BMKG, pada periode April – Desember 2024 sebagian wilayah Indonesia akan mengalami kondisi La Nina Netral dan La Nina lemah. Kondisi ini dapat memberikan dampak positif terhadap penambahan luas tanam padi, khususnya untuk wilayah yang mempunyai lahan kering dan sawah tadah hujan.
3. Namun demikian apabila tidak dilakukan upaya khusus, berdasarkan hasil pemodelan, produksi padi Indonesia pada 2024 diprediksi masih belum pulih dan bahkan sedikit lebih rendah dibandingkan 2023 (53,63 juta ton vs 53,98 juta ton). Kondisi tersebut menyebabkan harga gabah dan beras diprediksi masih stabil tinggi. Tingginya harga gabah berdampak positif terhadap petani skala luas, namun negatif terhadap petani skala kecil karena mereka umumnya *net consumer* beras.
4. Fenomena La Nina netral dan La Nina lemah di sebagian wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk memperluas penanaman padi, khususnya di lahan sawah tadah hujan. Potensi ini terlihat dari prediksi luas panen periode Mei-Agustus 2024 yang mencapai 4,15 juta hektar, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing seluas 3,44 juta hektar dan 3,61 juta hektar.
5. Tingginya harga gabah/beras untuk jangka waktu yang relatif lama berpotensi memicu efek berantai perilaku petani dalam menjual hasil panen (gabah hasil panen tidak dijual

---

LEMBAR DISPOSISI

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI		No. Agenda	789/KO/4
		Tanggal	8/4/24
Sifat: Biasa ☐ Penting ☐ Rahasia ☐	Derajat: Segera ☐ Sangat Segera ☐ Kilat ☐	Tanggal Penyelesaian :	
Index :	Kode :		
No. Surat : 474/LB.050/A.11/04/24	Tanggal : 1-4-24		

Perihal : Policy Brief prediksi penurunan luas panen dan produksi, serta Harga Gabah dan Beras Selama tahun 2024

Lampiran :

Asal Surat : PSEKP

DITERUSKAN KEPADA :	HARAP/UNTUK
1. Karo Perencanaan ☐	1. Diselesaikan sesuai Disposisi Menteri ☐
2. Plt. Karo Organisasi dan Kepegawaian ☐	2. Diketahui / Dipedomani / Dipergunakan ☐
3. Plt. Karo Hukum ☐	3. Dipelajari / Saran / Pertimbangan ☐
4. Karo Keuangan dan BMN ☐	4. Diperiksa / Proses / Selesaikan ☐
5. Karo Umum dan Pengadaan ☐	5. Disiapkan jawaban / Jawab langsung ☑
6. Karo Kerjasama Luar Negeri ☐	6. Diingatkan pada waktunya ☐
7. Karo Humas dan Informasi Publik ☐	7. Laporkan singkat / Bicarakan dengan Sekjen ☐
8. Kapus Data dan SIP ☐	8. Konsultasi / Diskusikan ☐
9. Kapus PVT dan Perizinan Pertanian ☐	9. Laksanakan sesuai aturan ☐
10. Kapus Perpustakaan dan Literasi Pertanian ☐	
11. Kapus Sosial Ekonomi dan KP ☑	Catatan :
12. Sekretaris Unit Nasional KORPRI ☐	
13. Sekretaris/TU Sekjen, Staf Ahli Menteri ☐	
14. ..... ☐	

Sekretaris Jenderal

Setelah digunakan harap segera dikembalikan kepada :
Tanggal :

KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU

NOTA DINAS
No. 474 /LB.050/A.11/04/2024

Yth : Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
Dari : Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Hal : *Policy Brief* Prediksi Penurunan Luas Panen dan Produksi, serta Harga Gabah dan Beras Selama Tahun 2024
Tanggal : 1 April 2024

Mencermati publikasi BPS tentang perkembangan luas panen, produksi dan harga gabah/beras dan ramalan BMKG terkait fenomena El-Nino yang akan berubah menjadi La-Nina normal dan lemah pada sebagian wilayah Indonesia; bersama ini disampaikan dengan hormat policy brief **Prediksi Penurunan Luas Panen dan Produksi, serta Harga Gabah dan Beras Selama Tahun 2024.** Butir-butir pokok dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Musim kemarau 2023 yang lebih panjang telah menyebabkan musim tanam periode Oktober-Maret 2023/2024 mengalami kemunduran. Akibatnya luas panen pada periode Januari-Mei 2024 (4,76 juta ha) diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 8,11 persen dibanding periode yang sama 2023 (5,18 juta ha); sementara produksinya turun dari 27,51 juta ton GKG menjadi 24,83 juta ton atau sekitar 9,74 persen (KSA Amatan Februari 2024). Penurunan produksi yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan luas panen, karena produktivitas rata-rata turun dari 5,31 ton/ha menjadi 5,22 ton/ha. Potensi penurunan produksi gabah pada periode tersebut dapat menyebabkan harga beras masih akan bertahan pada tingkat stabil tinggi..
2. Berdasarkan perkiraan BMKG, pada periode April – Desember 2024 sebagian wilayah Indonesia akan mengalami kondisi La Nina Netral dan La Nina lemah. Kondisi ini dapat memberikan dampak positif terhadap penambahan luas tanam padi, khususnya untuk wilayah yang mempunyai lahan kering dan sawah tadah hujan.
3. Namun demikian apabila tidak dilakukan upaya khusus, berdasarkan hasil pemodelan, produksi padi Indonesia pada 2024 diprediksi masih belum pulih dan bahkan sedikit lebih rendah dibandingkan 2023 (53,63 juta ton vs 53,98 juta ton). Kondisi tersebut menyebabkan harga gabah dan beras diprediksi masih stabil tinggi. Tingginya harga gabah berdampak positif terhadap petani skala luas, namun negatif terhadap petani skala kecil karena mereka umumnya *net consumer* beras.
4. Fenomena La Nina netral dan La Nina lemah di sebagian wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk memperluas penanaman padi, khususnya di lahan sawah tadah hujan. Potensi ini terlihat dari prediksi luas panen periode Mei-Agustus 2024 yang mencapai 4,15 juta hektar, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing seluas 3,44 juta hektar dan 3,61 juta hektar.
5. Tingginya harga gabah/beras untuk jangka waktu yang relatif lama berpotensi memicu efek berantai perilaku petani dalam menjual hasil panen (gabah hasil panen tidak dijual seluruhnya), kenaikan biaya produksi yang salah satunya dipicu oleh kenaikan harga benih, penurunan produksi jagung dan kedelai di lahan sawah, dan inflasi

KEMENTERIAN PERTANIAN
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
KARTU DISPOSISI

Sifat : ☐ Rahasia ☐ Penting ☐ Biasa ☐ Segera
Indeks : Tgl. Penyelesaian :
Perihal : ND Harga Gabah & Usulan Perubahan HPP GKP
No. Surat : B.1103/TP.010/C/4/2024 Tgl. Surat : 3 April 2024
Asal Surat : Dirjen TP Tgl. Diterima : 19 April 2024

Diteruskan kepada
☐ Kabag Umum
☑ Ketua Kelompok Pelaksanaan Analisis Sosek Pertanian
☐ Ketua Kelompok Evaluasi & Pemanfaatan Hasil Analisis Sosek Pertanian
☐ Pejabat Pembuat Komitmen
☐ Sdr. _____
☐ Sdr. _____
☐ Sdr. _____
☐ Sdr. _____

Isi disposisi
☑ Untuk diketahui/dipelajari
☐ Untuk penyelesaian selanjutnya
☐ Harap saran/pertimbangan
☐ Untuk dibicarakan dengan saya
☐ Harap mewakili saya
☐ Siapkan bahan
☐ Konsultasi/diskusikan dengan _____
☐ Laksanakan sesuai aturan

Bogor, _____
Kepala Pusat
2/4/2024

Catatan :

KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
Jalan Tentara Pelajar Nomor 3 B Cimanggu Bogor 16111
Telpon 0251- 8333964, 8338717,facsimile. 0251-8314496
Website : https://psekp.setjen.pertanian.go.id Email : psekp@pertanian.go.id

mutu certification international

NOTA DINAS

No.315 /LB.050/A.11/03/2024

Yth : Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
Dari : Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Hal : Policy Brief Memahami Struktur Biaya Usaha Tani Padi
Tanggal : 6 Maret 2024

Bersama ini disampaikan dengan hormat policy brief "Memahami Fenomena Lonjak Harga gabah dan Beras dari Struktur Biaya Usaha Tani Padi dan Biaya Pengolahan Beras. Policy brief tersebut kami susun atas permintaan Direktur Utama Perum Bulog. Namun mempertimbangkan isu beras yang saat ini relatif sensitif, kami mohon arahan Bapak Sekjen terkait penyampaiannya kepada Perum Bulog.

Atas perkenan dan arahan lebih lanjut Bapak Sekretaris Jenderal, kami sampaikan terima kasih.

Sudi Mardianto

Policy Brief
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian

MEMAHAMI FENOMENA LONJAK HARGA GABAH DAN BERAS DAN STRUKTUR BIAYA USAHA TANI PADI DAN BIAYA PENGOLAHAN BERAS[1]

RINGKASAN EKSEKUTIF

Harga gabah kering panen (GKP) yang sempat menyentuh Rp6.600 per kg di satu sisi memberikan insentif bagi petani, disinsentif bagi konsumen. Berdasarkan analisis usahatani tahun 2023, biaya pokok produksi GKP sebesar Rp4.671/kg dan Rp5.457/kg apabila biaya memperhitungkan sewa lahan dan tenaga kerja keluarga.

Harga beras (medium dan premium) ditentukan oleh harga gabah yang dibeli oleh pengusaha penggilingan padi (RMU). Jika harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan premium di pengecer masing-masing sebesar Rp11.355 per kg dan Rp13.870 per kg. Angka ini yang disalahkan dasar penetapan HET beras oleh Bapanas.

Jika harga GKP di petani Rp6.000 per kg, maka HET beras medium dan premium di pengecer masing-masing sebesar Rp17.665 per kg dan Rp21.729 per kg.

Beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

a. Efisiensi usaha tani padi harus menjadi perhatian karena apabila terlalukan akan memicu tuntutan kenaikan harga gabah secara berkelanjutan, akan berdampak kontraproduktif bagi Indonesia sebagai net konsumen beras.
b. Agaibla pemerintah mempertimbangkan akan menyesuaikan HPP gabah, maka **disarankan dalam kisaran Rp6.000-Rp6.256** per kg. Pada kisaran harga tersebut, petani padi akan memperoleh keuntungan sekitar 29-34 persen dan harga beras medium dan premium di penggilingan masing-masing berkisar Rp13.564-Rp13.111 per kg dan Rp16.584-Rp16.037 per kg.
c. Pemerintah harus mengoptimalkan peningkatan pendapatan petani padi melalui perpaduan peningkatan penguasaan lahan dan efisiensi usaha tani padi.
d. Kebijakan HET beras, seyogyanya hanya diperuntukan bagi pemerintah untuk mengintervensi pasar.

PENDAHULUAN

1. Kenaikan harga gabah dan beras yang berkepanjangan (walaupun sudah didukung impor beras) sejak Agustus 2023 hingga saat ini (Februari 2024) telah memicu diskusi publik terkait efektivitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Harga gabah kering panen (GKP) yang sempat menyentuh Rp6.000 per kg, di satu sisi memberikan insentif bagi petani, namun disinsentif bagi konsumen. Diskusi yang awalnya menyoroti maslahnya harga gabah/beras, beberapa hari terakhir sudah mulai bergeser ke topik tren penurunan harga gabah/beras; dan dinaraskan oleh beberapa pihak berpotensi merugikan petani. Pemerintah memang akan selalu dihadapkan pada dilema kebijakan, utamanya yang berkaitan dengan prinsip "keadilan" antara produsen dan konsumen. Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah harus bersiap dengan penjelasan yang dapat dipahami oleh publik. Untuk itu, terkait dengan fenomena harga gabah/beras yang sedang mengalami tren penurunan dari kondisi harga tinggi, perlu dilakukan kajian singkat terkait dengan titik keseimbangan baru harga gabah/beras yang memenuhi prinsip "keadilan" bagi produsen dan konsumen.

STRUKTUR ONGKOS USAHA TANI PADI

2. Berdasarkan hasil analisis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dari kegiatan Panel Petani Nasional (PATANAS), berikut disampaikan beberapa informasi penting terkait dengan struktur ongkos usaha tani padi di lahan sawah irigasi per hektar per musim tahun 2023 (Tabel 1):
   a. **Total biaya produksi usaha tani padi di lahan sawah irigasi sebesar Rp21,86 juta per hektar per musim.** Dari total biaya tersebut, pangsa biaya terbesar adalah tenaga kerja (47,14%).

[1] Boleh Dipanalisakan oleh: Sudi Mardianto, Sumedi, Aida Rifki, dan Rangga D Yuta

---

LEMBAR DISPOSISI

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI

No. Agenda : 289/M/04
Tanggal : 4-4-24

Sifat : Biasa ☐ Penting ☐ Rahasia ☐
Derajat : Segera ☐ Sangat Segera ☐ Kilat ☐
Tanggal Penyelesaian :
Indeks :
Kode :
No. Surat : B.1103/TP.010/C/04/2024
Tanggal : 3-4-24
Perihal : Harga gabah dan usulan Perubahan HPP GKP
Lampiran :
Asal Surat : DJ. Tanaman Pangan

DITERUSKAN KEPADA :
1. Karo Perencanaan ☐
2. Plt. Karo Organisasi dan Kepegawaian ☐
3. Plt. Karo Hukum ☐
4. Karo Keuangan dan BMN ☐
5. Karo Umum dan Pengadaan ☐
6. Karo Kerjasama Luar Negeri ☐
7. Karo Humas dan Informasi Publik ☐
8. Kapus Data dan SIP ☐
9. Kapus PVT dan Perizinan Pertanian ☐
10. Kapus Perpustakaan dan Literasi Pertanian ☐
11. Kapus Sosial Ekonomi dan KP ☑
12. Sekretaris Unit Nasional KORPRI ☐
13. Sekretaris/TU Sekjen, Staf Ahli Menteri ☐
14. ☐

HARAP/UNTUK
1. Diselesaikan sesuai Disposisi Menteri ☐
2. Diketahui / Dipedomani / Dipergunakan ☐
3. Dipelajari / Saran / Pertimbangan ☐
4. Diperiksa / Proses / Selesaikan ☑
5. Disiapkan jawaban / Jawab langsung ☐
6. Diingatkan pada waktunya ☐
7. Laporkan singkat / Bicarakan dengan Sekjen ☐
8. Konsultasi / Diskusikan ☐
9. Laksanakan sesuai aturan ☐

Catatan : .....

Sekretaris Jenderal

Setelah digunakan harap segera dikembalikan kepada :
Tanggal : 4/4

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
JALAN AUP No. 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
KOTAK POS 7264 & 7301 / JKS PSM
TELEPON (021) 7806619, 7824669, FAKSIMILE (021) 7806309
WEBSITE : http://tanamanpangan.pertanian.go.id

NOTA DINAS

Nomor : B-1103/TP.010/C/04/2024

Yth : Menteri Pertanian RI
Dari : Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Hal : Harga Gabah dan Usulan Perubahan HPP GKP
Tanggal : 3 April 2024

Bersama ini kami sampaikan laporan kondisi harga GKP di petani dan usulan perubahan HPP sebagai berikut :

1. Berdasarkan pantauan Petugas Pelayanan Informasi Pasar (harga produsen), harga GKP tgl 25 – 28 Maret 2024 di 605 titik sentra padi berkisar Rp 4.900 s.d. Rp 6.900/kg, dengan rerata harga Rp 6.169/kg.
2. Terdapat 164 titik lokasi dengan harga GKP petani dibawah Rp 6.000/kg. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 6 Tahun 2023, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) GKP di petani Rp 5.000/kg dengan Kadar Air 25% dan Kadar Hampa maks 10%.
3. Mengingat kenaikan biaya produksi padi dan untuk menjaga income petani minimal memperoleh keuntungan 30% dari biaya produksi serta kondisi harga gabah eksisting dan hasil perhitungan struktur biaya padi per hektar (Tabel 1 terlampir), ijin kami mengusulkan perubahan HPP GKP petani semula Rp 5.000/kg menjadi minimal Rp 6.000/kg dan maksimal Rp 6.500/kg. Sebagai informasi pendukung usulan HPP dari instansi terkait (PSEKP, KTNA, Bapanas, Perpadi dan HKTI) (Tabel 2 terlampir).
4. Sesuai arahan Bapak Menteri, kami sudah berkomunikasi dengan Kepala Bapanas dan akan dibahas dalam waktu dekat.

Demikian disampaikan mohon arahan petunjuk Bapak Menteri lebih lanjut.

Suwandi

Nomor : B-1103/TP.010/C/04/2024
Tanggal : 3 April 2024

STRUKTUR ONGKOS USAHA TANI PADI
LAHAN LEBAK 1 Ha

	URAIAN	STRUKTUR ONGKOS USAHA TANI			PERSENTASE BIAYA (%)		
		DITJEN TP 2023	PSEKP 2023	BPS 2017	Ditjen TP	PSEKP	BPS
C	PENERIMAAN	27.000.000	25.324.210	16.443.320			
	1. PRODUKSI GKP (Ton/Ha)	6,300	4,681	4,634			
	2. HARGA (Rp/kg)	6,900	5,410	3,960			
B	BIAYA PRODUKSI (BIAYA TETAP + BIAYA VARIABEL)	20.350.000	21.864.722	12.800.000			
	BIAYA TETAP	9.000.000	8.072.190	3.472.716	30.68	27.77	25.61
	1. SEWA LAHAN	9.000.000	8.072.190	3.472.716	30.68	27.77	25.61
	2. BIAYA PENYUSUTAN ALAT MESIN PERTANIAN						
	a. PACUL						
	b. SABIT/ PARANG						
	c. TRAKTOR						
	d. POWER THRESHER						
	e. COMBINE						
	BIAYA VARIABEL	20.350.000	19.792.572	10.997.284	69.32	72.23	74.39
	1. BENIH/BIBIT	690.000	1.174.968	613.824	2.22	6.37	3.79
	2. PUPUK	2.900.000	2.216.546	1.275.788	9.89	10.14	9.43
	a. UREA	1.400.000					
	b. NPK	1.200.000					
	c. ZA/ZNKA	120.000					
	d. SP	170.000					
	e. KCL	-					
	f. PUPUK DAUN CAIR	-					
	g. ZA	-					
	3. PESTISIDA	2.230.000	1.794.467	889.320	7.67	7.76	4.39
	a. Pestisida	-					
	b. Fungisi	-					
	c. Insektisi	-					
	d. Herbisida	-					
	e. ZPT/ETH	-					
	f. OBAT WERENG (PLENGI)	-					
	4. UPAH PEKERJA	9.700.000	10.347.606	5.618.924	33.34	47.14	48.79
	a. PENGOLAHAN LAHAN	1.400.000					
	b. SEMAI, PENANAMAN DAN PENYULAMAN	3.500.000					
	c. PEMELIHARAAN	1.500.000					
	d. PEMUPUKAN	850.000					
	e. PENGENDALIAN OPT	700.000					
	f. PEMANENAN, PERONTOKAN DAN PENGANGKUTAN	2.100.000					
	5. SEWA ALAT SARANA USAHA	1.909.393			12.27	-	-
	a. TRAKTOR	1.800.000					
	b. COMBINE HARVESTER	2.000.000					
	c. POMPA	-					
	6. BAHAN BAKAR	400.000		127.464	1.36	-	0.94
	a. BAHAN BAKAR MINYAK	-					
	b. BAHAN BAKAR GAS	-					
	7. IRIGASI	340.000			1.16	-	
	8. PBB	195.393		355.664	0.66	-	2.04
	9. LAINNYA (RETRIBUSI/PUNGUT/SEWA/PREMI)	230.000	292.987	583.000	0.85	1.80	4.50
D	KEUNTUNGAN USAHATANI	6.521.993	3.459.488	4.553.320			
E	R/C	1,29	1,16	1,36			
	BEP (Rp/kg)	4.649	4.678,95	2.926,20			
	BEP*	5.064	5.073,24	3.244,06			

Ket : *Asumsi margin 30% dari BEP

Provitas GKP =Provitas GKG Tkn 2023 BPS(6.838) = 5.361(0.838)= 6,310 Ton/Ha

Rekapitulasi Nota Dinas Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan PSEKP TA 2024

No	Nomor ND	Tanggal	Tujuan	Penerapan	Uraian
1	87/LB.050/A.11/01/2024	17 Januari 2024	Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Peratanian	Rekomendasi kebijakan terkait Perpanjangan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Skema Komersial yang disampaikan kepada Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	Rekomendasi terkait Perpanjangan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Skema Komersial menindaklanjuti disposisi Bapak Sekretaris Jenderal terkait surat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Direktur Utama Perum Bulog Nomor 453/T.03.03/K,12/2023, tanggal 29 Desember 2023. Perpanjangan penugasan Bapanas kepada Perum Bulog untuk menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras premium melalui skema komersial sebanyak 200.000 ton hingga 29 Februarl 2024 atau sebelum masa panen raya, dengan mengacu pada harga eceran tertinggi beras; dapat dipahami dengan pertimbangan. Perpanjangan penugasan Kepala Bapanas kepada Perum Bulog ini perlu didukung oleh Kementerian Pertanian.
2	95 /LB.050/A.11/01/2024	18 Januari 2024	Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Peratanian	Rekomendasi kebijakan terkait Permohonan perubahan persetujuan impor beras dan jagung pakan yang disampaikan ke Plt. Sekretaris Jenderal	Perum Bulog mendapat penugasan untuk pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Proses pengiriman beras dan jagung impor yang tersisa ternyata terkendaia oieh beberapa hal sebagai berikut: a) gangguan proses pemuatan di negara asai karena hujan, ketersediaan kapai dan buruh muat terbatas, jadwai pengiriman yang padat, dan hari libur nasional; b) antrian sandar di

No	Nomor ND	Tanggal	Tujuan	Penerapan	Uraian
				Kementerian Pertanian	pelabuhan Indonesia akibat kedatangan kapai yang bersamaan dan cuaca hujan; dan c) khusus jagung, adanya perbedaan wiiayah konsentrasi peternak dengan rencana pemasukan jagung. Mempertimbangkan beberapa kendala di atas, Perum Bulog mengusulkan kepada Menko Perekonomian untuk melakukan penyesuaian alokasi pemasukan impor beras dan jagung pada peiabuhan tujuan di Indonesia. Pertimbangan utamanya adaiah untuk efektivitas dan efisiensi penyaiuran CBP dan CJP. Mempertimbangkan keberadaan CBP dan CJP sangat penting untuk stabiiisasi pasokan dan harga beras dan jagung di Indonesia saat ini, serta jadwal pengiriman yang sudah mempertimbangkan masa panen padi dan jagung di beberapa wiiayah di Indonesia, maka kami berpandangan Kementerian Pertanian dapat menyetujui usulan Perum Buiog ke Menko Perekonomian melakukan penyesuaian aiokasi pemasukan sisa impor beras dan jagung untuk penugasan 2023 pada pelabuhan tujuan di Indonesia.
3	194 /LB.050/A.11/02/2024	15 Februari 2024	Direktur Jenderal Tanaman Pangan	Rekomendasi kebijakan terkait Lonjakan harga jagung yang disampaikan ke Direktur Jenderal Tanaman Pangan	Upaya peningkatan produksi jagung dalam negeri menghadapi tantangan yang tidak ringan, karena harga gabah/beras saat ini sangat tinggi, sehingga petani di lahan sawah lebih tertarik untuk menanam padi dibanding jagung. Untuk itu, upaya peningkatan produksi jagung yang bersamaan dengan peningkatan produksi padi

No	Nomor ND	Tanggal	Tujuan	Penerapan	Uraian
					perlu mempertimbangkan pemanfaatan lahan rawa mineral, lahan kering, dan perkebunan. Untuk memenuhi ketersediaan jagung domestik saat ini dan mengendalikan kenaikan harga jagung di tingkat peternak, impor menjadi opsi yang paling rasional di tengah penurunan harga jagung di pasar global dan relatif stabilnya nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Harga jagung di tingkat petani yang saat ini di atas Rp6.000 per kg sudah memberikan keuntungan di atas 50 persen dari biaya produksi. Namun apabila pemerintah bermaksud mengendalikan harga jagung dengan menyesuaikan HAP jagung, disarankan harga di petani dan peternak masing-masing sebesar Rp5.000 per kg dan Rp6.000 per kg.
4	313/LB.050/A.11/03/2024	6 Maret 2024	Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Peratanian	Rekomendasi kebijakan terkait Struktur Biaya Usahatani Padi yang disampaikan ke Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	Efisiensi usaha tani padi harus menjadi perhatian karena apabila terabaikan akan memicu tuntutan kenaikan harga gabah secara berkelanjutan akan berdampak produksi beras Indonesia semakin kompetitif. Apabila pemerintah mempertimbangkan akan menyesuaikan HPP gabah, maka disarankan dalam kisaran Rp6.000 – Rp6.250 per kg. Pemerintah harus mengupayakan peningkatan pendapatan petani padi melalui perpaduan peningkatan penguasaan lahan dan efisiensi usaha tani padi. Ketentuan HET beras seyogyanya hanya diperuntukkan bagi pemerintah untuk mengintervensi pasar.

No	Nomor ND	Tanggal	Tujuan	Penerapan	Uraian
5	462.1/LB.050/A.11/03/2024	27 Maret 2024	Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Peratanian	Rekomendasi kebijakan terkait Prediksi Penurunan Luas Panen dan Produksi, serta Harga Gabah dan Beras selama Tahun 2024 yang disampaikan ke Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	Produksi padi Indonesia pada 2024 diprediksi masih belum pulih sepenuhnya, dan bahkan sedikit lebih rendah dibandingkan 2023. Prakiraan BMKG yang menunjukkan sebagian wilayah Indonesia akan mengalami La Nina netral dan La Nina lemah dapat dimanfaatkan untuk memperluas penanaman padi. Tingginya harga gabah/beras untuk jangka waktu yang relatif lama berpotensi memicu efek berantai perilaku petani dalam menjual hasil panen (gabah hasil panen tidak dijual seluruhnya), kenaikan biaya produksi yang salah satunya dipicu oleh kenaikan harga benih, penurunan produksi jagung dan kedelai di lahan sawah, dan inflasi. Pemerintah harus mempunyai Cadangan Beras Pemerintah dalam jumlah yang memadai untuk stabilisasi pasokan dan harga melalui intervensi pasar. Prakiraan BMKG yang menunjukkan sebagian wilayah Indonesia akan mengalami La Nina netral dan La Nina lemah harus dimanfaatkan untuk perluasan tanam padi. Upaya yang perlu dipersiapkan sejak saat ini adalah penyediaan benih padi dan pupuk bersubsidi, untuk mengantisipasi lonjakan permintaan musim tanam Mei-Agustus 2024. Program pompanisasi sangat diperlukan untuk meningkatkan luas panen, terutama di wilayah yang diprakirakan akan mengalami kekeringan atau curah hujan di bawah normal.

No	Nomor ND	Tanggal	Tujuan	Penerapan	Uraian
6	474/LB.050/A.11/04/2024	1 April 2024	Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	Rekomendasi kebijakan terkait terkait Prediksi Penurunan Luas Panen dan Produksi, serta Harga Gabah dan Beras Selama Tahun 2024 yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	Musim kemarau 2023 yang lebih panjang telah menyebabkan musim tanam periode Oktober-Maret 2023/2024 mengalami kemunduran. Akibatnya luas panen pada periode Januari-Mei 2024 (4,76 juta ha) diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 8,11 persen dibanding periode yang sama 2023 (5,18 juta ha); sementara produksinya turun dari 27,51 juta ton GKG menjadi 24,83 juta ton atau sekitar 9,74 persen (KSA Amatan Februari 2024). Berdasarkan perkiraan BMKG, pada periode April – Desember 2024 sebagian wilayah Indonesia akan mengalami kondisi La Nina Netral dan La Nina lemah. Pemerintah harus mempunyai Cadangan Beras Pemerintah dalam jumlah yang memadai untuk stabilisasi pasokan dan harga melalui intervensi pasar. Opsi penyerapan gabah domestik (walaupun berpotensi meningkatkan harga gabah) harus dilakukan, karena harga beras di pasar internasional masih relatif tinggi. Prakiraan BMKG yang menunjukkan sebagian wilayah Indonesia akan mengalami La Nina netral dan La Nina lemah harus dimanfaatkan untuk perluasan tanam padi. Upaya yang perlu dipersiapkan sejak saat ini adalah penyediaan benih padi dan pupuk bersubsidi, untuk mengantisipasi lonjakan permintaan musim tanam Mei-Agustus 2024. Program pompanisasi sangat diperlukan untuk meningkatkan luas

No	Nomor ND	Tanggal	Tujuan	Penerapan	Uraian
					panen, terutama di wilayah yang diprakirakan akan mengalami kekeringan atau curah hujan di bawah normal.
7	585.2/LB.050/A.11/04/2024	30 April 2024	Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Peratanian	Rekomendasi kebijakan terkait Fenomena Harga Beras di Atas Harga Eceran Tertinggi yang disampaikan ke Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	HET merupakan acuan bagi Pemerintah untuk melakukan operasi pasar beras dan menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat kurang mampu, namun tidak mengikat pada pelaku pasar beras secara umum. Dengan demikian istilah HET perlu diubah menjadi HEP (harga eceran pemerintah). Konsep ini sejalan dengan konsep HPP yang dulunya disebut sebagai harga dasar. Pengendalian harga beras dengan pendekatan hukum hendaknya dilakukan secara hati-hati agar tidak kontra produktif, dan menimbulkan ketakutan bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya yang justru akan berdampak negatif terhadap kelancaran pasokan beras di pasar.
8	692.1/LB.050/A.11/05/2024	30 Mei 2024	Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Peratanian	Rekomendasi kebijakan terkait Penguatan Sistem Perbenihan Padi yang disampaikan ke Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	Benih padi memegang peranan penting dalam upaya peningkatan produktivitas dan kualitas tanaman pangan. Oleh karena itu penggunaan benih unggul padi bermutu membutuhkan ketersediaan benih yang tepat varietas, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat harga. Beberapa konsep pembaruan sistem perbenihan yang diusulkan meliputi: (i) penelaahan potensi mengembalikan fungsi penelitian/perakitan varietas unggul baru padi

No	Nomor ND	Tanggal	Tujuan	Penerapan	Uraian
					kepada Kementan untuk mendukung target peningkatan produksi beras dan ketahanan pangan nasional; (ii) penguatan penelitian varietas oleh Kementan melalui kerja sama (partnership) dengan lembaga R&D internasional (seperti IRRI); (iii) pembentukan UPT (setingkat eselon 2b) di bawah Ditjen TP dengan tusi memproduksi benih (penjenis, dasar, pokok, sebar) didukung aturan yang mengatur mekanisme pemanfaatan varietas hasil pemuliaan peneliti di BRIN untuk diperbanyak benih sumber dan sebar oleh Kementan; (iv) penguatan mekanisme penyediaan benih in situ dengan meningkatkan kapasitas Balai Benih, produsen benih swasta dan penangkar benih dalam Kawasan Desa Mandiri Benih; dan (v) reedukasi petani untuk meningkatkan penggunaan benih bersertifikat kelas benih sebar.
9	729/LB.050/A.11/06/2024	5 Juni 2024	Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	Rekomendasi kebijakan terkait Daya saing usaha tani padi Indonesia dengan negara produsen utama yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian	Upaya peningkatan produksi padi secara berkelanjutan perlu mempertimbangkan efisiensi produksi dan daya saing terhadap negara produsen utama. Pengendalian alih fungsi lahan sawah, utamanya di Jawa, yang hingga saat ini masih menjadi tumpuan utama produksi padi nasional. Upaya pengendalian harus dibarengi dengan perbaikan dan penyediaan infrastuktur irigasi yang memadai. Peningkatan efisiensi udaha tani padi, utamanya melalui pengguna

No	Nomor ND	Tanggal	Tujuan	Penerapan	Uraian
				Pertanian	benih unggul bersertifikat dan alsintan. Penyediaan benih unggul bersertifikat saat ini menjadi persoalan seiring dengan berubahnya sistem kelembagaan perbenihan nasional. Untuk itu perlu segera dilakukan pembenahan kelembagaan perbenihan nasional, utamanya lembaga penyedia sumber benih.
10	996.1/LB.050/A.11/07/2024	30 Juli 2024	Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Peratanian	Rekomendasi kebijakan terkait Strategi Akselerasi Program Peremajaan Sawit Rakyat yang disampaikan ke Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	Program peremajaan sawit rakyat (PSR) memiliki tujuan selain untuk meningkatkan produktivitas juga mewujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan. Berbagai kendala dan hambatan pelaksanaan PSR terkait dengan legalitas lahan, faktor sosial ekonomi petani, kendala kebijakan/regulasi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan kendala teknis implementasi di lapangan. Diperlukan strategi kebijakan untuk mengakselerasi realisasi PSR yaitu: 1) pada aspek perencanaan; diperlukan perbaikan perencanaan baik pada penetapan luas sasaran dan target peremajaan yang didasarkan pada data yang lebih akurat, persiapan implementasi, sosialisasi yang lebih intensif, sinkronisasi antara proses pengusulan, penetapan dan kesiapan pelaksanaannya; 2) pada aspek pelaksanaan; perlu peningkatan koordinasi dan sinkronisasi semua instansi/lembaga yang menangani PSR, dukungan pembiayaan yang memadai, fasilitasi sertifikasi lahan sawit rakyat, serta integrasi

No	Nomor ND	Tanggal	Tujuan	Penerapan	Uraian
					mekanisme pengusulan jalur dinas dan jalur kemitraan; 3) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi; 4) pengembangan layanan BPDPKS dalam mendukung percepatan peremajaan sawit rakyat, meliputi: (i) peningkatan plafound bantuan dari Rp30 juta/ha, namun penetapan biaya, disesuaikan dengan hasil evaluasi terhadap RAB yang diusulkan; (ii) penambahan anggaran PSR untuk usaha tani tanaman semusim di sela tanaman sawit secara selektif; dan (iii) pembiayaan BPDPKS untuk subsidi bunga.
11	996.2/LB.050/A.11/07/2024	30 Juli 2024	Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Peratanian	Rekomendasi kebijakan terkait Strategi Percepatan Implementasi Perpres No.35 Tahun 2022 Mendukung Pembangunan Pertanian Berkelanjutan yang disampaikan ke Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	Strategi percepatan implementasi Perpres No.35/2022 harus segera dilakukan dengan mensosialisasikan substansi Perpres No.35/2022 melalui beragam media dan forum koordinasi dengan PEMDA. Pembentukan satu satminkal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota wajib dilakukan melalui surat keputusan dari gubernur/bupati/walikota. Untuk mempercepat pembentukan satminkal, diperlukan kerja sama dan koordinasi Kementan dengan Kemendagri dan PEMDA. Perlu dibentuk Tim monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan implementasi Perpres No. 35/2022. Membuat *pilot project* Satminkal penyuluhan pertanian. Memperkuat Dukungan anggaran yang berbasis kinerja dari pusat dan daerah terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Memperkuat sumberdaya

No	Nomor ND	Tanggal	Tujuan	Penerapan	Uraian
					dan kerja sama dengan banyak pihak antara lain dengan Kemendagri, Kominfo, Perguruan Tinggi, BRIN, PEMDA dan pihak terkait lainnya. Upaya kolaboratif, strategi implementasi yang tepat, dan dukungan anggaran berbasis kinerja sangat dibutuhkan untuk memperkuat kelembagan penyuluhan pertanian. Pembentukan satminkal, sosialisasi substansi peraturan, peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh, tersedianya sarana prasarana dan TIK, kerja sama dengan lembaga terkait, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan akan memperlancar implementasi Perpres No.35/2022.
12	1154.1/LB.050/A.11/08/2024	30 Agustus 2024	Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Peratanian	Rekomendasi kebijakan terkait Penguatan Sistem Perbenihan Hortikultura menuju Kemandirian Benih Hortikultura yang disampaikan ke Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	Terkait dengan pemasukan benih, penerapan dari Permentan 15/2017 dan Permentan 17/2018 serta Permentan 37/2016 terdapat ketidaksinkronan yang berdampak pada beredarnya benih impor di pasar domestik. Benih tersebut dibutuhkan oleh industri benih dan petani serta tidak sebatas pada jenis sayuran kubis, lobak, brokoli, dan sawi putih. Penyediaan benih hortikultura melalui impor khususnya dalam jumlah yang sangat besar memiliki dampak signifikan terhadap pasar benih domestik, baik dari segi harga maupun daya saing. Meskipun jumlah impor kecil, benih impor yang dianggap lebih berkualitas dapat memengaruhi persepsi dan preferensi petani

No	Nomor ND	Tanggal	Tujuan	Penerapan	Uraian
					terhadap benih lokal. Beberapa rekomendasi kebijakan antara lain: (1) harmonisasi regulasi antara Permentan 15/2017, Permentan 17/2018, dan Permentan 37/2016; (2) dukungan terhadap riset dan inovasi; (3) penyederhanaan proses regulasi dan sertifikasi; (4) penguatan dukungan perusahaan domestik; (5) pemanfaatan teknologi digital untuk distribusi; (6) penguatan mekanisme pengawasan; dan (7) kolaborasi antarpelaku usaha.
13	1311.1/LB.050/A.11/09/2024	30 September 2024	Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Peratanian	Rekomendasi kebijakan terkait Strategi Peningkatan Pemanfaatan berbagai Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri yang disampaikan ke Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	Berbagai perjanjian kerja sama perdagangan (FTA) antara Indonesia dengan negara-negara mitra yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendorong ekspor produk pertanian, nyatanya masih belum optimal pemanfaatannya. Terlebih bagi negara yang belum siap, seperti Indonesia, FTA lebih diterjemahkan sebagai upaya negara mitra untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan impor. Unit kerja teknis Kementan seharusnya dapat melakukan monitoring dan evaluasi dari masing-masing FTA yang diimplementasikan secara regular. Upaya ini dapat dioptimalkan jika diikuti dengan program diseminasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada para pelaku usaha. Saat ini upaya tersebut masih belum menjadi prioritas di direktorat teknis Kementan. Dokumen pendukung FTA berupa Perpres, UU, dan PMK

No	Nomor ND	Tanggal	Tujuan	Penerapan	Uraian
					seharusnya dapat dijadikan rujukan utama bagi Kementan untuk mengimplementasikan FTA dan mereviu kebijakan internal. Pemanfaatan FTA dapat dioptimalkan melalui penyusunan peraturan (Permentan) dan kebijakan terkait peningkatan ekspor produk pertanian yang merujuk pada regulasi terkait FTA yang ada. Di samping itu, perlu adanya sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, dan Badan Karantina Indonesia dalam rangka meningkatkan kesiapan Indonesia dalam pemanfaatan FTA untuk mendorong peningkatan ekspor produk pertanian.
14	1311.2/LB.050/A.11/09/2024	30 September 2024	Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Peratanian	Rekomendasi kebijakan terkait Strategi Pencapaian Sasaran Swasembada Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi yang disampaikan ke Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	Program swasembada pangan akan difokuskan pada komoditas pangan strategis (beras, jagung, dan ubi kayu) dan komoditas pangan pemicu inflasi (bawang merah dan cabai). Strategi untuk mewujudkannya, antara lain: (1) selama lima tahun ke depan, luas panen dan produktivitas **padi** ditargetkan masing-masing sekitar 13,29–15,64 juta hektare (tumbuh 4,15%/tahun) dan 5,14–5,18 ton per hektare (tumbuh 2,77%/tahun). Strategi utama yang akan dilakukan antara lain: (i) cetak sawah 3 juta hektare selama 3 tahun; (ii) revitalisasi sistem irigasi dan pemanfaatan 61 bendungan baru; (iii) modernisasi budi daya padi dan pengolahan pascapanennya; dan (iv) penyediaan benih

No	Nomor ND	Tanggal	Tujuan	Penerapan	Uraian
					unggul bersertifikat dan pupuk bersubsidi; (2) Selama lima tahun ke depan, luas panen dan produktivitas **jagung** ditargetkan masing-masing sekitar 3,93–6,60 juta hektare (tumbuh 13,84%/tahun) dan 6,16–6,21 ton per hektare (tumbuh 0,2%/tahun). Strategi utamanya, antara lain: (i) perluasan areal tanam; (ii) penyediaan benih unggul dan pupuk bersubsidi; (iii) modernisasi budi daya dan penanganan pascapanen jagung; dan (iv) pembangunan silo jagung untuk mempertahankan kualitas jagung pipil; (3) Selama lima tahun ke depan, luas panen dan produktivitas **ubi kayu** ditargetkan masing-masing sekitar 1,01–1,37 juta hektare (tumbuh 4,22%/tahun) dan 28,05–29,49 ton per hektare (tumbuh 1,26%/tahun). Strategi utamanya, antara lain: (i) perluasan areal tanam ubi kayu; (ii) penyediaan bibit unggul ubi kayu dan pupuk bersubsidi; dan (iii) pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) ubi kayu; (4) untuk memenuhi peningkatan kebutuhan rumah tangga dan industri selama 2025-2029, produksi **cabai** ditargetkan minimal tumbuh 19,50 persen per tahun. Strategi utamanya, antara lain: (i) produksi di luar musim (*off season*) dan peningkatan masa simpan cabai segar; (ii) penyediaan benih cabai unggul; (iii) mendorong keragaman konsumsi cabai segar, cabai olahan, dan produk turunan lainnya; dan

No	Nomor ND	Tanggal	Tujuan	Penerapan	Uraian
					(iv) modernisasi alsintan dan sistem pengairan hemat air; (5) untuk mengantisipasi peningkatan permintaan, sekaligus mengendalikan inflasi dan pemantapan swasembada **bawang merah**; maka produksi bawang merah selama 2025–2029 ditargetkan tumbuh 3,65 persen per tahun, dengan kisaran produksi 2,03–2,34 juta ton. Strategi utamanya, antara lain: (i) perbaikan sistem penyediaan benih bawang merah umbi in situ (pemberdayaan penangkar benih di sentra produksi) untuk menghemat biaya transportasi benih; (ii) menjamin ketersediaan pupuk secara enam tepat, utamanya pupuk NPK; (iii) penggunaan alsintan (utamanya kultivator); (iv) implementasi sistem irigasi tetes atau parit untuk menjaga kelembaban tanah agar umbi tumbuh optimal; (v) pengendalian OPT yang ramah lingkungan.
15	1416/LB.050/A.11/10/2024	11 Oktober 2024	Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Peratanian	Rekomendasi kebijakan terkait Fenomena Lonjakan Harga Gabah dan Beras dari Struktur Biaya Usaha Tani Padi dan Biaya Pengolahan Beras yang disampaikan kepada Plt.	Salah satu tantangan usaha tani padi di Indonesia adalah skala pengusahaan petani yang relatif kecil sehingga diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan efisiensi. Jika pemerintah mempertimbangkan akan menyesuaikan HPP gabah, maka disarankan dalam kisaran Rp6.000 - Rp6.250 per kg. Mempertimbangkan komparasi harga gabah dengan negara produsen lain dan skala pengusahaan usaha tani padi di Indonesia yang relatif kecil sangat disarankan peningkatan

No	Nomor ND	Tanggal	Tujuan	Penerapan	Uraian
				Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	HPP berkelanjutan perlu dikendalikan. Pemerintah harus mengupayakan peningkatan pendapatan petani melalui perpaduan peningkatan penguasaan lahan dan efisiensi usaha tani padi. Untuk memberikan keadilan bagi pelaku usaha beras, ketentuan HET beras seyogyanya hanya diperuntukkan bagi pemerintah untuk mengintervensi pasar apabila terjadi lonjak harga beras di pasar.
16	1544.1/LB.050/A.11/10/2024	31 Oktober 2024	Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Peratanian	Rekomendasi kebijakan terkait Potensi Dampak Pencabutan Larangan Ekspor Beras India terhadap harga beras Domestik yang disampaikan kepada Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	Sebagai negara eksportir beras terbesar, larangan ekspor beras India yang diberlakukan sejak pertengahan tahun 2023 telah memicu peningkatan harga beras di pasar dunia. Kebijakan relaksasi ekspor beras India diprediksi akan segera mengkoreksi harga beras dunia ke dalam kisaran US$450-500 per ton. Namun tren harga beras domestik justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga beras yang berkepanjangan telah mengkondisikan tingkat keseimbangan harga beras yang baru, meskipun terdapat impor beras yang relatif besar. Maka akan berpotensi memperoleh harga beras impor yang kompetitif untuk menstabilkan harga beras domestik. Saran kebijakan yang perlu ditempuh adalah: 1) peningkatan kapasitas produksi agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. 2) kebijakan secara penuh dan konsisten, mulai dari hulu hingga hilir; serta implementasi alat dan

No	Nomor ND	Tanggal	Tujuan	Penerapan	Uraian
					mesin pertanian modern; 3) secara serius mendorong diversifikasi konsumsi untuk mengurangi kebutuhan konsumsi beras; 4) peningkatan sinergi dan integrasi proram dengan menujuk satu K/L sebagai "komando" untuk menjadi "dirijen" program peningkatan produksi pangan strategis.
17	1544.2/LB.050/A.11/10/2024	31 Oktober 2024	Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Peratanian	Rekomendasi kebijakan terkait Strategi Peningkatan Produksi Susu mendukung Program Makan Bergizi yang disampaikan kepada Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	Untuk memenuhi program minum susu gratis dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB peternakan 5,68 persen per tahun, produksi susu minimal harus tumbuh 43,39 persen per tahun. Artinya, sasaran produksi susu tahun 2025 sebesar 1,02 juta ton dan meningkat menjadi 4,9 juta ton pada tahun 2029. Dengan tingkat kebutuhan susu dalam negeri selama kurun waktu 2025-2029 sekitar 7,4 – 7.9 juta ton, maka masih diperlukan impor susu sebesar 6,3 - 3,1 juta ton. Apabila targetnya swasembada susu, maka produksi susu dan populasi sapi perah harus ditargetkan masing-masing mencapai 888–8.170 ribu ton (tumbuh 67,22%/tahun) dan 8,26–8,49 juta ekor (tumbuh 0,7%/tahun). Strategi utama yang harus ditempuh antara lain: (i) penyediaan lahan usaha peternakan, (ii) penyediaan hijauan makanan ternak, benih ternak, benih pakan dan mekanisasi peternakan, (iii) dukungan regulasi dan diplomasi mempermudah impor ternak indukan, (iv) penguatan kelembagaan dan

No	Nomor ND	Tanggal	Tujuan	Penerapan	Uraian
					peningkatan kapasitas SDM peternakan, serta (v) penguatan hilirisasi produk peternakan.
18	1723.2/LB.050/A.11/11/2024	30 Nov-24	Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Peratanian	Rekomendasi kebijakan terkait Penyempurnaan Neraca Pangan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Pengendalian Inflasi Provinsi Maluku yang disampaikan kepada Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	Berdasarkan hasil analisis andil komoditas terhadap inflasi serta frekuensi kejadian sebagai sepuluh kontributor terbesar infllasi di Maluku, teridentifikasi sepuluh komoditas pangan berperan besar terhadap pembentuk inflasi sejak Januari 2019 sampai Juni 2024. Komoditas tersebut adalah: ikan layang, cabai rawit, ikan cakalang, sawi hijau, ikan tongkol, beras, kangkung, bawang merah, ikan selar, dan telur ayam ras. Faktor yang memengaruhi kontribusi komoditas terhadap inflasi adalah: fluktuasi harga, tingkat partisipasai konsumsi masyarakat, dan volume pasokan. Preferensi masyarakat Maluku terhadap konsumsi ikan segar turut menyumbang tingginya fluktuasi harga ikan. Dinamika harga komoditas pangan ditentukan oleh ketersediaan dan permintaan di pasar. Diperlukan penguatan data dan informasi ketersediaan dan harga pangan yang akurat dan *up to date* sebagai basis penentuan kebijakan pengendalian inflasi pangan. Perlu peningkatan kapasitas TPID melalui sinkronisasi dan koordinasi lebih baik. Untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengintervensi pasar secara langsung, perlu peningkatan kapasitas pelaku kerja sama antar

No	Nomor ND	Tanggal	Tujuan	Penerapan	Uraian
					daerah (KAD). Mengembangkan cadangan pangan dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah guna menjamin stabilitas ketersediaan dan harga komoditas di pasar.
19	1883.1/LB.050/A.11/12/2024	30 Desember 2024	Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Peratanian	Rekomendasi kebijakan terkait Rekomendasi Kebijakan Penyesuaian HPP Padi yang disampaikan kepada Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	Petani adalah produsen gabah sekaligus konsumen beras. Hasil kajian Patanas (2023) diketahui bahwa status petani adalah *net consumer*. Transmisi harga umumnya terjadi dari harga gabah ke harga beras. Artinya kenaikan harga gabah akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani pada satu sisi, namun pada sisi lain menambah tingkat pengeluaran petani akibat kenaikan harga beras. Jika HPP GKP dinaikan dari Rp6.000/kg menjadi Rp7.000/kg, maka harga beras medium yang diterima petani menjadi Rp15.164/kg (naik sekitar 14,36%). Hasil kajian Patanas juga menunjukkan bahwa kenaikan harga beras akan mendorong perilaku petani untuk menyimpan gabah hasil panen lebih banyak untuk antisipasi memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Artinya kenaikan tingkat pendapatan yang diharapkan diperoleh petani akibat kenaikan HPP GKP bisa jadi tidak optimal. Jika HPP dinaikan menjadi Rp7.000/kg, hasil simulasi menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pendapatan petani sekitar 26,03% dari semula Rp8,4 juta/ha/musim menjadi sebesar Rp10,58

No	Nomor ND	Tanggal	Tujuan	Penerapan	Uraian
					juta/ha/musim. Namun dengan luas penguasaan lahan petani yang umumnya petani gurem, maka pendapatan yang diterima petani hanya setengahnya yaitu Rp5,29 juta/musim, atau sebesar Rp1,3 juta/bulan. Artinya jika HPP dianggap sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan petani, maka butuh kenaikan HPP berapa persen lagi untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut. Tentunya HPP sebagai instrumen kebijakan perlu dikembalikan kepada tujuan utamanya yaitu untuk stabilisasi harga baik di tingkat produsen maupun konsumen. Upaya peningkatan kesejahteraan petani dapat dilakukan melalui instrumen lainnya.

Penilaian IKK Kementan oleh LAN Tahun 2023

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat, 10110
Telp. (021) 3868201, Fax. (021) 3848792, Website : www.lan.go.id

Nomor : 562/D.1.2/HKM.02.2 Jakarta, 5 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Pertanian Tahun 2021 dan 2023

Yth. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pertanian
di
Tempat

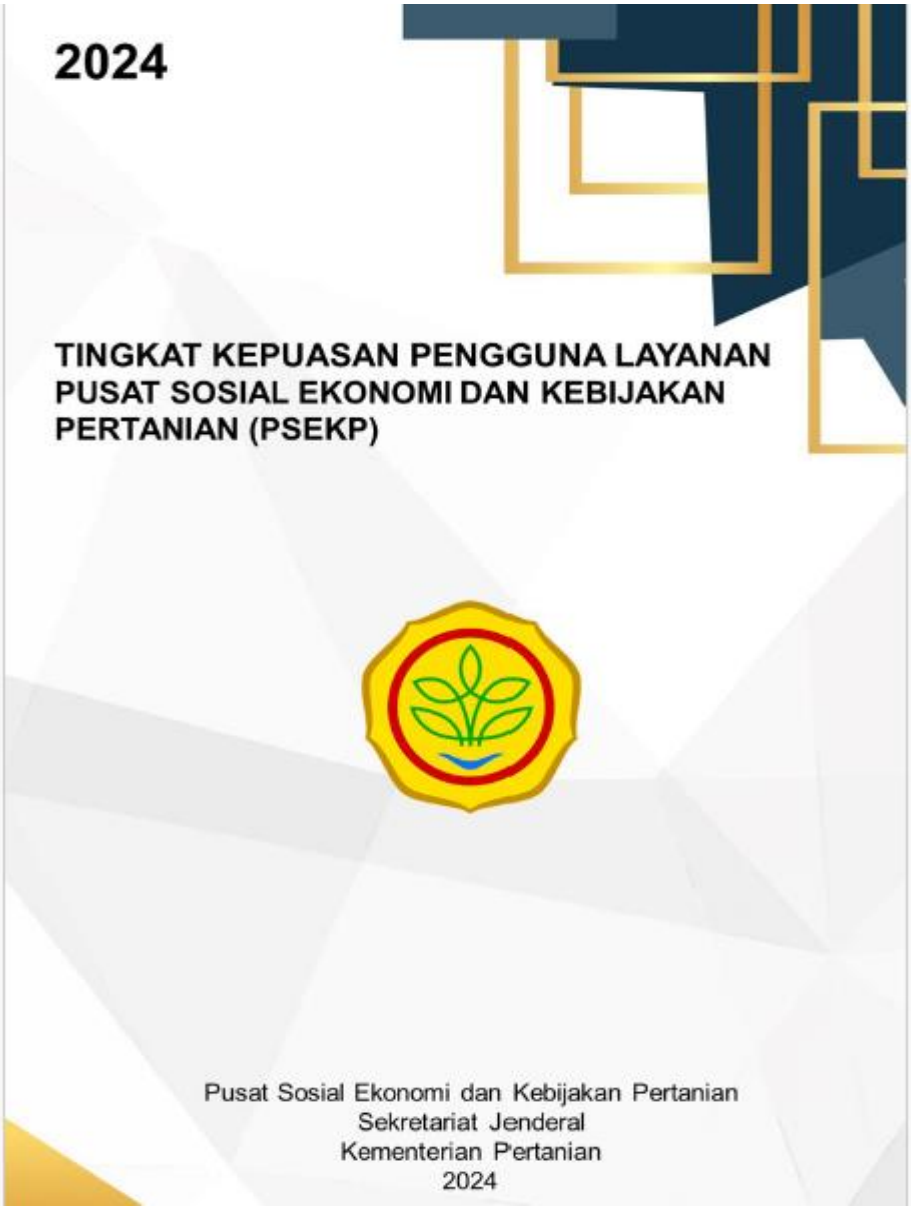
Sehubungan dengan pelaksanaan pengukuran nasional Indeks Kualitas Kebijakan atau IKK tahun 2021 dan 2023 oleh Lembaga Administrasi Negara sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pengukuran IKK menggunakan instrumen IKK yang tertuang dalam Surat Edaran LAN Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan.
2. Kementerian Pertanian telah berpartisipasi dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2021 dengan objek pengukuran pada 4 (empat) peraturan dan tahun 2023 dengan objek pengukuran pada 4 (empat) peraturan yang terpilih dalam sistem informasi IKK.
3. Berdasarkan validasi akhir Tim Nasional IKK dan *Board Member Meeting* IKK terhadap hasil *self assessment* kebijakan yang menjadi objek pengukuran IKK oleh Kementerian Pertanian Tahun 2021 dan 2023 diperoleh hasil penilaian yaitu:

A	**Pengukuran IKK 2021**		
No	**Nama Kebijakan**	**IKK***	**Predikat**
1	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Tertentu Lingkup Kementerian Pertanian	65.61	Baik
2	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis	63.10	Cukup
3	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa dari Negara Tertular Penyakit	65.14	Baik
4	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap pemasukan Atau Pengeluaran Sarang Burung Walet ke Dalam Wilayah Negara RI	66.74	Baik
Nilai IKK Instansi 2021		**65.15**	**Baik**
B	**Pengukuran IKK 2023**		
No	**Nama Kebijakan**	**IKK***	**Predikat**
1	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penelitian Dan Pengembangan Peremajaan Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit	62.68	Cukup
2	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura	55.71	Cukup
3	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Dosis Pupuk N, P, K, Untuk Padi, Jagung dan Kedelai Pada Lahan Sawah	81.50	Sangat Baik
4	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan	60.45	Cukup
Nilai IKK Instansi 2023		**66.08**	**Baik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Laporan Pelaksanaan dan Penghitungan Nilai Survei Kepuasan Layanan (IKSK 2)



PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PERTANIAN
Jln. Tentara Pelajar No. 3B Bogor 16111, Telp. 0251-8333964, 8325177
Faks. 0251-8314496, email: psekp@pertanian.go.id, psekpkemtan@gmail.com
psekp.setjen.pertanian.go.id psekp kemtan @psekp_kementan psekp_kemtan PSEKP Kementan